

Dr. H. Hamdan, M.Pd.

DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEAGAMAAN (DINIYAH) MELALUI PENDEKATAN GRASSROOTS



DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEAGAMAAN (DINIYAH) MELALUI PENDEKATAN *GRASSROOTS*

Dr. H. Hamdan, M.Pd.



**DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEAGAMAAN
(DINIYAH) MELALUI PENDEKATAN *GRASSROOTS***

Penulis

Dr. H. Hamdan, M.Pd.

Tata Letak

Ulfa

Desain Sampul

Khusnul Faizin

15.5 x 23 cm, x + 221 hlm.

Cetakan pertama, Juni 2022

ISBN: 978-623-466-059-3

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta

No. 132/DIY/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku ini dengan judul: *Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Keagamaan (Diniyah) melalui Pendekatan Grassroots*. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para pengikut dan mereka yang selalu mengamalkan dan menghidupkan sunnahnya hingga hari akhir nanti.

Buku ini disusun didasari atas kerisauan penulis melihat kondisi penerapan kurikulum di lembaga pendidikan keagamaan (diniyah) yang didesain dan dikembangkan secara sangat sederhana tanpa melalui prosedur teoritis dan tahapan-tahapan sesuai dengan lazimnya pengembangan sebuah kurikulum di lembaga pendidikan pada umumnya. Pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan keagamaan (diniyah) sebagian besar dilakukan dengan hanya menetapkan kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang harus diberikan kepada para santri sebagai kurikulum tanpa direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya, baik mengenai tujuan, isi materi, pendekatan, maupun evaluasinya, sehingga tidak ada batasan (*scope*) dan urutan (*sequence*) yang jelas untuk masing-masing tingkatan kelas dan perkembangan psikologi santri.

Lembaga pendidikan keagamaan (diniyah) umumnya lembaga pendidikan ini dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat, juga lembaga ini memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang ada, baik dari segi atmosfer akademik maupun dari segi tradisi (kultur) pembelajaran yang menekankan pada pendidikan akhlak dan *tafaqquh fid dien*. Sebagian besar lembaga pendidikan diniyah hidup, tumbuh dan berkembang atas swadaya masyarakat (umat). Selain itu, lembaga

ini dikelola oleh yayasan secara tradisional dan kekeluargaan, sehingga pengembangan kurikulumnya tentu akan berupaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat untuk mendesain kurikulum di lembaga diniyah harus berorientasi kepada masyarakat (umat) yakni akar rumput (*grassroots*) yang dalam pengembangan kurikulum dikenal dengan pendekatan *Grassroots*.

Pendekatan *grassroots* merupakan satu alternatif pendekatan dalam mendesain kurikulum sekolah, yaitu mendesain kurikulumnya dari bawah (*botton up*) mulai dari *needs assessment* dan harapan masyarakat sebagai pengguna dan pelanggan pendidikan keagamaan (diniyah)

Bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam, pengembangan kurikulum lembaga pendidikan diniyah jauh tertinggal dari lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti madrasah, dampaknya berakibat kepada hasil output dan outcome kurikulum tidak memenuhi harapan dan keinginan masyarakat sebagai pemakai lulusan (user). Untuk dapat mengejar ketertinggalan dalam hal pengembangan kurikulum dan diharapkan kurikulum di lembaga ini dapat terpetakan dan terorganisir dengan baik, maka perlu penyusunan desain pengembangan kurikulum diniyah yang tentu saja beroreintasi kepada masyarakat (user). Selain itu, sebuah kurikulum yang terdiri 4 komponen kurikulum harus dapat dievaluasi dan terukur. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum diniyah harus berupaya menetapkan standar atau kriteria yang dapat dijadikan sebagai petokan keberhasilan atau kegagalan sebuah kurikulum. Paling tidak ada 4 (empat) standar yang semestinya ada dalam sebuah kurikulum, yaitu: standar tujuan (SKL), standar isi, standar proses dan standar evaluasi.

Dalam buku sederhana ini berupaya membahas konsep kurikulum pendidikan, pendidikan diniyah, corak kurikulum pendidikan diniyah, teori pengembangan kurikulum, urgensi pengembangan kurikulum pendidikan diniyah, pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan diniyah, relevansi pengembangan

kurikulum pendidikan diniyah pendekatan *grassroots, needs assessment* dalam mendesain kurikulum diniyah, dan formula desain kurikulum pendidikan diniyah pendekatan *grassroots*.

Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi pendidik, pengelola pendidikan dan pimpinan lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan keagamaan (diniyah) dan dijadikan sebagai referensi dalam menyusun desain pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan keagamaan (diniyah) di Indonesia.

Terkhir, apa yang tertuang dan terkandung dalam buku yang sangat sederhana ini tidak lepas dari kealfaan dan kelemahan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat konstruktif dari para pembaca.

Wabillahittaufiq walhidayah

Wallahul Muwaafiq Ila Aqwamit Tharieq

Wassalam,
Banjarmasin, Agsutus 2021
Penulis,

Dr. H. Hamdan, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
KURIKULUM PENDIDIKAN	1
A. Istilah Kurikulum	1
B. Komponen atau Anatomi Kurikulum	9
C. Pengertian Desain Kurikulum	12
BAB II	
PENDIDIKAN KEAGAMAAN (DINIYAH).....	17
A. Penjelasan Pendidikan Diniyah	17
B. Aturan Terkait Pendidikan Diniyah	19
C. Karakter Pendidikan Diniyah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.....	21
BAB III	
CORAK KURIKULUM PENDIDIKAN KEAGAMAAN (DINIYAH)	29
A. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.....	29
B. Kitab atau Referensi yang Diajarkan Pada Pendidikan Diniyah	30
C. Tradisi Pendidikan Diniyah.....	32
D. Kendala Pendidikan Diniyah dalam Berinovasi	34
BAB IV	
TEORI DAN KONSEP PENGEMBANGAN KURIKULUM	37
A. Pengertian Pengembangan Kurikulum.....	37
B. Landasan dalam Pengembangan Kurikulum.....	39
C. Model Pengembangan Kurikulum	50
D. Prinsip Pengembangan Kurikulum.....	56

BAB V	
URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEAGAMAAN (DINIYAH)	69
A. Minimnya Pemahaman akan Konsep Kurikulum dan Manajemen.....	69
B. Potensi Sekaligus Kelemahan Pendidikan Diniyah.....	71
BAB VI	
KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI LEMBAGA PENDIDIKAN DINIYAH	75
A. Potensi Pendidikan Diniyah dan Pertimbangan Landasan Sosiologis dalam Pengembangan Kurikulumnya	75
B. Pengembangan Kurikulum Berbasis <i>Needs Assessment</i>	78
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan Diniyah	85
D. Kurikulum yang Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat .	92
BAB VII	
RELEVANSI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DINIYAH PENDEKATAN <i>GRASSROOTS</i>	97
A. Proses Belajar Mengajar (PBM) Pada Kurikulum Pendekatan <i>Grassroots</i>	98
B. Evaluasi Pendidikan Islam, Remedial, dan Standar Ketuntasan Minimal Pada Kurikulum Pendekatan <i>Grassroots</i>	101
C. Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan sebagai Sampel.....	126
D. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Diniyah di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam di Kalimantan Selatan	128
BAB VIII	
<i>NEEDS ASSESSMENT</i> DALAM MENDESAIN KURIKULUM DINIYAH DI KALIMANTAN SELATAN	129
A. Visi-Misi dan Tujuan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan.....	129
B. Pelaksanaan Kurikulum Diniyah di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam	135

C. Pandangan Pimpinan Pondok, Ustadz/Ustadzah, dan <i>Stakeholders</i> Lainnya Terhadap Kurikulum Pendidikan Diniyah yang Berlaku.....	147
BAB IX	
FORMULA DESAIN KURIKULUM PENDIDIKAN DINIYAH	
PENDEKATAN <i>GRASSROOTS</i>	165
A. Dasar Pembentukan Desain Pengembangan Kurikulum.....	165
B. Rancangan Desain Pengembangan Kurikulum	191
C. Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah di Kalimantan Selatan dengan 4 Standar	195
DAFTAR PUSTAKA	217

BAB I

KURIKULUM PENDIDIKAN

Kurikulum menjadi komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Hal ini didasarkan alasan bahwa kurikulum memuat visi, misi, atau target capaian yang akan diraih melalui proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya. Kurikulum jugalah yang menjadikan proses pendidikan menjadi terarah, sehingga mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan kurikulum mulai dari makna, komponen, prinsip, dan lain-lain harus dipahami dengan baik oleh para pendidik dan tenaga kependidikan.

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan jika terdapat aspek-aspek yang tidak terealisasi dalam proses pendidikan. Hingga pada akhirnya akan diperoleh solusi atas permasalahan yang ada. Sedangkan pada aspek yang dapat dicapai, maka diperlukan strategi untuk meningkatkannya sehingga proses pendidikan senantiasa menunjukkan peningkatan kualitas.

A. Istilah Kurikulum

Sebuah institusi atau lembaga pendidikan sudah tentu memiliki program pendidikan atau program belajar yang hendak dicapai. Itulah yang disebut dengan kurikulum. Maka dalam pengertian yang sederhana, kurikulum adalah program pendidikan atau program belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan.¹

Sebenarnya kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan sudah lama sekali. Namun, masih belum terkonsep secara mapan. Wiles dan Bondi menyebutkan bahwa istilah kurikulum sudah diketahui keberadaannya sekitar tahun 1820-an, namun istilah ini

¹ Hafni Ladjid, *Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 24.

secara modern pertama kali dipakai di Amerika Serikat setelah satu abad kemudian.² Untuk lebih memahami makna kurikulum, maka penulis akan menjabarkan pengertiannya baik secara etimologi maupun terminologi.

1. Pengertian Kurikulum Secara Etimologi

Jika merujuk pada Kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, kata *curriculum* berarti: "the subjects included in a course of study or taught at a particular school, college, etc."³ Dengan ungkapan lain, maksudnya adalah serangkaian mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, perguruan tinggi, atau tempat belajar lainnya.

Beberapa pakar menyebutkan pengertian kurikulum yang diambil dari berbagai bahasa. Diketahui bahwa kata kurikulum berasal dari Bahasa Latin, yaitu "*currere*" yang merupakan kata kerja "*to run*", artinya lari cepat, tergesa-gesa atau menjalani.⁴

Sedikit berbeda, Subandijah mengemukakan bahwa kurikulum berasal dari Bahasa Yunani yang pada awalnya kata tersebut dipakai dalam bidang olah raga, yaitu kata *currere*.⁵ Kata *currere* tersebutlah yang kemudian diadopsi ke beberapa bahasa, salah satunya adalah Bahasa Inggris yang bermakna *course* atau *subject*. Sedang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai mata pelajaran, mata diklat atau mata kuliah. Jika dalam bahasa Arab diartikan *al-mâddah*, yang dalam bentuk lain dikenal pula istilah *minhâj al-dirâsi* (kurikulum mata pelajaran) atau *minhaj al-madrasah* (kurikulum sekolah/madrasah).⁶

² Wiles dan Bondi, *Curriculum Development: A Guide to Practice*, 2.

³ A. S. Hornby, *Oxford Advanced Dictionary of Current English* (Great Britain: Oxford University Press, 1995), 287.

⁴ Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 12.

⁵ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 1.

⁶ Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis* (Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2016), 23.

Jika ditelaah dalam perspektif ilmu Bahasa Arab, kata *currere* merupakan kata kerja (*fi'il*), kemudian dijadikan kata benda (*isim mashdar*) menjadi "*curriculum*". Kata kurikulum berbentuk *mufrad* (kata tunggal) yang memiliki beberapa makna, sebagai berikut:

- a. Tempat perlombaan atau jarak yang harus ditempuh seorang pelari, dalam kereta perlombaan.
- b. Jalan untuk pedati (delman) untuk perlombaan.
- c. Perjalanan berupa pengalaman tanpa berhenti.
- d. Jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari yang dimulai dari garis *start* sampai kepada garis *finish*.⁷

Berdasarkan pada definisi-definisi kurikulum yang ditinjau dari sudut pandang etimologis di atas, diketahui bahwa kata kurikulum pada awalnya dipakai dalam bidang olah raga, terutama pada cabang atletik. Pada perkembangan selanjutnya, istilah tersebut lebih populer digunakan di dunia pendidikan. Sebagian orang beranggapan bahwa arti pada poin (3) di atas merupakan proses pembelajaran seseorang melalui pengalaman panjang, yakni pendidikan seumur hidup (*long life education*), dan sesuai dengan konteks pendidikan Islam bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hayat (*thûl al-hayâh*). Selain itu, poin (3) tersebut bermakna bahwa pengalaman dapat memberikan seseorang berupa pembelajaran seperti pepatah dalam bahasa Inggris "*experience is the best teacher*".

Namun, sebagian besar para pakar/ahli pendidikan berpendapat bahwa makna kurikulum yang poin (4) atau yang terakhir itulah yang dianggap paling identik dengan proses belajar-mengajar (PBM), yaitu PBM yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga kepada penilaian atau evaluasi. Yakni proses mengukur pencapaian target kurikulum bahkan hasilnya dapat ditindak-lanjuti (*follow up*). Sehingga atas dasar dan pertimbangan tersebut, kemungkinan

⁷ Soetopo dan Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, 12.

besar kata kurikulum dipakai sebagai istilah dalam dunia pendidikan hingga sekarang.⁸

2. Pengertian Kurikulum Secara Terminologi

Kata kurikulum diartikan sebagai *subject* (Bahasa Inggris) atau mata pelajaran (Bahasa Indonesia) atau *al-mâddah* (Bahasa Arab). Untuk lebih mendalami pemahaman akan istilah kurikulum, maka penulis membagi penjelasan terkait kurikulum dalam arti sempit (tradisional) dan luas (modern).

a. Penjelasan kurikulum dalam arti sempit (tradisional)

Dalam tinjauan yang sempit, istilah kurikulum diartikan sebagai bidang studi tertentu yang diajarkan di sekolah/madrasah kepada peserta didik yang bertujuan agar mereka dapat naik kelas dan/atau untuk lulus memperoleh sertifikat kelulusan, seperti ijazah. Seperti yang didefinisikan oleh Soetopo dan Soemanto, bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan kelas atau ijazah.⁹

Definisi tersebut tampak senada dengan pendapat Giroux dan Pinnar yang telah dikutip oleh Syaifuddin Sabda, "*the data or information recorded in guides or text books and overlooks many additional elements that needed to be provided for in a learning plan.*"¹⁰ Sementara itu, William B. Ragan yang dikutip Soetopo dan Soemanto mengemukakan bahwa kurikulum adalah "*Traditionally, the curriculum has meant the subject taught in school, or course of study.*"¹¹

Kata kurikulum menurut Taba adalah "*A curriculum is a plan for learning: therefore, what is known about the learning*

⁸ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 5.

⁹ Soetopo dan Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, 12.

¹⁰ Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis*, 25.

¹¹ Soetopo dan Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, 12.

process and development of individual bearing on shaping of a curriculum,"¹² atau kata kurikulum berarti rencana untuk belajar (*a plan for learning*). Selain itu, Wiles dan Bondi menambahkan, "*the term of curriculum is usually associated with a document such as text book, syllabus, teachers guide or learning package,*"¹³ atau istilah yang selalu dikaitkan dengan dokumen seperti buku teks, silabus, dan pedoman guru atau paket belajar, atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Di sini kedudukan kurikulum dianggap sebagai *instructional guidance*, juga sebagai alat *anticipatory*, yaitu alat yang dapat meramalkan target kurikulum yang dapat dicapai di akhir pembelajaran. Dengan demikian, kata kurikulum sekarang ini identik dengan pedoman pembelajaran, silabus atau buku-buku teks yang ditetapkan sebagai bidang studi atau mata kuliah.

Berdasarkan pemaparan atas beberapa pendapat terkait dengan kurikulum dalam arti sempit, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum diartikan sebagai: 1) mata pelajaran atau sejumlah bidang studi yang harus ditempuh dan dikuasai peserta didik secara intelektual (kognitif) untuk naik kelas atau 2) untuk mendapatkan ijazah (lulus), dan 3) sebagai rencana pelajaran (*lesson plan*) bagi guru. Bertitik tolak dari simpulan tersebut, terkesan bahwa dalam proses pembelajaran, peserta didik dipaksa secara kognitif harus bisa menangkap materi. Dalam artian menghafal semua informasi yang disampaikan. Dengan demikian, terkadang terabaikan aspek-aspek lain seperti aspek biologis, aspek sosiologis dan aspek psikologis. Oleh karena itu, konsep kurikulum secara tradisional ini kurang tepat diterapkan dalam pendidikan Islam. Layak kiranya menjabarkan kurikulum dalam dalam arti luas (modern).

¹² Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice* (San Francisco: Brace & World Inc, 1962), 11.

¹³ Jon Wiles dan Joseph Bondi, *Curriculum Development: A Guide to Practice* (New Jersey: Pearson Education. Inc, 2007), 1.

b. Penjelasan kurikulum dalam arti luas (modern)

Para pendidik dan ahli kurikulum telah banyak berupaya dalam memberikan batasan (definisi) kata kurikulum. Namun di antara mereka terkadang terjadi perbedaan konsep dan pemahaman. Bisa jadi akibat dari perbedaan tersebut adalah adanya sudut pandang dan latar belakang keilmuan mereka yang berbeda.

Meskipun demikian, sebenarnya secara maknawi, definisi kurikulum yang mereka sampaikan memiliki kandungan maksud dan pemahaman yang serupa. John F. Kerr dalam Subandijah mendefinisikan kurikulum sebagai *"All the learning which is planned or guided by the school, whether it is carried on in groups or individually, inside of or outside of the school"*.¹⁴ Berdasarkan ini dipahami bahwa Kerr mengemukakan bahwa pembelajaran dapat berlangsung di mana saja, selama pembelajaran tersebut direncanakan dan difasilitasi oleh guru/sekolah. Konsep inilah yang direkomendasikan dalam implementasi Kurikulum 2013. Di mana proses pembelajaran terjadi kapan saja dan di mana saja dengan pembelajaran lingkungan jejaring.

Albert I. Oliver mengemukakan kurikulum sebagai program pendidikan di sekolah, dibagi ke dalam empat elemen/unsur dasar. Keempat elemen/unsur yang dimaksud adalah: (1) unsur studi; (2) unsur pengalaman; (3) unsur pelayanan; dan (4) unsur kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*).¹⁵

Berdasarkan pendapat Oliver di atas, maka kurikulum dalam pengertian yang luas, tidak saja yang terdapat dalam dokumen kurikulum yang tertulis. Tetapi juga ada kurikulum yang tersembunyi (*hidden curriculum*). *Hidden curriculum* itu sendiri banyak memberikan kontribusi dalam proses pendidikan terutama pendidikan akhlak atau karakter peserta didik.

¹⁴ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, 2.

¹⁵ Albert I. Oliver, *Curriculum Improvement: A Guide Problem, Principles, and Process*, 2 ed. (New York: Harper & Row, 1977), 8.

Syaifuddin mengutip pendapat Stratemeyer yang mengemukakan bahwa kurikulum dalam arti modern/luas adalah *"The sum total of the school efforts to influence learning whether in the classroom, play ground or out of school."*¹⁶ Nampak di sini, Stratemeyer lebih mempertegas bahwa kurikulum adalah upaya yang menyeluruh untuk memberikan efek pengiring yang baik dan positif kepada peserta didik, dan juga kegiatan pembelajarannya dapat terlaksana dan berlangsung di mana saja.

Sementara itu, William B. Ragan dalam Soetopo, mengemukakan kurikulum dalam pengertian luas sebagai *"... all the experiences of the children for which the school accepts responsibility."*¹⁷ Pendapat ini bermaksud bahwa kurikulum adalah menyangkut seluruh aspek, aktivitas, dan pengalaman peserta didik yang berada di bawah pengawasan lembaga sekolah/madrasah, tanpa membedakan kurikulum tersebut apakah bersifat intrakurikuler, kokurikuler ataukah ekstrakurikuler. Semuanya adalah kurikulum yang berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah atau di madrasah.

Hamdani Hamid menambahkan secara umum dengan mengutip pendapat Ronald C, bahwa definisi kurikulum yang dapat diterima saat ini adalah yang sudah berubah dari isi mata pelajaran dan sejumlah mata pelajaran kepada semua pengalaman yang ditawarkan kepada peserta di bawah arahan dan bimbingan sekolah.¹⁸ Artinya kurikulum tidak hanya berupa susunan mata pelajaran, melainkan bimbingan dari pihak sekolah secara keseluruhan.

Daniel Tanner dan Laurel Tanner menambahkan *"... curriculum as that reconstruction of knowledge dan experience*

¹⁶ Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis*, 25.

¹⁷ Soetopo dan Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, 13.

¹⁸ Hamdani Hamid, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 16.

that enable the learner to grow in exercising intelligent control of subsequent knowledge and experience".¹⁹ Oleh karena itu, kurikulum harus direncanakan secara sistematis dengan muatan pengetahuan dan pengalaman belajar, dan selalu mengikuti pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan sosial anak didik secara seimbang dan harmonis.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19), yang disebut dengan kurikulum adalah "Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu."²⁰ Ini menandakan bahwa kurikulum menurut UU RI, tidak sekadar rencana. Lebih dari itu, kurikulum terdiri dari beberapa komponen, seperti komponen tujuan, isi atau bahan pelajaran, dan evaluasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka kurikulum secara luas dapat disimpulkan adalah keseluruhan pengalaman peserta didik. Pengalaman tersebut baik saat berada di dalam kelas (dalam artian terjadwal), maupun di luar kelas seperti di halaman, ruang praktik, laboratorium atau perpustakaan, dan di luar sekolah seperti kunjungan wisata dan ke museum yang mempunyai misi dan tujuan pembelajaran. Semua program tersebut berada di bawah tanggung jawab sekolah.

Di sebagian besar lembaga pendidikan formal, seperti madrasah dan sekolah sudah menerapkan kurikulum dengan sudut pandang atau pengertian modern (konsep luas). Di mana kurikulum pembelajaran atau program kegiatan dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) intrakurikuler (kegiatan pembelajaran yang

¹⁹ Daniel Tanner dan Laurel Tanner, *Curriculum Development: Theory into Practice*, 4 ed. (Upper Saddle River, N.J: Merrill/Prentice Hall, 2007), 99.

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2005.

terjadwal di dalam kelas yang bersifat tetap); (2) kokurikuler adalah kegiatan yang mendampingi kegiatan intra kurikuler (Pekerjaan Rumah, les pelajaran tambahan, dan tugas lainnya), dan (3) ekstrakurikuler (kegiatan di luar jadwal resmi bahkan dapat dilaksanakan pada hari libur), seperti pengembangan diri dalam kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP 2006). Kemudian, konsep ini berlanjut pada kurikulum 2013 yang saat ini sudah diimplementasikan di sekolah-sekolah.

B. Komponen atau Anatomi Kurikulum

Kurikulum terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap komponen tersebut harus diterapkan dengan baik agar tidak mengganggu komponen yang lainnya.

Menurut bahasa, komponen berarti "bagian dari keseluruhan atau unsur."²¹ Sedangkan menurut istilah, komponen didefinisikan "sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam sebuah sistem."²²

Sebuah kurikulum merupakan satu sistem yang sangat kompleks, yang di dalamnya terdapat beberapa komponen. Antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, antara satu unsur dengan unsur lainnya tidak dapat dipisahkan, bahkan memiliki keterkaitan.

Sukmadinata mengemukakan bahwa "kurikulum diumpamakan sebagai organisme makhluk hidup yang mempunyai unsur-unsur anatomi tertentu".²³ Pendapat ini menegaskan bahwa kurikulum mempunyai susunan unsur-unsur yang saling berhubungan dan

²¹ Pusat Bahasa Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 585.

²² Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Teori dan Praktek* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 24.

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1988), 110.

saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, pihak pengembang kurikulum harus dapat menentukan apa saja komponen utama kurikulum, komponen yang urgen dan berpengaruh dalam mendesain dan mengimplementasi, bahkan sampai kepada mengevaluasi dan merevisi kurikulum sekolah/madrasah.

Telah dipahami bahwa kurikulum adalah satu sistem yang cukup kompleks. Oleh karena itu, para ahli kurikulum berbeda sudut pandang mereka dalam menetapkan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah kurikulum.

Sixten Marklund dalam Soetopo dan Soemanto, mengemukakan bahwa kurikulum terdiri 13 (tiga belas) komponen yang terperinci. Mulai dari unsur regulasi pendidikan sampai kepada unsur administrasi dan kerja sama antara guru dan siswa. Selanjutnya, Soetopo dan Soemanto mencoba menyederhanakan pendapat Marklund tersebut menjadi tujuh (7) komponen. Hal yang senada juga terdapat dalam kurikulum tahun 1975 yang menetapkan tujuh (7) komponen.²⁴

Sementara itu, Subandijah membagi komponen kurikulum kepada dua (2) klasifikasi, yaitu komponen pokok dan komponen penunjang. Komponen pokok terdiri dari lima (5) komponen, yaitu:

1. tujuan;
2. isi/materi;
3. organisasi/strategi; dan
4. media, dan
5. PBM.

Sedangkan komponen penunjang terdiri dari tiga (3) komponen, yaitu:

1. sistem administrasi dan supervisi;
2. pelayanan BP; dan

²⁴ Soetopo dan Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, 24.

3. sistem evaluasi.²⁵

Sebenarnya Abdullah Idi sependapat dengan Subandijah dengan lima (5) komponen pokok kurikulum. Perbedaannya adalah bahwa Subandijah menempatkan komponen evaluasi sebagai komponen penunjang. Sedangkan Abdullah Idi melakukan sebaliknya, yaitu menambahkan komponen evaluasi sebagai komponen utama. Sehingga dengan demikian, Abdullah Idi menetapkan unsur/komponen kurikulum menjadi enam (6) komponen.²⁶

Sementara itu, ada juga beberapa pakar yang berpendapat bahwa hanya ada empat (4) komponen kurikulum. Penganut pedapat ini adalah S. Nasution, John F. Kerr, Fuaduddin dan Sukama Karya, dan Nana Syaodih Sukmadinata. Empat (4) komponen kurikulum tersebut, yaitu:

1. komponen tujuan (*objectives*);
2. komponen isi/materi kurikulum (*knowledges*);
3. komponen PBM (*school learning experiences*; dan
4. komponen evaluasi (*evaluation*).

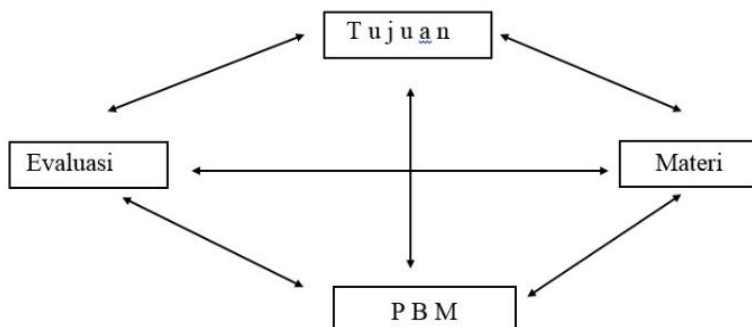
Dalam hal ini, penulis cenderung mengikut pada pendapat yang terakhir, bahwa sebuah kurikulum terdiri atas empat (4) komponen. Keempat komponen utama inilah yang dijadikan fokus dalam penelitian yang telah penulis lakukan terhadap kurikulum pendidikan diniyah, yaitu untuk mengetahui keberadaan dan keterkaitan masing-masing komponen dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan. Kemudian dilakukan perancangan atau desain atas kurikulum pendidikan diniyah sehingga relevan dengan zaman dan memenuhi kebutuhan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kurikulum adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Secara sederhana hubungan atau interkoneksi

²⁵ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, 6.

²⁶ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 78.

masing-masing komponen dapat dikemukakan seperti gambar berikut:



Gambar 1. Keterkaitan komponen-komponen kurikulum dalam satu sistem berdasarkan S. Nasution.²⁷

Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing komponen saling berkaitan. Tujuan, materi, proses belajar-mengajar (PBM), dan evaluasi perlu saling menunjang. Setiap komponen ibarat mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan (makro) bergantung pada kelancaran pelaksanaan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Oleh karena itu, semua pihak penyelenggara pendidikan harus benar-benar memperhatikan tiap-tiap komponen agar jangan sampai satu komponen menjadi penghambat terhadap jalannya proses pelaksanaan kurikulum itu sendiri.

C. Pengertian Desain Kurikulum

Kata “desain” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti kerangka bentuk; rancangan, dan dapat juga berarti motif; pola; atau corak.²⁸ Maka desain adalah rancangan, pola atau kerangka sesuatu. Jika disebutkan desain baju, maka artinya adalah rancangan baju, polanya atau kerangka dari baju tersebut.

²⁷ Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, 34.

²⁸ Pusat Bahasa Depdiknas, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 257.

Sementara itu, *design* (Bahasa Inggris) atau desain dalam konteks kurikulum adalah pola (*pattern*), suatu rancangan atau kerangka, pola dasar atau kerangka dalam mengembangkan sebuah kurikulum.²⁹ Jadi, dalam upaya atau proses pengembangan kurikulum memerlukan desain atau rancangan atau kerangka berkenaan dengan kurikulum tersebut.

Sementara itu, menurut Saylor dan Alexander dalam Soetopo dan Soemanto bahwa *curriculum design* berarti pola (*pattern*), atau kerangka (*framework*) atau organisasi struktural (*structural organization*) yang dipakai dalam menyeleksi, merencanakan, dan memajukan pengalaman-pengalaman pendidikan (pembelajaran) di sekolah.³⁰ Berdasarkan ini, maka desain kurikulum adalah kerangka atau pola dasar dalam menyeleksi, menyusun, dan mengembangkan kurikulum baru.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa seorang *curriculum designer* dalam pengembangan kurikulum haruslah menentukan dan menyeleksi terlebih dahulu pola atau kerangka kurikulum yang hendak dikembangkan termasuk di dalamnya menentukan *scope* dan *sequence* kurikulum tersebut. Baru kemudian ia dapat melangkah ke tahap selanjutnya. Sebab, bagaimana ia dapat mengembangkan kurikulum jika polanya saja masih tidak jelas. Oleh sebab itu, di awal perlu dilakukan penyeleksian atau penentuan pola kurikulum yang hendak diaplikasikan dalam upaya pengembangan kurikulum tersebut.

Sukmadinata mengemukakan ada empat (4) macam desain kurikulum, yaitu:³¹

²⁹ Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Teori dan Praktek*, 83.

³⁰ Soetopo dan Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, 74.

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 124-27.

1. *Subject Centered Design*

Subject centered design adalah desain kurikulum yang berpusat pada materi pelajaran. Desain ini disebut juga subjek akademis. Pola kurikulum ini paling populer, paling tua, dan paling banyak digunakan dalam pengembangan kurikulum. Desain atau kerangka kurikulum ini berpusat pada isi (*content*) materi yang diberikan kepada peserta didik. Sehingga desain kurikulum ini melahirkan kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah (*separated subjects curriculum*) yang berpusat pada konten atau isi materi kurikulum.

Pada dasarnya desain kurikulum ini merupakan perkembangan dari konsep pendidikan tradisional-klasik yang konvensional. Desain ini lebih menekankan pada pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan nilai-nilai (*values*) masa lalu dan berupaya untuk menyajikannya kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, kurikulum ini mengutamakan isi bahan pelajaran (*subject matter*). Organisasi kurikulumnya disebut *subject academic*.

2. *Learner Centered Design* (LCD)

Desain kurikulum ini sangat berbeda dengan *subject centered design*. Jika *subject centered design* berupaya pada keinginan untuk melestarikan budaya, pengetahuan, dan keterampilan masa lalu (kurikulum konservatif) kepada generasi berikutnya, maka *learner centered design* (LCD) adalah desain kurikulum yang berfokus pada peserta didik.

Desain yang kedua ini dianggap sesuai dengan konsep teori pendidikan modern, bahwa dalam proses pembelajaran berupaya untuk memberdayakan semua potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Pada desain ini, pendidik lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, yakni berperan menyiapkan berbagai kebutuhan dan kemudahan bagi peserta didik. Selain itu, guru berperan menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang menarik dan kondusif, serta

mendorong dan membimbing peserta didik sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Oleh karena itu, pada desain ini fokusnya adalah pengorganisasian kurikulum didasarkan atas minat, kebutuhan dan tujuan pembelajaran.

Sukmadinata juga menjelaskan bahwa ada dua (2) ciri utama yang membedakan desain kurikulum ini dengan *subject centered design*, yaitu:

- a. *Learner centered design* dalam mengembangkan kurikulum lebih terfokus kepada peserta didik bukan pada *content* atau isi materi kurikulum (*subject matter*).
- b. Jenis kurikulum ini bersifat *not preplanned* artinya kurikulum tidak dapat disusun dan direncanakan terlebih dahulu, tetapi memerlukan kerja sama pendidik dan peserta didik dalam mengembangkannya.³²

Learner centered design disebut juga dengan *pupil centered design* karena karakteristik dari desain kurikulum ini adalah menekankan pada aktivitas belajar peserta didik, sementara pengalaman belajarnya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Desain ini berdampak pada pembelajaran di kelas, seperti tingkat partisipasi belajar peserta didik yang lebih aktif.

3. *Problem Centered Design*

Problem centered design adalah desain kurikulum yang berfokus kepada masalah atau problem manusia. Desain ini berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia (*man centered*).

Berbeda dengan *learner centered design* yang mengutamakan peserta didik secara individual, sementara *problem centered design* menekankan manusia dalam kesatuan kelompok atau masyarakat. Para pendidik berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, ia selalu hidup bersama. Dalam kehidupan bersama ini, kemungkinan besar

³² *Ibid.*, 128.

manusia akan menghadapi masalah-masalah bersama yang harus dipecahkan secara bersama pula. Mereka berinteraksi, berkooperasi dalam memecahkan problem sosial yang mereka hadapi. *Problem centered design* menekankan baik pada isi (*content*) materi maupun perkembangan peserta didik.

Selain tiga (3) desain yang dikemukakan Sukmadinata di atas, masih ada pendapat lain yang menambahkan satu desain kurikulum, yaitu: *social functions design* atau desain fungsi-fungsi sosial.

4. *Social Functions Design*

Social function design adalah desain kurikulum yang menekankan pada fungsi-fungsi atau peranan individu dalam sebuah masyarakat (*society*). Desain ini tampaknya adalah penyempurnaan terhadap *problem centered design* yang hanya menekankan pada problem (masalah).

Social functions design lebih menekankan peranan anggota masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial, dalam rangka memecahkan masalah dan menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya dalam sebuah masyarakat (*community*). Umumnya desain kurikulum ini diterapkan dengan metode sosio-drama, simulasi, dan drill.

BAB II

PENDIDIKAN KEAGAMAAN (DINIYAH)

Pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam buku ini adalah pendidikan keagamaan Islam atau yang disebut dengan diniyah. Pada pelaksanaannya, lembaga pendidikan keagamaan Islam berada pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Lembaga pendidikan Islam sebenarnya sudah lama sekali tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Lembaga pendidikan keagamaan Islam pada awal kemunculannya dimulai dari rumah. Selanjutnya selain rumah kyai atau tuan guru, difungsikan juga surau dan masjid. Seiring waktu, pada akhirnya sampai kepada bentuk pendidikan (melembaga) seperti sekarang ini. Ada yang masih menerapkan sistem *sorogan*, tetapi ada juga yang sudah klasikal. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pembahasan tentang pendidikan keagamaan Islam atau disebut juga dengan pendidikan diniyah akan selalu menjadi laik untuk dikemukakan.

A. Penjelasan Pendidikan Diniyah

Membicarakan pendidikan diniyah tidak dapat dilepaskan dari sejarah pendidikan dalam tradisi Islam. Berdasarkan catatan sejarah peradaban Islam, disebutkan bahwa Islam di kawasan Timur Tengah pada akhir abad VIII M, tepatnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid yang berpusat di kota Baghdad (789-809 M).

Pada masa itu, peradaban Islam telah mewujudkan menjadi suatu peradaban yang jauh lebih maju dari Eropa Barat. Kemajuan yang diperoleh umat Islam saat itu meliputi hasil kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni, dan pemikiran yang terbukti telah mewarnai kebudayaan dunia ketika itu. Salah satu kemajuan yang patut

dibanggakan adalah adanya pendirian madrasah sebagai institusi pendidikan Islam, yang memiliki kontribusi besar dalam melahirkan kaum cendekiawan, negarawan, dan administrator. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada saat itu banyak intelektual muslim bermunculan.¹ Begitulah hingga kemudian tradisi madrasah menyebar ke seluruh wilayah di mana muslim berdomisili. Kemudian bertransformasi menjadi berbagai bentuk lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Di Indonesia, sejarah perkembangan dan keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam pada abad pertengahan hingga abad XXI tidak banyak mengalami perubahan. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam, khususnya di Nusantara tumbuh dan berakar dari budaya masyarakat lokal. Keberadaan lembaga pendidikan Islam tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh dinamika dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dapat dimaklumi jika ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa madrasah di Indonesia tumbuh dan berkembang dari bawah ke atas (*bottom-up*).

Kondisi demikian sebenarnya sangat menguntungkan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Keterikatan dan keterkaitannya dengan masyarakat membuat lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti pendidikan diniyah jarang mati atau bubar, bahkan tetap eksis di era modern. Keberadaannya sejalan dengan perkembangan masyarakat setempat walaupun dinamikanya stagnansi.

Berdasarkan pada sejarahnya yang telah diulas, lembaga pendidikan keagamaan Islam telah banyak memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan pembangunan sumber daya insani di Indonesia. Sangat disayangkan jika masih ada sebagian birokrat dan pejabat pemerintah, khususnya pemerintah daerah memandang lembaga pendidikan Islam seperti madrasah sebagai lembaga pendidikan *second class*. Sehingga pemerintah daerah kurang perhatian terhadap lembaga pendidikan Islam, baik

¹ M. Habib Husnial Pardi, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, ed. Suwito dan Fauzan (Jakarta: Prenada Media, 2005), 209.

dalam hal bantuan dana, ketenagaan dan pembangunan fisik, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Misalnya saja yang terjadi di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Ada anggaran dana untuk rehab bangunan lembaga pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di wilayah kabupaten tersebut. Ternyata hanya 2 buah MI yang mendapat dana bantuan rehab, sedangkan SD mendapatkan bantuan jauh lebih banyak yaitu sebanyak 8 buah SD. Padahal, jumlah lembaga pendidikan Islam di daerah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum.² Argumen tersebut bukan tanpa alasan atau tanpa dasar yang jelas. Melainkan diketahui dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua MDC Kalimantan Selatan periode 2008-2012. Di masa depan, semoga kasus seperti ini tidak ada lagi. Kita berbaik sangka, mungkin saja hal itu terjadi karena minimnya pengetahuan pihak terkait atas kondisi di wilayah tersebut. Maka, selanjutnya agar lebih peka terhadap kebutuhan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia sehingga bantuan-bantuan dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap pihak.

B. Aturan Terkait Pendidikan Diniyah

Ada banyak aturan yang menaungi penyelenggaraan pendidikan diniyah. Oleh karena itu, menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai *second class*, sama sekali tidaklah bijak. Faktanya, pendidikan diniyah memiliki posisi yang sama dengan pendidikan umum.

Pada awalnya, perhatian pemerintah terhadap eksistensi lembaga pendidikan keagamaan secara formal diwujudkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 1964 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Peraturan ini berisi tentang pengertian, fungsi dan tujuan, serta penjenjangan madrasah diniyah. Peraturan ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1983 tentang Kurikulum Pendidikan Keagamaan, yang mengatur tentang kurikulum madrasah diniyah (kurikulum

² Drs. H. Barkatullah Amin, M.Ag, Bantuan Dana Rehab, 18 Januari 2014.

pendidikan diniyah). Terakhir, disempurnakan lagi dengan lahirnya kurikulum madrasah diniyah (kurikulum pendidikan diniyah) tingkat wustha tahun 1994.

Satu hal yang cukup menggembirakan bagi transformasi pendidikan Islam di zaman orde reformasi adalah hasil amendemen ke-4 pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, juga diundangkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan dilanjutkan dengan lahir dan berlakunya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP. RI) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa "Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal." Ini bermakna bahwa baik jalur formal, nonformal, dan informal mendapat kedudukan yang sama dan diakui oleh negara.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kaagamaan Islam pasal 3, menyebutkan bahwa "Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas: (a) Pesantren dan (b) Pendidikan diniyah." Ini menunjukkan bahwa pola penyelenggaraan pendidikan diniyah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di masyarakat. Ada yang berupa pesantren, dan ada pula yang berupa madrasah pendidikan diniyah. Karena pada dasarnya lembaga pendidikan Islam tumbuh dan berkembang di masyarakat dan kehadirannya merupakan jawaban atau respon atas kebutuhan mereka.

Lembaga pendidikan keagamaan Islam merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam baik secara *sorogan* maupun klasikal, yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada peserta didik yang merasa kurang memperoleh pelajaran agama Islam di sekolahnya. Dalam PMA No. 13 Tahun 2014 Bab I Pasal ayat 1 menyebutkan: "Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.” Keberadaan lembaga pendidikan ini sangat menjamur di masyarakat karena merupakan sebuah kebutuhan pendidikan.

Dengan demikian, eksistensi lembaga pendidikan keagamaan Islam semakin diakui sebagai bagian dalam Sistem Pendidikan Nasional, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan diniyah. Maka, pendidikan keagamaan Islam bukanlah lembaga pendidikan inferior. Menganggapnya sebagai *second class*, justru membuktikan kesempitan wawasan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Tak kalah pentingnya adalah bahwa perhatian pemerintah melalui peraturan dan undang-undang tersebut semestinya harus disambut dengan baik oleh segenap pihak terkait. Payung hukum harus dimanfaatkan untuk memperkuat eksistensi lembaga pendidikan keagamaan Islam dan peningkatan kualitas. Salah satunya dengan senantiasa melakukan pembaharuan atau revisi kurikulumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Adapun terkait dengan level pendidikan diniyah terdiri atas beberapa jenjang. Tingkat *wustha* atau disebut juga *muthawassitah*. Selain disebut dengan *muthawassitah*, ada juga yang menggunakan penyebutan *tsanawiyah*. Ada yang menamakan lembaga pendidikannya madrasah tsanawiyah (Mts), yang berarti setara dengan tingkat *wustha* atau *mustawassitah* atau sederajat lainnya yang masa belajarnya adalah selama 3 tahun.

C. Karakter Pendidikan Diniyah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah

Lembaga pendidikan diniyah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, sebagaimana telah disinggung sedikit di awal. Pendidikan diniyah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang terpadu. Keduanya saling memberikan manfaat.

Di satu sisi masyarakat berfungsi dan berperan dalam memberikan dukungan baik berupa material maupun finansial dan ide-ide agar lembaga pendidikan keagamaan tetap eksis dan perlahan berkembang. Di lain pihak, lembaga pendidikan keagamaan Islam harus mampu memenuhi apa saja kebutuhan masyarakat itu sendiri. Baik dalam upaya mencerdaskan masyarakat maupun kajian-kajian keislaman, dan mampu mengimbangi dinamika masyarakat setempat.³

Keberadaan sebuah lembaga pendidikan keagamaan Islam tidak lepas dari peran tokoh-tokoh agama, cendekiawan muslim, dan masyarakat setempat. Mereka mempunyai cita-cita mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlebih di wilayah yang belum memiliki lembaga pendidikan. Maka, kehadiran sebuah lembaga pendidikan keagamaan di tengah-tengah masyarakat diterima dan disambut dengan baik oleh warga setempat. Masyarakat akan bahu-membahu dalam menjaga eksistensi dan keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik atau buruk, maju atau mundurnya lembaga pendidikan keagamaan Islam sangat tergantung juga kepada partisipasi masyarakat dan dinamika yang berlangsung di masyarakat tersebut. Dengan kata lain, terdapat korelasi atau hubungan keterkaitan antara masyarakat dengan lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Dari banyak referensi terkait dengan sejarah pendidikan Islam, nampak bahwa pendidikan Islam pada awalnya terkesan sebagai pendidikan yang tradisional, dan jauh dari sentuhan-sentuhan kemajuan atau modernisasi. Hingga akhirnya dibuat berbagai regulasi pemerintah yang mengesankan lembaga pendidikan keagamaan tersingkirkan dan terkadang membuat merasa terakomodasi dalam sistem pendidikan nasional.

Keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam dalam sistem pendidikan nasional merupakan wujud dari kesadaran

³ Pardi, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, ed. Suwito dan Fauzan, 210.

keberagamaan umat Islam terhadap pentingnya mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki kompetensi dan pemahaman agama yang lebih baik. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa perkembangan lembaga pendidikan keagamaan Islam tergantung dari dukungan dan perhatian umat Islam atau masyarakat Islam dalam menjaga dan memelihara eksistensi dan keberlangsungan lembaga pendidikan Islam. Karena cikal bakal keberadaan lembaga pendidikan Islam adalah masyarakat itu sendiri.

Lembaga pendidikan keagamaan Islam banyak terdapat di pedesaan dan berada di tengah-tengah masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Kenyataan ini banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan ada juga lokasinya yang berada jauh dari pemukiman. Seakan mengisolasi diri dari keramaian.

Kondisi tersebut secara kasat mata memunculkan persepsi pada sebagian masyarakat, bahwa pendidikan keagamaan identik dengan pendidikan yang kelas dua (*second class*) yang hanya diperuntukan bagi kalangan warga pedesaan yang berekonomi rendah pula. Persepsi tersebut, ketika itu melahirkan asumsi bahwa pengelolaan pendidikan diniyah diselenggarakan seadanya.⁴

Selain itu, asumsi-asumsi terhadap pendidikan ini juga dikuatkan oleh adanya kondisi pendidikan Islam yang kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah di masa itu. Sehingga pelayanan pendidikan di lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya seakan termarginalkan daripada sekolah-sekolah atau pendidikan umum yang dikelola secara langsung atau dinaungi oleh pemerintah.

Untuk membahas korelasi dan partisipasi masyarakat atas penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu definisi masyarakat secara rinci. Sehingga dapat menghindarkan dari kekeliruan persepsi.

⁴ A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, 1 ed. (Bandung: Mizan, 1998), 74.

Istilah masyarakat telah didefinisikan oleh banyak para ahli. Misalnya, Hasan Shadily mendefinisikan "Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain."⁵

Selanjutnya, Hamalik mendefinisikan masyarakat sebagai "Suatu sistem atau totalitas, yang di dalamnya terdapat berbagai subsistem yang berjenjang secara struktural, mulai dari subsistem kepercayaan, subsistem nilai atau norma-norma, subsistem kebutuhan, dan subsistem permintaan."⁶

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan orang yang memiliki norma atau nilai yang dapat mempengaruhi lembaga pendidikan yang dikelolanya. Inilah mengapa di atas disebutkan bahwa masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan Islam memiliki hubungan keterkaitan. Terlebih lembaga ini diinisiasi oleh masyarakat sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berawal dari subsistem kepercayaan tersebut, umat atau masyarakat muslim menemukan nilai berupa pahala dan melahirkan kebutuhan untuk melestarikan budaya dan kehidupan, selanjutnya melahirkan permintaan akan adanya pendidikan yang terorganisir. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dengan lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan keagamaan Islam tidak dapat dipisahkan, baik masyarakat maupun lembaga pendidikannya. Karena kedua belah pihak memperoleh manfaat masing-masing atas interaksi keduanya. Realita ini dapat disebut sebagai hubungan simbiosis mutualisme.

Kesimpulan atas korelasi ini adalah bahwa lembaga pendidikan keagamaan Islam hadir atas prakarsa dan swadaya masyarakat. Sehingga hidup dan matinya lembaga pendidikan maupun maju

⁵ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1993), 315.

⁶ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 4 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 74.

dan mundurnya tergantung kepada dukungan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam tidak dapat dipisahkan dari peran serta dan keberadaan masyarakatnya.

Berkaitan dengan *parental choice of education*, A. Malik Fadjar menyatakan:

Masyarakat akhir-akhir ini terjadi adanya pergeseran pandangan terhadap pendidikan seiring dengan tuntutan masyarakat (*social demand*) yang berkembang dalam skala yang lebih makro. Kini masyarakat melihat terhadap perolehan pengetahuan dan keterampilan atau lebih kepada pandangan pragmatisme.⁷

Pandangan masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan keagamaan lambat laun mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan tingkat kesadaran masyarakat akan peran dan urgensi lembaga pendidikan keagamaan. Perubahan ini terbukti dengan adanya kecenderungan masyarakat perkotaan untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pondok pesantren. Kenyataan ini menjadi angin segar dan berdampak positif terhadap eksistensi dan kelangsungan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan keagamaan Islam dan sesuai dengan konsep manajemen modern, dirasa perlu untuk merevitalisasi hubungan lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini sangat urgen, karena lembaga pendidikan Islam memerlukan asistensi dan dukungan (*support*) masyarakat dalam menyusun program (kurikulum) yang relevan dengan masyarakat dan dapat mengimplementasikannya. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan kontribusi lembaga pendidikan untuk mendapatkan program-program pendidikan yang ditawarkan. Hubungan semacam ini dapat terlaksana jika pihak pengelola lembaga pendidikan Islam dapat menjalin hubungan (relasi) kepada masyarakat secara aktif dan kreatif yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

⁷ Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, 76.

E. Mulyasa mengemukakan hubungan lembaga pendidikan keagamaan Islam dan masyarakat adalah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kemajuan madrasah,
2. Mengevaluasi kurikulum dan program pendidikan di madrasah,
3. Memupuk kerja sama antara orang tua santri dengan pihak madrasah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan santri,
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan madrasah terutama memelihara akidah dalam era globalisasi dan informasi saat ini,
5. Membangun dan meningkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pengelolaan dan program madrasah,
6. Menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan dan program madrasah, dan
7. Mengerahkan *support* dan bantuan bagi peningkatan program madrasah secara keseluruhan.⁸

Apabila terjalin hubungan yang harmonis di antara pengelola lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan masyarakat, maka akan sangat besar manfaat yang mungkin bisa diperoleh oleh kedua belah pihak. Bagi lembaga pendidikan keagamaan Islam, manfaat yang dapat dirasakan adalah pembinaan dan dukungan berupa dukungan moral, material dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar dan sebagai sumber inspirasi.

Sementara itu bagi manfaat yang dapat diperoleh masyarakat adalah mendapatkan kontribusi yang positif dari kegiatan atau program pendidikan, dan berbagai inovasi yang dihasilkannya, memberikan masukan dan penilaian konstruktif terhadap program (kurikulum) yang ditawarkan lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu, hubungan masyarakat dan pihak lembaga pendidikan keagamaan pada hakikatnya merupakan sarana yang paling efektif dan bermanfaat dalam membina pengembangan pertumbuhan

⁸ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Bimarga Islam Depag. RI, 2005), 12.

dan meningkatkan *output* lulusan pendidikan Islam. Oleh karena itu, perlu menjaga dan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang harmonis antara pihak lembaga pendidikan keagamaan dan masyarakat maupun sebaliknya agar dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program di lembaga pendidikan keagamaan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas dengan sendirinya dapat mengangkat citra lembaga pendidikan keagamaan.

BAB III

CORAK KURIKULUM PENDIDIKAN KEAGAMAAN (DINIYAH)

A. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah

Pendidikan diniyah atau lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia mempunyai beberapa pola atau tipe penyelenggaraan. Masing-masing lembaga memiliki ciri khusus yang membedakannya dari lembaga yang lain. Ciri-ciri yang membedakan antar lembaga pendidikan keagamaan atau pendidikan diniyah ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti sejarah atau latar belakang pendirian yayasan/lembaga, kondisi sosio-kultural masyarakat, tingkat kebutuhan masyarakat atas pendidikan agama, dan juga kondisi ekonomi dari masyarakat sekitar.¹

Jika dikategorisasikan, pada dasarnya pendidikan diniyah atau lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia mempunyai beberapa pola atau tipe penyelenggaraan. Secara umum terdapat lima (5) pola atau tipe, yaitu:

1. Madrasah Diniyah *Suplement (Takmiliah)*;
2. Madrasah Diniyah Independen;
3. Madrasah Diniyah Komplementer;
4. Madrasah Diniyah di pondok pesantren; dan
5. Madrasah Diniyah Sistem Paket.²

Perlu diketahui bahwa tidak semua pola atau tipe tersebut terdapat di kabupaten atau kota-kota di Indonesia. Malik Fadjar pernah mengutarakan bahwa di berbagai daerah di Indonesia, pola

¹ Mal'an Abdullah, "Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Diniyah" (Jakarta: Puslitbang Penda dan Keagamaan Balitbang Depag, 2003), 3.

² Agus Maimun, "Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah" (Malang: UIN Malang, 2006), 2.

madrasah diniyah yang paling banyak ditemukan adalah madrasah diniyah suplemen dan madrasah diniyah di pondok pesantren.³

Lembaga pendidikan keagamaan Islam dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum pendidikan diniyah. Lembaga ini berperan melengkapi dan memperluas wawasan pendidikan agama bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah-sekolah umum (SD, SMP atau SMA) atau madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs) kurikulum negeri (Kurikulum Kemenag RI) pada pagi sampai siang hari. Selanjutnya pada sore harinya mereka mengikuti pembelajaran kurikulum diniyah di lembaga pendidikan keagamaan tertentu.

B. Kitab atau Referensi yang Diajarkan Pada Pendidikan Diniyah

Lazim diketahui bahwa *kitab kuning* sebagai kitab keislaman berbahasa Arab telah menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pondok pesantren dan juga pendidikan diniyah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Kitab kuning sebagai materi kurikulum utama dalam proses pembelajaran pada lembaga pendidikan diniyah di pondok pesantren sering disebut *al-kutub al-qadîmah*, *al-kutub al-shafrâ* atau "kitab kuning" karena biasanya kitab-kitab itu dicetak di atas kertas berwarna kuning, sesuai dengan kertas yang tersedia pada waktu itu. Ciri lain dari literatur yang dipergunakan di pesantren ialah beraksara Arab gundul (huruf Arab tanpa *harakat* dan *syaka*). *Al-kutub al-qadîmah* itu jumlahnya sangat banyak yang dimiliki para kyai.

Seakan sudah menjadi tradisi bahwa kitab-kitab yang diajarkan di pesantren (lembaga pendidikan keagamaan) di Indonesia adalah kitab-kitab yang umumnya merupakan karya dari ulama-ulama bermadzhab Syafi'i (*Syâfi'iyyah*). Judul kitab-kitab kuning yang

³ Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, 29.

beredar di kalangan kyai di pesantren-pesantren Jawa dan Madura jumlahnya mencapai 900 judul.⁴

Di Kalimantan Selatan sendiri, biasanya di lembaga pendidikan keagamaan Islam menggunakan kitab-kitab klasik sebagai kurikulum. Materi disampaikan kepada santri berdasarkan urutan atau *sequence* yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Ustadz dan ustadzah dalam menyampaikan materi bahan ajar hanya tinggal mengikuti urutan yang ada di dalam kitab tersebut, sedangkan *scope*-nya atau ruang lingkungannya disesuaikan dengan waktu dan tingkatan/level santrinya.

Secara nasional, kitab-kitab kuning yang dipakai pada lembaga pendidikan keagamaan di pondok pesantren hampir sama. Karena biasanya antarlembaga saling mencontoh. Jika diklasifikasikan menurut materi (disiplin/cabang ilmu), maka kajian ilmunya dikelompokkan menjadi sembilan (9) disiplin ilmu, yaitu:

1. Bidang Aqidah/Tauhid, menggunakan *Aqâ'idul Awâm*;
2. Bidang Tajwid (Baca al-Qur'an), menggunakan *Syifâ'ul Jinân*;
3. Bidang Bahasa Arab, menggunakan *Mutammimah al-Jurûmîyah* dan *Amtsilah at-Tashrîfiyyah*;
4. Bidang Fiqih, menggunakan *Mabâdi'ul Fiqhiyyah* dan *Fiqh al-Wâdhih*;
5. Ushul Fiqih, menggunakan *Waraqât*;
6. Bidang Tafsir dan Bidang Ulumul Qur'an, menggunakan *Tafsîr Jalâlain*;
7. Bidang Hadits dan Bidang Ulumul Hadits, menggunakan *Mutun an-Nawâwîyah*; dan
8. Bidang Tarikh, menggunakan *Nûrul Yaqîn*.⁵

Kitab-kitab tersebut di atas, kebanyakan digunakan di lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan kurikulum

⁴ Departemen Agama, *Pola Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2001), 17.

⁵ *Ibid.*, 17-30.

pendidikan diniyah. Namun, sangat terbuka kemungkinan jika masing-masing tingkat kelas dan jenjang pendidikan menggunakan kitab-kitab yang berbeda atau bertingkat disesuaikan dengan kelas dan jenjang pendidikan di lembaga pendidikan masing-masing.

C. Tradisi Pendidikan Diniyah

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa penggunaan kitab kuning dalam pembelajaran di lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan pendidikan diniyah menjadi lazim. Namun, kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan keagamaan umumnya masih mengadopsi pengertian kurikulum secara sempit atau tradisional. Yakni berupa sejumlah mata pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam, yang bersifat subjek akademis.

Beberapa mata pelajaran tersebut merupakan isi kurikulum yang diberikan kepada para santri, sesuai dengan urutan pada kitab atau buku tertentu. Oleh karena itu, sangat jarang ada ustadz/ustadzah yang mengorganisasikan bahan pelajaran berdasarkan (mempertimbangkan) pada kebutuhan santri. Padahal pada lembaga pendidikan keagamaan dalam pendidikan era modern sekarang ini perlu memiliki kurikulum yang terorganisir dan tertulis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan keagamaan. Hal tersebut demi memudahkan dan mengarahkan pada ketercapaian tujuan kurikulum di lembaga pendidikan keagamaan itu sendiri.

Sesuai dengan tujuan keberadaan lembaga pendidikan keagamaan, yaitu: dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, sangat tepat untuk mengembangkan kurikulum diniyah yang berasal dari masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Emroni bahwa dalam rangka memberdayakan lembaga pendidikan keagamaan, maka perlu melibatkan pihak pondok dan sejumlah *stakeholders*, dan masyarakat di sekitar lembaga tersebut.⁶

⁶Emroni, "Perberdayaan Pondok Pesantren Sullamul 'Ulum Syekh Arsyad al-Banjari

Mempertimbangkan kenyataan ini, maka pengembangan kurikulum diniyah dengan pendekatan *grassroots* (akar rumput) dianggap penulis sebagai alternatif yang tepat. Kesimpulan penulis ini bukan tanpa alasan. Sebagai kasus, misalnya pondok pesantren yang berada di Banjarmasin yang menyelenggarakan pendidikan diniyah, seperti Pondok Pesantren (PP) Al-Istiqamah Banjarmasin. Di lembaga ini ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penyusunan kurikulum pendidikan diniyah umumnya menggunakan atau menerapkan literatur atau kitab-kitab klasik tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yayasan atau pendiri lembaga pendidikan keagamaan sebagai isi kurikulum (*content*). Penetapan kitab-kitab yang dijadikan sebagai isi kurikulum adalah berdasarkan pada rapat guru, dengan pertimbangan ketersediaan guru-guru.

Kitab-kitab tersebut diajarkan kepada santri berdasar pada ruang lingkup (*scope*) dan urutan penyajiannya (*sequence*) sebagaimana yang tersaji berurutan dalam kitab tersebut. Selain itu juga disesuaikan dengan tingkatan/level santri di lembaga pendidikan.

Di samping itu, pola penyusunan kurikulum didasarkan pada kajian atau hasil studi banding ke beberapa lembaga pendidikan keagamaan yang dianggap baik. Kemudian ustadz/ustadzah dan pengelola hanya meniru dan mengadopsi kurikulum tersebut untuk diterapkan di lembaga pendidikannya.

Jika hanya berdasarkan pola ini, maka isi (*content*) kurikulum yang ada menjadi kurang relevan dengan visi dan misi madrasah itu sendiri, kebutuhan santri, harapan orang tua, dan masyarakat sebagai *the user* dari *output*-nya.

2. Penggunaan metode pembelajaran dan manajemen kepemimpinan.

Seringkali metode pembelajaran yang digunakan di lembaga pendidikan keagamaan Islam adalah metode pembelajaran

Dalam Pagar Martapura Kabupaten Banjar (Penelitian Partisipatif)," *Tashwir* 1 (2013): 56.

yang konvensional atau pembelajaran yang hanya menerapkan komunikasi satu arah. Penerapan metode konservatif ini kadang-kadang tidak memperhatikan minat dan aktivitas santri. Sedangkan manajemen pendidikannya dilaksanakan dengan pengelolaan tradisional (*one hand management*), kepemimpinan sering berdasarkan turun-temurun dan senioritas, bukan berdasarkan kompetensi dan kapabilitas seseorang.

3. Bidang keuangan yang dikelola secara tradisional.

Lembaga pendidikan diniyah umumnya menghadapi kendala keuangan yang hanya mengandalkan donatur dan santunan dari orang tua santri. Ini menunjukkan lembaganya belum dikelola secara profesional dengan membuat jaringan (*network*) dalam mencari sumber dana dari berbagai pihak.

Menyaksikan 3 hal yang dikemukakan di atas, menguatkan isu mendesaknya untuk dilakukan perancangan kurikulum yang relevan dengan konteks kekinian di lembaga pendidikan diniyah sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih berkesan dan menjawab kebutuhan umat.

D. Kendala Pendidikan Diniyah dalam Berinovasi

Keberadaan dan perkembangan lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia bukan tanpa masalah. Termasuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum pendidikan diniyah juga tidak luput dari berbagai permasalahan. Di antara masalah yang dihadapi oleh pendidikan diniyah adalah penyusunan dan pelaksanaan kurikulum, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, penggunaan metode pembelajaran, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen, kepemimpinan dan supervisi, dan sumber keuangan. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada subbab terdahulu. Ini menjadi masalah dan kendala jamak di lembaga penyelenggara pendidikan diniyah.

Mirisnya, kendala-kendala tersebut justru menjadi citra tidak baik bagi lembaga pendidikan keagamaan Islam, khususnya

madrasah. Sebagaimana yang dideskripsikan oleh Muhran Juhri, bahwa di antara kondisi yang menjadikan citra madrasah kurang baik disebabkan oleh pengelolaan manajemen seadanya, pendidik atau pengajar yang belum memenuhi standar minimal, ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas, dan rendahnya honor untuk pendidik dan karyawan.⁷

Lembaga penyelenggara pendidikan diniyah, umumnya melaksanakan pendidikan seadanya. Asal terus berjalan. Asal pembelajaran dapat berlangsung. Tidak dipungkiri bahwa ini terjadi juga dikarenakan minimnya sarana dan prasarana. Sehingga berakibat juga dengan penerimaan pengajar dan honor mereka yang terbilang rendah.

Nampaknya, sebagian besar lembaga pendidikan keagamaan Islam merasakan hal yang demikian. Jika terlena dengan kondisi ini, maka pada akhirnya lembaga pendidikan keagamaan Islam mengalami stagnansi, "hidup segan, matipun tak mau". Proses pendidikan terselenggara seadanya, tidak kuat motivasi untuk berkompetisi sehingga sulit untuk menjadi lembaga pendidikan keagamaan Islam yang unggul.

⁷ Muhran Juhri, "Meningkatkan Citra Madrasah Swasta," *Fikrah* 1 (2002): 91.

BAB IV

TEORI DAN KONSEP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Seperti yang telah diulas di bab sebelumnya, kurikulum secara sederhana dapat dipahami sebagai program pendidikan atau program belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Kurikulum berisi 4 komponen yang saling terkait, yaitu komponen tujuan, komponen materi/isi, komponen proses belajar dan mengajar, dan komponen evaluasi. Maka dalam usaha pengembangan kurikulum, sangat urgen untuk merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi kurikulum, standar proses pembelajaran, dan standar evaluasi pembelajaran.

Maka, diperlukan pembahasan yang komprehensif terkait dengan teori dan konsep pengembangan kurikulum. Hal ini dikarenakan upaya pengembangan kurikulum bukanlah sekadar mengubah mata pelajaran dan susunannya. Melainkan diperlukan kajian dan pertimbangan yang matang sebelumnya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna.

A. Pengertian Pengembangan Kurikulum

Berdasarkan istilah, kata pengembangan berasal dari sebuah kata ber-Bahasa Inggris, yaitu *development* yang artinya "*the act of developing or process of being developed*."² Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata pengembangan yang berarti "proses, cara, perbuatan mengembangkan, atau pengembangan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki."³

¹ Ladjid, *Pengembangan Kurikulum*, 24.

² Randolph Quirk, "Longman Dictionary of Contemporary English (New Edition)" (London: Richard Clay Ltd. Bungay, Suffolk, 1987), 260.

³ Pusat Bahasa Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 538.

Soetopo dan Soemanto mengemukakan bahwa istilah “pengembangan” menunjuk pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara baru, di mana selama kegiatan tersebut berlangsung, maka penilaian dan penyempurnaan terus-menerus dilakukan.”⁴ Di kehidupan nyata banyak hasil pengembangan yang dapat dijumpai, seperti: modernisasi alat masak, alat pembersih, dan alat komunikasi.

Pengertian pengembangan kurikulum mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendesain kurikulum baru atau mendesain kembali (*redesign*) kurikulum agar tetap sesuai dengan situasi dan kondisi (*up to date*).
2. Melakukan implementasi terbatas (uji coba) atas kurikulum yang baru, di sekolah/madrasah tertentu, yang diikuti dengan penilaian yang intensif.
3. Merevisi dan menyempurnakan terhadap komponen tertentu dalam kurikulum berdasarkan hasil penilaian pada poin 2 di atas.⁵

Oemar Hamalik mengutip pendapat Audrey Nichols dan S. Howard Nichols mengemukakan definisi pengembangan kurikulum (*curriculum development*) adalah: “*the planning of the learning opportunities intended to bring about certain desired in pupils, and assesment of the extent to which these changes have taken place*”.⁶

Jika sebuah kurikulum baru sudah dianggap cukup mantap atau sempurna, maka tugas pengembangan kurikulum berakhir dan melahirkan kurikulum baru. Selanjutnya, kurikulum tersebut didiseminasi atau disebar-luaskan, kemudian diterapkan ke sekolah atau madrasah secara masif dengan batas waktu tertentu, sambil melakukan pembinaan kurikulum. Tahap inilah yang disebut dengan

⁴ Soetopo dan Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, 45.

⁵ *Ibid.*, 46.

⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 4 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 96.

pembinaan kurikulum. Jadi, istilah pengembangan kurikulum berasal dari *curriculum development* yang berarti peralihan total atau substansial mengenai beberapa komponen yang terdapat dalam sebuah kurikulum.

Pengembangan kurikulum tidak dapat dipisahkan dari beberapa aspek yang turut mempengaruhinya. Di antara aspek tersebut adalah *mindset*, sistem nilai, proses pengembangan itu sendiri termasuk kebutuhan peserta didik, masyarakat pemakai lulusan (*the user*), dan masyarakat umum.⁷ Aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum.

Sementara itu, "model pengembangan kurikulum merupakan satu alternatif prosedur dalam rangka mendesain (*designing*), menerapkan (*implementation*), dan mengevaluasi (*evaluation*)".⁸ Oleh karena itulah kurikulum harus bersifat dinamis dan selalu berkembang, sehingga terjadilah pembaharuan (*inovasi*) dalam sebuah kurikulum. Pembaharuan tersebut mengharuskan para pengembang kurikulum (*curriculum designer and curriculum worker*) untuk berupaya menyahtuti berbagai tuntutan dan perubahan yang terjadi. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kurikulum agar tetap relevan dengan situasi dan kondisi yang ada.

B. Landasan dalam Pengembangan Kurikulum

Secara etimologi, landasan berarti "alas; bantalan; paron; dasar atau tumpuan."⁹ Dengan kata lain, landasan merupakan yang mendasari. Jika dikaitkan dengan landasan dalam pengembangan kurikulum, maka sederhananya dapat diartikan dengan hal-hal yang mendasari pengembangan kurikulum.

Istilah landasan dalam beberapa literatur kurikulum terkadang juga dikenal dengan istilah azas, dasar atau acuan. Ke semua istilah

⁷ Kementerian Dikbud, "Pedoman Penerapan dan Implementasi Kurikulum 2013" (Jakarta: Kementerian Dikbud, 2014).

⁸ Tim Pengembangan MKDP, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 78.

⁹ Pusat Bahasa Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 633.

tersebut, baik azas, dasar, acuan ataupun landasan, semuanya bermakna hal-hal yang mendasari atau yang menjadi fondasi dalam pengembangan kurikulum. Dengan kata lain, landasan dalam pengembangan kurikulum adalah yang menjadi fondasi dalam mengonstruksi sebuah kurikulum.

Sebuah kurikulum yang memiliki fondasi dengan memenuhi standar dan persyaratan, maka berdampak pada kurikulum yang dikembangkan. Kurikulum yang demikian menjadi kokoh sehingga ketika diimplementasikan di sekolah atau madrasah dapat mencapai target yang diinginkan, diterima masyarakat dan bertahan lama karena relevansinya.

Muhammad Ali mengemukakan bahwa pemilihan landasan dalam pengembangan kurikulum tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tolok ukur sebagai berikut:

1. Kurikulum harus mengacu kepada kebenaran dan kebaikan masyarakat,
2. Pengalaman belajar harus relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (*needs of society*),
3. Isi atau konten kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK),
4. Proses pembelajaran (*teaching-learning process*) harus berpedoman pada teori-teori psikologi belajar dan psikologi perkembangan.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, maka setidaknya ada empat landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) landasan yang berkaitan dengan kebenaran (filosofis); (2) landasan yang berkaitan dengan masyarakat (sosiologi); (3) landasan yang berkaitan dengan IPTEK; dan (4) landasan psikologi belajar dan psikologi perkembangan.

Sedikit berbeda, Nana Sudjana mengemukakan ada tiga landasan pengembangan kurikulum, yaitu: (1) landasan filosofis;

¹⁰ Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, 2 ed. (Bandung: Sinar Baru, 1992), 31.

(2) landasan sosial budaya; dan (3) landasan psikologis.¹¹ Namun, S. Nasution mengemukakan ada empat dasar dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) dasar filosofis; (2) dasar psikologis; (3) dasar sosiologis; dan (4) dasar organisatoris.¹²

Lebih detail terkait dengan landasan dalam pengembangan kurikulum, di bawah ini penulis menyajikan sebanyak enam landasan yang dinilai relevan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, yaitu:

1. Landasan Filosofis

Filsafat secara harfiah berasal dari kata *philein* (cinta) dan *sophia* (kebijaksanaan).¹³ Filsafat juga diartikan sebagai cinta pada kebijaksanaan (*love of wisdom*).¹⁴ Hal ini dikarenakan karakter dari filsafat sendiri adalah untuk menemukan kebenaran akan sesuatu. Filsafat berusaha untuk menjawab keraguan, keingintahuan atau kecurigaan.

Berdasarkan pada karakternya itulah maka ilmu filsafat disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Diawali dari aktivitas berfilsafat, maka kemudian muncul berbagai disiplin ilmu sebagai turunannya. Selanjutnya dikenal dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan.

Oleh karena itulah, ilmu pendidikan (dalam hal ini kurikulum) tidak dapat dilepaskan dari ilmu filsafat. Karena berkaitan dengan hal-hal umum di masyarakat, seperti norma/ nilai (*value*) yang eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena pendidikan pada dasarnya harus bersifat normatif yang dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh lembaga pendidikan dan masyarakatnya sendiri. Sistem nilai tersebut

¹¹ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, 1988), 56.

¹² Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, 67-72.

¹³ Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, 88.

¹⁴ Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 23.

akan mewarnai dan mempengaruhi terhadap tujuan dan isi (*content*) kurikulum yang dikembangkan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa program pendidikan di Indonesia mengemban misi yaitu membina warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercantum pada sila pertama Pancasila. Sedangkan Pancasila adalah sebagai pandangan hidup, falsafah bangsa sekaligus sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Maka, landasan filosofis sebagai salah satu yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum memiliki beberapa sumber yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan landasan dalam mengembangkan kurikulum di Indonesia. Landasan-landasan tersebut adalah:

a. Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber tertinggi dalam perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya dalam membuat regulasi harus merujuk pada Pancasila. Misalnya: Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Indonesia harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

b. Falsafah pendidikan

Falsafah pendidikan di Indonesia sebenarnya juga mengikut pada pedoman universal yang berlaku secara internasional, yaitu empat pilar pendidikan yang direkomendasikan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) tahun 1994. Keempat pilar pendidikan tersebut yaitu:

- 1) Belajar mengetahui (*learning to know*). Maksudnya adalah proses pembelajaran untuk mengetahui, memahami, dan menghayati apa saja yang dipelajari.
- 2) Belajar melakukan (*learning to do*). Yaitu belajar yang tidak cukup sekadar mengetahui dan memahami, tetapi

ilmu pengetahuan harus diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Belajar hidup membaaur/toleransi (*learning to live together*). Maksud dari istilah ini adalah bahwa proses pembelajaran juga bertujuan untuk hidup toleran, tenggang rasa, gotong royong, saling membantu, dan hidup bersama-sama secara rukun dan damai.
- 4) Belajar untuk menjadi diri sendiri (*learning to be*). Maksudnya adalah bahwa dalam pembelajaran, peserta didik harus dapat menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sehingga dapat menemukan jati dirinya sendiri dan dapat menghargainya.¹⁵

Keempat pilar pendidikan di atas juga sangat sesuai (relevan) dengan konsep pendidikan Islam. Oleh karena itu, keempat pilar tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan kurikulum pendidikan diniyah di lembaga pendidikan keagamaan.

c. Falsafah lembaga pendidikan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia memiliki jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan ada yang berupa formal dan nonformal. Sedangkan jenjang pendidikan ada dari level dasar sampai kepada jenjang pendidikan tinggi. Adapun jenis pendidikan terdiri dari jenis pendidikan umum, keagamaan, kedinasan, kejuruan, akademik, profesi, dan pendidikan luar biasa. Setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki ciri khas dan nilai-nilai tertentu yang dijadikan sebagai pandangan hidup (filsafat lembaga pendidikan).

Terkait dengan falsafah pendidikan ini, lembaga pendidikan keagamaan merupakan salah satu subsistem

¹⁵ Mastuki, *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren Suatu Konsep Pengembangan Mutu Madrasah* (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Depag. RI, 2004), 30-31.

pendidikan nasional yang berada pada jalur formal dan nonformal yang memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri. Selain itu, lembaga pendidikan keagamaan juga memiliki filosofi khas yang menjadikan lembaga pendidikan ini berbeda dengan lembaga pendidikan lain pada umumnya.

Lembaga pendidikan ini memiliki tradisi, budaya atau kultur santri yang hidup sederhana dan bersahaja. Setidaknya karakter ini yang nampak pada santri pada umumnya. Landasan ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pengembang kurikulum (*curriculum designer*), agar kurikulum yang dihasilkan tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan landasan filosofis tersebut.

2. Landasan Sosiologis

Aspek sosiologis berperan penting dalam upaya mendesain kurikulum sekolah/madrasah yang berorientasi pada masyarakat. Sebuah kurikulum pada dasarnya dapat mengakomodasi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pihak pengembang kurikulum sekolah/madrasah diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai hambatan dan problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan sudut pandang sosiologis, sistem pendidikan dan institusi pendidikan yang ada di dalamnya mempunyai fungsi untuk kepentingan masyarakat. S. Nasution mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dalam mengembangkan kurikulum sekolah sebagai berikut:

- a. Mengadakan revisi bahkan perombakan sosial;
- b. Mempertahankan kebebasan akademis dan kebebasan melaksanakan penelitian ilmiah;
- c. Mendukung dan turut memberikan kontribusi kepada pembangunan;
- d. Menyampaikan kebudayaan dan nilai-nilai tradisional dan mempertahankan *status quo*;

- e. Mengeksploitasi orang banyak demi kesejahteraan golongan elite;
- f. Mewujudkan revolusi sosial untuk melenyapkan pengaruh pemerintahan terdahulu;
- g. Mendukung kelompok-kelompok tertentu, antara lain kelompok militer, industri atau politik;
- h. Menyebarluaskan falsafah, politik atau kepercayaan tertentu;
- i. Membimbing dan mendisiplin jalan pikiran generasi muda;
- j. Mendorong dan mempercepat laju kemajuan pengetahuan dan teknologi;
- k. Mendidik generasi muda agar menjadi warga negara nasional dan warga dunia;
- l. Mengajarkan keterampilan pokok, misalnya membaca, menulis, dan berhitung; dan
- m. Memberikan keterampilan dasar bertalian dengan mata pencaharian.¹⁶

Berdasarkan hal-hal di atas, pihak perancang kurikulum (*curriculum designers*) harus melaksanakan peran dan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud adalah meliputi: (1) mempelajari kebutuhan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, dan peraturan pemerintah lainnya; (2) Mempelajari keadaan masyarakat di mana sekolah berada; (3) menganalisis kebutuhan dan standar terhadap dunia kerja; dan (4) menginterpretasikan kebutuhan individu dalam lingkup kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁷

Beranjak dari peran dan tanggung jawab tersebut, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus diseleksi dan dipilah supaya dapat membuat keputusan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab para perancang dan pengembang kurikulum sangat

¹⁶ S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Blna Aksara, 2010), 23-24.

¹⁷ Sudirman N, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 174.

kompleks. Apa pun yang ditawarkan oleh madrasah dalam isi kurikulumnya diharapkan relevan dan kontekstual dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

3. Landasan Psikologis

Landasan psikologis ini berbeda dengan 2 landasan sebelumnya, yakni landasan filosofis dan landasan sosiologis yang mengarah pada tujuan akhir (*the end-product*). Sementara itu, landasan psikologis ini diharapkan dapat membantu bagi pengembang kurikulum agar realistis dalam memilih tujuan yang sesuai dengan aspek kejiwaan peserta didik.

Seleksi dan pemilahan pengalaman belajar (*learning experiences*) harus relevan dengan aspek psikologi. Hal ini secara umum sangat membantu dalam mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah, seperti teori-teori belajar, teori-teori kognitif, perkembangan mental anak, dinamika kelompok, dan perbedaan kemampuan individual anak. Hal-hal tersebut sangat relevan dalam merencanakan pengalaman pembelajaran (*learning experiences*) peserta didik.

Teori-teori psikologi mengenai belajar, seperti psikologi daya, teori *mental state* dengan motto "*knowledge is power*", psikologi behaviorisme, teori koneksionisme (*the law of exercise, the law of effect, and the law of readiness*), dan psikologi gestalt¹⁸ harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengorganisasi kurikulum di sekolah/madrasah. Teori-teori tersebut, secara eksplisit dapat memberikan petunjuk yang tepat, praktis, efisien, dan efektif dalam dunia pendidikan. Terutama untuk kemajuan belajar peserta didik.

Berkaitan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum sekolah, ada dua disiplin ilmu yang menopang landasan ini. Kedua disiplin ilmu tersebut adalah psikologi belajar dan psikologi anak.

¹⁸ Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 107-8.

a. Psikologi Belajar

Psikologi belajar berkaitan dengan tentang bagaimana proses belajar itu berlangsung dalam diri peserta didik. Teori belajar sangat berpengaruh dalam penyusunan dan penyajian kurikulum secara efisien dan efektif. Psikologi belajar turut menentukan pemilihan bahan pembelajaran yang harus disajikan dalam sebuah kurikulum.

b. Psikologi Anak

Anak adalah manusia kecil yang unik untuk dipelajari dalam konteks proses pembelajaran. Anak tidak saja memiliki unsur jasmani/biologis, tetapi juga unsur memiliki rohani/jiwa/mental yang merupakan bagian integral dalam diri seorang peserta didik. Pendidikan berupaya menghantarkan peserta didik kepada perkembangan kedewasaan yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak.

Berdasarkan teori psikologi anak, terkait tentang bagaimana seorang anak (peserta didik) dapat belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya, diperlukan beberapa tahapan kegiatan. Yaitu:

- 1) Menyeleksi dan organisasi bahan pelajaran yang menjadi isi kurikulum;
- 2) Memilah dan menentukan kegiatan belajar anak yang relevan dan serasi dengan perkembangan individu anak;
- 3) Merencanakan dan merancang situasi dan kondisi belajar anak agar diperoleh hasil belajar yang optimal;
- 4) Menyeleksi metode, teknik, dan strategi yang tepat sesuai dengan tingkat kematangan belajar peserta didik;
- 5) Merancang dan menetapkan prosedur dan teknik evaluasi yang relevan dengan perkembangan jiwa peserta didik.¹⁹

¹⁹ Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, 57.

4. Landasan Organisatoris

Materi pelajaran yang menjadi isi kurikulum adalah sangat penting diorganisasikan sesuai dengan *scope*, *sequence*, dan jenjang sekolah di mana materi disajikan. Sebagai salah satu komponen kurikulum, materi/bahan pelajaran perlu diorganisasi dengan baik sebelum menjadi isi kurikulum yang disajikan dalam kurikulum sekolah/madrasah. Menurut S. Nasution "Pengorganisasian bahan dapat berdasarkan tema/topik, kronologis, konsep, isu, problematika, logika, dan proses disiplin."²⁰

Pengorganisasian bahan pelajaran yang dipilih harus memenuhi kaidah dalam penyajian materi sesuai dengan jenis *sequence*-nya, misalnya penyajian bahan pelajaran dimulai dari materi yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkret kepada yang abstrak, dan dari ranah (domain) tingkat rendah kepada tingkat yang lebih tinggi mencakup semua domain (*cognitive*, *affective*, dan *psychomotoric*).

Dalam konteks pendidikan Islam, isi kurikulum hendaknya mengacu kepada ranah *ta'lim*, *ta'dib*, *tazkiyah* dan *tarbiyah wa al-mahârah*. Pengorganisasian bahan terkait langsung dengan jenis-jenis organisasi bahan. Seperti:

- a. Jenis kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah (*separated subject-curriculum*). Jenis ini disebut juga dengan *nazhariyyah al-furû'*. Kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah (*separated subject curriculum*) adalah kurikulum yang terdapat pada lembaga pendidikan agama dan keagamaan Islam (PAKIS).
- b. Jenis kurikulum yang dihubung-hubungkan (*correlated curriculum*). Organisasi kurikulum berkorelasi (*correlated curriculum*) diberlakukan di madrasah/sekolah yang berciri khas agama Islam. Seperti mata pelajaran al-Qur'an Hadits, Ibadah Syari'ah, dan Aqidah Akhlak.

²⁰ Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, 46.

- c. Kurikulum satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah (*broad field/all in one system* atau *nazhariyyah al-wahdah*). Kurikulum terpadu disajikan dalam bentuk unit atau tema, seperti Kurikulum Tahun 2013 di tingkat SD/MI. Organisasi kurikulum *broad field*, seperti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terdapat di sekolah umum, di SD, SMP, dan SMA.

Selain empat landasan tersebut, Soetopo dan Soemanto menambahkan lagi dua landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan historis dan landasan saintifik (IPTEK).²¹ Penjelasan terangkum di bawah ini.

5. Landasan Historis

Sesuai dengan sejarah perkembangan suatu bangsa, maka faktor sejarah (historis) sedikit banyaknya akan mempengaruhi perkembangan kurikulum yang ada. Misalnya saja di Indonesia. Sewaktu rezim Orde Lama dan sebelumnya, mata pelajaran agama bukanlah sebagai mata pelajaran yang wajib di lembaga sekolah. Setelah terjadi G30S/PKI dan organisasi Nasional Agama Komunis (NASAKOM) diiringi dengan berbagai akibat-akibatnya, barulah mata pelajaran agama diwajibkan di semua jenjang dan jenis pendidikan. Tidak dibenarkan jika perolehan nilai mata pelajaran agama di bawah 6 atau 60. Jika nilainya dibawah 6 atau 60, maka siswa tidak dapat naik kelas atau lulus, meskipun semua mata pelajaran lainnya memperoleh nilai yang baik.

6. Landasan IPTEK (*Scientific Foundation*)

Sains dan teknologi selalu berkembang, dan perkembangannya terkadang lebih cepat daripada antisipasi kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum harus bersifat visioner, yakni mampu menjangkau kemajuan sains dan teknologi 10 hingga 20 tahun ke depan. Salah satu ciri kurikulum yang baik adalah kurikulum

²¹ Soetopo dan Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, 47.

yang mampu mengantisipasi ke masa depan (*anticipatory*), yakni kurikulum dapat memprediksi apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang.

Seorang *curriculum designer* dituntut untuk mempelajari semua landasan tersebut, supaya kurikulum yang dikembangkan mempunyai fondasi yang kokoh dan dapat diterima oleh masyarakat. Sesuai dengan ideologi Pancasila, relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, relevan dengan perkembangan IPTEK, dan lain-lain. Sehingga kurikulum sekolah yang dihasilkan benar-benar dapat mencapai tujuan yang maksimal sesuai dengan amanat perundang-undangan dan harapan banyak pihak.

C. Model Pengembangan Kurikulum

Model dapat diartikan sebagai suatu pola, bentuk atau organisasi dalam merancang sesuatu baik berupa bangunan, *fashion*, maupun alat. Jika istilah model ini dikaitkan pengembangan kurikulum, maka model merupakan suatu prosedur dalam merancang, mengimplementasi sampai kepada penilaian dan menindak lanjuti hasil rancangan sebuah kurikulum.

Sebenarnya ada banyak model pengembangan yang ditawarkan oleh para ahli. Perlu dipahami bahwa setiap model kurikulum mempunyai kelemahan di samping ada kelebihanannya masing-masing. Semua tergantung bagaimana para pengembang kurikulum (*curriculum developers*) mempertimbangkan untuk menggunakannya.

Syaifuddin Sabda merangkumnya menjadi 9 model, yaitu:

1. *The Administrative (Line-Staff) Model*
2. *The Grass-Roots Model*
3. *The Demonstration Model*
4. *Taba's Inverted Model*
5. *Beauchamps Model*

6. *Rogers Interpersonal Relation Models*
7. *Miller and Seller Model*
8. *Gagne (Transmission) Model*
9. *Peter F. Oliva Model*.²²

Pada kesempatan ini, penulis hanya akan membahas 5 model. Karena kelima ini berkaitan dengan uji coba pengembangan kurikulum yang pernah dilakukan oleh penulis. Kelima model tersebut adalah:

1. *The Administrative Model,*
2. *The Grassroots Model,*
3. *Beauchamp Model,*
4. *The Demonstration Model, dan*
5. *Taba's Inverted Model.*

Lebih detail terkait kelima model ini adalah berikut,

1. *The Administrative Model*

Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dengan adanya ide atau gagasan dari struktur organisasi yang tertinggi kemudian berlanjut ke tingkat bawah secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi birokrasi dalam suatu negara. Pengembangan kurikulum bermula dari wewenang administrator seperti direktur atau kepala kantor wilayah satu daerah yang membentuk panitia pengarah pengembangan kurikulum yang di dalamnya terdapat berbagai pakar (ahli pendidikan, ahli berbagai disiplin ilmu, penguasa, dan *stakeholders*). Tugas panitia pengarah berupaya merancang konsep dasar, azas-azas, dan hal-hal yang urgen yang berkaitan dengan perancangan kurikulum sekolah/madrasah.

Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam atas hal yang fundamental dari pengembangan kurikulum, maka selanjutnya panitia pengarah membentuk panitia kerja atau semacam

²² Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis*, 219-44.

steering committee/team work yang terdiri dari berbagai ahli dalam bidang disiplin ilmu tertentu termasuk praktisi pendidikan seperti guru dan tenaga pendidik lainnya yang dianggap cukup berpengalaman.

Model administratif ini disebut juga *top-down* atau *line staff model*. Implementasinya tidak selalu segera berjalan dengan lancar, sebab menuntut berbagai kesiapan dari pelaksanaannya. Terutama kesiapan dari para guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum pada tingkat operasional di kelas. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya kegiatan yang bersifat sosialisasi, orientasi, penataran, seminar, dan workshop merupakan suatu keharusan.

2. *The Grassroots Model*

Pada model ini mekanisme dan prosedur pengembangan kurikulum merupakan kebalikan dari *Administrative Model* yang berorientasi *top-down*. Sementara *Grassroots Model* adalah pengembangan kurikulum dimulai dari tingkat yang paling bawah yakni seorang guru atau sekelompok guru (akar rumput), sehingga dapat dikatakan model ini adalah model *bottom-up*.

Oleh karena itu, model ini dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum jika pendekatan sistem pendidikannya menganut sistem desentralisasi. Artinya memberikan kewenangan pada tingkat yang paling bawah. Mereka yang berada di tingkat yang paling bawah ini secara otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri.

Dalam penerapannya, biasanya kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga menyesuaikan kurikulum dengan kondisi dan situasi mereka. Artinya kurikulum dirancang dan diterapkan sesuai dengan yang mereka butuhkan.

3. *Beauchamp Model*

Model yang satu ini dikembangkan oleh seorang ahli kurikulum yang bernama George A. Beauchamp. Penamaan model pengembangan kurikulum ini sesuai dengan namanya sendiri.

Beauchamp mengemukakan lima langkah dalam penerapan model tersebut, yaitu:

- a. Menetapkan lingkup wilayah atau area yang dicakup oleh kurikulum tersebut,
- b. Menetapkan anggota personalia yang terlibat dalam upaya pengembangan kurikulum,
- c. Menetapkan organisasi dan prosedur dalam pengembangan kurikulum,
- d. Melaksanakan implementasi kurikulum, dan
- e. Melaksanakan evaluasi dan dilanjutkan revisi dan penyempurnakan desain kurikulum.²³

Langkah-langkah tersebut, merupakan bagian integral yang harus dijalankan dalam menggunakan model tersebut. Melalui langkah tersebut diharapkan hasil kurikulum yang sudah dikembangkan nantinya sesuai dengan prosedur pengembangan yang dikehendaki dan dapat bermanfaat jika diterapkan di lembaga pendidikan secara masif.

4. *The Demonstration Model*

Model demonstrasi ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan *Grassroots Model*. Model ini juga memiliki pola seperti *Grassroots Model*, di mana ide pengembangan kurikulum muncul dari guru atau sekelompok guru yang tidak puas dengan hasil kurikulum selama ini.

Umumnya, model ini dilakukan dalam skala (*scope*) kecil. Selanjutnya, model ini dipakai dalam ruang lingkup (skala) yang lebih besar atau lebih luas. Menurut sebagian ahli, dalam

²³ Sukmadinata, *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*, 180-82.

prosesnya tidak jarang adanya hambatan, tantangan, dan ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu.

Menurut Sukmadinata terdapat beberapa kebaikan model demonstrasi ini dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

- a. Kurikulum didesain dalam situasi yang nyata, sehingga aspek yang ada dalam kurikulum yang dihasilkan bersifat lebih praktis,
- b. Inovasi dan penyempurnaan kurikulum dalam skala kecil, maka kemungkinan resistensi atau penolakan dari administrator juga relatif lebih kecil, jika dibandingkan dengan perubahan dalam scope yang lebih besar,
- c. Kemungkinan besar dapat menembus kendala yang sering dihadapi oleh guru jika tidak memiliki dokumen kurikulum tertulis,
- d. Dikarenakan oleh sifatnya akar rumput (*grassroots*), sehingga memberikan kesempatan kepada guru dalam mengambil inisiatif dan inovatif yang dapat menjadi pendorong bagi para administrator untuk mengembangkan program pembelajaran baru.²⁴

Meski telah dipaparkan berbagai kebaikan model kurikulum ini, namun bukan berarti model ini tidak mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahan model ini menurut Syaifuddin Sabda adalah "lebih pada implementasi dan diseminasi produk yang dihasilkan untuk bisa diterima dalam skala yang lebih luas."²⁵ Terkadang ditemukan adanya guru-guru yang enggan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, atau dengan kata lain guru-guru tersebut memilih menjadi apatis, tidak ada keinginan untuk melakukan inovasi kurikulum. Inilah yang menjadi kelemahan dari model ini.

²⁴ *Ibid.*, 182-83.

²⁵ Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis*, 227.

5. *Taba's Inverted Model*

Model Taba ini dikatakan model terbalik (*inverted model*). Disebut demikian karena model ini berupaya mengembangkan kurikulum dengan teknik induktif berbeda dengan Tyler model tradisional yang menggunakan secara deduktif.

Teknik induktif yang dipelopori Taba adalah dalam mengembangkan kurikulum mulai dari *needs assessment* atau dari kondisi nyata di lapangan. Sementara teknik induktif adalah pengembangan kurikulum berangkat dari asumsi, hipotesis dan komitmen-komitmen dasar yang berdasarkan pada teori literatur.

Menurut Taba kelemahan pengembangan kurikulum deduktif adalah (1) cenderung mereduksi lahirnya inovasi kreatif; (2) perencanaan kurikulum yang nampaknya tepat terkadang dalam implementasinya tidak terpenuhi; dan (3) kurikulum yang dihasilkan cenderung sangat umum, abstrak, dan formula pembelajaran yang baku.²⁶

Berdasarkan ini, maka guru dituntut untuk kreatif dan aktif dalam pengembangan kurikulum sekolah/madrasah. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum ini merupakan salah satu karakteristik dalam model pengembangan kurikulum versi Taba.

Ada lima langkah pengembangan kurikulum model Taba, yaitu:

- a. Menghasilkan unit-unit percobaan (*pilot unit*) melalui langkah-langkah berikut:
 - 1) Mendiagnosis kebutuhan;
 - 2) Merumuskan tujuan-tujuan khusus;
 - 3) Memilih isi dan mengorganisasi isi;
 - 4) Memilih dan mengorganisasi pengalaman belajar;

²⁶ Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice*, 441.

- 5) Mengevaluasi; dan
 - 6) Melihat sekuens (*sequence*) dan keseimbangan.
- b. Menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menemukan validitas dan kelayakan penggunaannya,
 - c. Mengadakan revisi dan konsolidasi unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba,
 - d. Mengembangkan seluruh kerangka kurikulum,
 - e. Implementasi dan diseminasi kurikulum yang telah teruji.²⁷

Setelah mencermati langkah-langkah model Taba dalam pengembangan kurikulum di atas, maka dipahami bahwa secara umum model ini mempunyai banyak kemiripan dengan *Grassroots Model*. Kemiripannya adalah bahwa pengembangan kurikulum dimulai dengan melakukan *needs assessment*, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kebutuhan peserta didik. Tahap selanjutnya setelah kedua hal itu adalah merumuskan tujuan-tujuan yang lebih khusus, menentukan dan mengorganisasi *content* kurikulum, mendesain dan menetapkan pengalaman belajar, dan menetapkan standar evaluasi, sampai kepada uji coba dan diseminasi.

D. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Prinsip dapat dimaknai sebagai pandangan hidup (*way of life*), kriteria atau rambu-rambu yang mesti diindahkan. Dalam konteks pengembangan kurikulum ini, prinsip diartikan sebagai kriteria atau aturan main (*rule of the games*). Maksudnya adalah sebagai pedoman dan ketentuan yang mesti dipertimbangkan oleh *curriculum designer* dalam mendesain dan merancang kurikulum sekolah/madrasah. Fuaduddin dan Karya menamakan prinsip dengan istilah kriteria.

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum mengemban amanah agar kurikulum yang dirancang dan yang dihasilkan diharapkan

²⁷ *Ibid.*, 12.

relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (*the needs of society*). Dengan kata lain, kurikulum yang dihasilkan pada akhirnya mampu merangkul kebutuhan, keinginan dan harapan semua pihak yang terkait, yakni peserta didik, wali/orang tua siswa, masyarakat umum, pemakai lulusan, bangsa dan yang paling urgen adalah bagaimana misi kurikulum dapat meninggikan agama Allah (*li i'lâi kalimâtillâh*).

S. Nasution, Soetopo, dan Soemanto mengemukakan ada empat prinsip untuk pengembangan kurikulum. Ahli lain, Tyler mengemukakan tiga kriteria, yaitu berkelanjutan (*continuity*), berurutan (*sequence*), dan keterpaduan (*integration*). Selanjutnya, menurut Sudirman dkk ada sepuluh prinsip pengembangan kurikulum. Sementara itu, Subandijah mengemukakan enam prinsip yang senada dengan pendapat Abdullah Idi.

Atas adanya keragaman pendapat para ahli, penulis hanya menjabarkan 1 pendapat untuk menengahi semuanya. Prinsip yang disajikan dalam pembahasan ini ada enam, di mana semua prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Keenam prinsip tersebut adalah: 1) prinsip relevansi, 2) prinsip efektivitas dan efisiensi, 3) prinsip kontinuitas atau kesinambungan, 4) prinsip keluwesan (*flexibility*), 5) prinsip berorientasi pada tujuan, dan 6) prinsip pendidikan seumur hidup (*long life education*). Penjelasannya adalah sebagai berikut,

1. Prinsip Relevansi

Kata relevansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *relevant* atau *relevance*. Menurut kamus *Oxford Advanced Dictionary of Current English* kata *relevant* berarti "*closely connected with sth, appropriate in the circumstances.*"²⁸

Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka prinsip relevansi artinya adalah bahwa harus ada penyelarasan antara program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat (*the needs of society*). Pendidikan dapat dinyatakan relevan atau sesuai

²⁸ Hornby, *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, 987.

apabila *output* atau hasil yang didapat oleh peserta didik bermanfaat bagi kehidupannya dalam konteks dunia nyata dan kondisi kekinian.

Terkait dengan prinsip relevansi dalam pendidikan, Soetopo dan Soemanto mengemukakan tiga relevansi. Ketiga relevansi yang dimaksud mereka yaitu (1) relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup; (2) relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang; dan (3) relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan.²⁹

Sementara Subandijah mengungkapkan prinsip relevansi terbagi ke dalam empat relevansi, sebagai berikut:³⁰

- a. Relevansi program pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik.

Relevansi ini adalah upaya untuk menghubungkan program pembelajaran dengan lingkungan hidup peserta didik. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching-learning/ CTL*).

- b. Relevansi program pendidikan dengan kehidupan kekinian dan kehidupan yang akan datang.

Isi kurikulum yang disajikan pada generasi sekarang seyogyanya berguna, terutama bagi dirinya sendiri dalam menghadapi problem kehidupan masa kini dan di masa yang akan datang yang sudah tentu tantangannya jauh lebih berat dari generasi sebelumnya. Menurut penulis, kurikulum harus mampu menjangkau jauh ke masa depan (*visioner*), kurikulum juga harus dapat memprediksi (*anticipatory*) apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Relevansi ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad Saw.:

²⁹ Soetopo dan Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, 49-50.

³⁰ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, 49-50.

عن ابن عمر عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. (رواه النسائي)

Dari Ibnu Umar, dari ayahnya, berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: "Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah dan menunggang kuda." (HR. An-Nasâi)

Dari hadits ini kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah Saw adalah seorang visioner. Rasulullah Saw mampu meramalkan bahwa Islam menyebar jauh sampai ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah Saw memberikan sinyal akan urgensi memberikan pendidikan berenang yang pada saat itu belum dirasakan manfaatnya. Bahkan kala itu, di tanah Hijaz tidak ada sungai yang dapat digunakan untuk berenang.

- c. Relevansi program pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Di era perkembangan informasi dan globalisasi saat ini, ditambah lagi dengan adanya pasar bebas Asia atau yang dikenal Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), menyebabkan terjadinya persaingan dan pasar kerja yang kompetitif di berbagai negara. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi dan berstandar.

Bila sebuah negara memiliki SDM dengan keterampilan kerja yang rendah, maka warga negaranya akan tersisih dari kompetisi global. Buruknya adalah jika hanya menjadi penonton dan pengangguran di negerinya sendiri. Permasalahan ini perlu diantisipasi dengan menyusun kurikulum yang relevan dengan tuntutan dunia kerja, terutama lembaga-lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Artinya, institusi pendidikan harus mampu menjawab tantangan di masa depan dengan membekali peserta didiknya berbagai keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Untuk

itulah kurikulum perlu dilakukan pengembangan dengan berpedoman pada prinsip relevansi program pendidikan dengan tuntutan dunia kerja.

- d. Relevansi program pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Kecanggihan IPTEK dewasa ini berkembang dengan sangat pesat, hampir di seluruh bidang kehidupan. Termasuk juga perkembangannya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, menurut penulis pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dan bahkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³¹

Pada dasarnya prinsip relevansi ini sudah dimuat dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1984. Kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 1994 dan juga pada kurikulum 1999, yaitu program pendidikan yang menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja. Selanjutnya dimaksimalkan lagi pada kurikulum Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2006 dan kurikulum terakhir yakni Kurikulum Tahun 2013 dengan pendekatan pembelajaran kontekstual (CTL).

Artinya, terkait dengan relevansi ini, kurikulum sekolah di Indonesia sudah menyesuaikan relevansi program pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Karena IPTEK terus berkembang, maka berarti kurikulum harus senantiasa berproses untuk disesuaikan dengan relevansinya atas kemajuan/kecanggihan IPTEK.

³¹ Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Teori dan Praktek*, 48-49.

2. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Pembahasan terkait ini dilakukan dengan terpisah. Yaitu 1) prinsip efektivitas dan 2) prinsip efisiensi. Penjelasan, sebagaimana yang terangkum di bawah ini,

a. Prinsip efektivitas

Prinsip efektivitas dalam kurikulum adalah sejauhmana target atau sasaran program pendidikan dapat dicapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.³² Sebagai contoh, guru telah merencanakan 6 sasaran atau indikator yang ingin dicapai. Lalu setelahnya dilaksanakan kegiatan pembelajaran dari 6 target tersebut. Namun ternyata 3 indikator saja yang dapat dicapai. Maka, ini berarti bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut belum efektif. Dengan kata lain pembelajarannya belum memenuhi prinsip efektivitas.

Prinsip efektivitas dapat dikelompokkan kepada 2 (dua), yakni:

1) Prinsip efektivitas mengajar

Prinsip ini berhubungan dengan program pembelajaran yang direncanakan dan diimplementasikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Ini berkaitan dengan efektivitas perencanaan pembelajaran, seperti silabus dan RPP, pemilihan pendekatan, metode, dan penggunaan media sebagai alat bantu pembelajaran.

2) Prinsip efektivitas belajar

Setiap peserta didik memiliki tipe dan gaya serta tingkat intelegensi yang beragam. Sehingga kemampuannya dalam memperoleh hasil pembelajaran juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu, bagaimana program pendidikan dapat memberikan layanan yang adil dan tepat terhadap perbedaan tersebut menjadi

³² Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, 65.

sangat penting. Agar nantinya kegiatan belajar dapat memperoleh hasil maksimal.

Prinsip efektivitas dalam perkembangan kurikulum selalu berkaitan dengan prinsip efisiensi. Sebab kita tidak ingin program pembelajaran berjalan efektif, sementara cara dan penggunaan sumber daya lainnya tidak efisien. Atau dengan kata lain adanya pemborosan dalam program yang mestinya dihindari.

b. Prinsip Efisiensi

Kata efisien secara etimologi berarti "... dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya."³³ Ini bermakna bahwa efisiensi adalah kondisi menggunakan waktu, tenaga, dan biaya untuk sesuatu secara tepat.

Prinsip efisiensi seringkali dikaitkan dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan modal yang kecil (sedikit) yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan yang besar (banyak). Artinya, dalam prinsip ekonomi, keuntungan yang sebesar-besarnya diupayakan untuk didapat kendati hanya bermodal minimalis.

Pada konteks pendidikan, yaitu pengembangan dan implementasi kurikulum, prinsip efisiensi ini adalah upaya untuk menggunakan sumber dana dan sumber daya pendidikan lainnya yang sehemat mungkin. Optimalisasi segenap unsur sangat diutamakan dalam hal ini. Pelaksanaan kurikulum sekolah dapat dikatakan memenuhi prinsip efisiensi, apabila penggunaan biaya, waktu, sumber daya manusia (tenaga) dan fasilitas dapat dilakukan dengan sehemat mungkin dan hasilnya optimal atau maksimal.

Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum harus mencari cara bagaimana mengupayakan pelaksanaan kurikulum agar dapat berjalan secara efisien dan mencapai tujuan

³³ Pusat Bahasa Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 284.

pembelajaran secara efektif. Sehingga kurikulum sebagai program pendidikan dapat dikatakan telah memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi. Perhatian oleh semua pihak khususnya bagi pengembang dan pelaksana kurikulum sekolah/madrasah sangat urgen dalam hal ini.

3. Prinsip Kontinuitas atau Kesenambungan

Prinsip ini dalam pengembangan kurikulum memperlihatkan adanya saling keterkaitan antara tingkat pendidikan dan mata pelajaran atau bidang studi. Terdapat dua aspek prinsip kesinambungan, yaitu kontinuitas dan kesinambungan.

a. Kontinuitas antara berbagai tingkat sekolah/madrasah

Kontinuitas adalah berkelanjutan. Dalam hal ini, materi pelajaran yang telah disajikan di kelas rendah atau tingkat sekolah rendah harus berkaitan dan berkelanjutan di tingkat kelas atau sekolah yang ada di atasnya.

Sebagai contoh dalam kurikulum PAI di sekolah umum. Sewaktu di SD, siswa telah belajar tentang shalat wajib. Maka ketika di SMP, ia akan diberikan lagi materi tentang shalat sunnah, shalat berjamaah, shalat dua hari raya dan lain-lain. Yakni tidak harus mengulang materi yang persis sama. Aspek kontinuitasnya adalah pada tema shalat.

b. Kesenambungan antara berbagai bidang studi

Kesenambungan artinya adalah keterkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam hal ini, kesinambungan antara berbagai mata pelajaran dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya.

Contohnya adalah dalam kurikulum PAI pada mata pelajaran Fiqih dengan materi bahasan shalat. Seharusnya pada mata pelajaran Tauhid/Aqidah-Akhlak sudah disajikan tentang materi bahasan rukun iman yakni iman kepada Allah SWT. Begitu juga pada mata pelajaran al-Quran

tentang hapalan surah al-Fatihah dan surah-surah pendek memang harus sudah disajikan sebelumnya. Dengan demikian, terdapat korelasi dan hubungan yang erat antara bidang studi Fiqih, Tauhid, Akhlak dan al-Quran Hadits. Maka antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan menunjang. Inilah yang dimaksud dengan kesinambungan.

Kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah dan antarbidang studi berarti bahwa kurikulum harus disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Materi pelajaran yang diperlukan sekolah yang lebih tinggi harus sudah disajikan di sekolah sebelumnya;
- 2) Materi pelajaran yang sudah diberikan di sekolah yang lebih rendah tidak perlu disajikan pada sekolah yang lebih tinggi.
- 3) Pengembangan perlu dilakukan serempak dan bersama-sama, perlu ada komunikasi dan kerja sama antara para pengembang kurikulum.³⁴

Dengan demikian harus ada kesinambungan materi kurikulum, baik antartingkat pendidikan ataupun yang menjadi prasyarat terhadap materi pada bidang studi yang lain. Sehingga prinsip ini dapat berjalan dengan baik dan kesinambungan. Pembelajaran suatu materi pun dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik karena didukung oleh pemahaman dan kemahirannya atas materi yang telah diajarkan sebelumnya.

4. Prinsip Keluwesan (*Flexibility*)

Luwes atau fleksibel berarti tidak kaku, lentur atau elastis. Sebagai contoh benda yang fleksibel adalah karet dan per. Karet dan per bersifat lentur dan elastis sehingga dapat ditarik atau diulur oleh pengguna, sesuai dengan manfaat yang diinginkan. Sedangkan prinsip keluwesan (*flexibility*) dalam pengembangan kurikulum adalah bahwa kurikulum tidak kaku.

³⁴ Zaini, *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*, 111.

Artinya, ada sedikit ruang gerak yang diperuntukan bagi guru dalam berinovasi dan berkreasi. Sehingga guru mempunyai ide kreatif dalam mengembangkan kurikulum lebih operasional, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing guru. Bagaimanapun kondisi sekolah dan peserta didik tidaklah sama, sehingga keluwesan pengembangan kurikulum oleh guru sangat penting.

Prinsip keluwesan atau fleksibilitas dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan

Fleksibilitas yang berkaitan dengan ini adalah program pendidikan alternatif seperti jurusan pendidikan, program spesialis, dan kegiatan ekstra kurikuler. Ekstra kurikuler identik dengan pengembangan diri dalam kurikulum KBK Tahun 2004 dan KTSP Tahun 2006, yang dapat dipilih peserta didik. Dalam hal ini peserta didik dapat memilih program yang diinginkan, baik disesuaikan dengan minat dan bakatnya, maupun kebutuhan dan kondisi lingkungan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Nana Syaodih Sukmadinata yang menyatakan bahwa:

“Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dapat dibuka program pendidikan pilihan (jurusan), sehingga peserta didik diberi kesempatan (kebebasan) dalam memilih program pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kebutuhan, dan lingkungan.”³⁵

b. Fleksibilitas dalam pengembangan program pembelajaran

Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan pembelajaran, yaitu memberikan peluang atau kesempatan kepada guru untuk mengembangkan program-program pembelajaran (*teaching-learning program*). Peluang dan kesempatan ini adalah yang berkenaan dengan reorganisasi materi

³⁵ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, 151.

pelajaran, pemilihan pendekatan, metode, dan strategi yang tepat, dan lain-lain.

5. Prinsip Berorientasi Pada Tujuan

Pada umumnya, pengembangan kurikulum di Indonesia dimulai dari penyusunan komponen tujuan dari tujuan pendidikan. Ini jelas akan memudahkan dalam merancang komponen kurikulum yang lain, seperti komponen isi kurikulum, komponen proses, dan komponen evaluasi.

Subandijah menegaskan bahwa "prinsip yang berorientasi pada tujuan berarti sebelum bahan ditentukan maka langkah yang pertama dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu."³⁶ Artinya penentuan tujuan yang hendak dicapai menjadi hal penting sebelum memulai pembelajaran. Bagaimanapun, kurikulum yang baik adalah yang dapat menghantarkan pada tujuan dari penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Tujuan kurikulum harus memuat ranah kognitif (*ta'lim*), afektif (*tazkiyah*), dan ranah psikomotor (*tarbiyah al-mahârah*). Hal ini dilakukan agar semua aktivitas pembelajaran betul-betul terarah kepada tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan tujuan pembelajaran yang rinci dan jelas, diharapkan pendidik dapat memilih dan menetapkan pendekatan, metode, strategi, media pembelajaran, prosedur, dan teknik evaluasi yang akurat dan tepat.

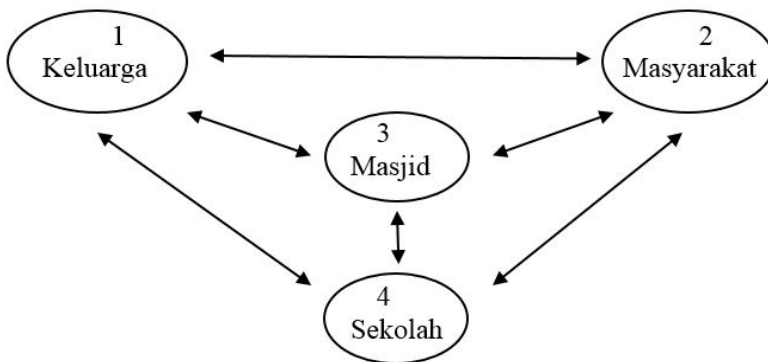
6. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup (*Long Life Education*)

Pendidikan sebenarnya berlangsung sepanjang masa (*thûl al-hayâh*). Demikianlah konteks ajaran Islam, bahwa pendidikan berlangsung jauh sebelum bayi dilahirkan, yakni saat memilih pasangan hidup suami atau isteri. Ini berkaitan dengan pertimbangan bibit, bebet dan bobot. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan *pra natal* dan *post natal*.

³⁶ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, 54.

Jika selama ini kita mengenal tri-pusat pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, namun dalam komunitas umat Islam masih perlu satu pusat pendidikan lagi, yaitu masjid, sehingga menjadi catur-pusat pendidikan. Dengan demikian catur-pusat pendidikan dalam Islam adalah jalur pendidikan formal, non-formal, informal, dan masjid.

Masjid sebagai pusat terpenting bagi pemberdayaan muslim dalam segala bidang. Jika diilustrasikan, maka korelasi antara pusat pendidikan di keluarga, sekolah, masyarakat dan masjid tersebut dapat dibuat sebagai berikut:³⁷



Gambar 2: Catur-Pusat Pendidikan Islam

Melalui empat pusat pendidikan Islam di atas, proses pendidikan menurut pandangan pendidikan Islam berlangsung sepanjang hayat (*thûl al-hayâh*). Dengan demikian, untuk membentuk *insân kâmil* tidak dapat dilakukan hanya pada pendidikan formal semata tetapi harus terintegrasi dengan pendidikan informal dan nonformal di masjid dan di masyarakat yang berlangsung sepanjang hayat (*long life education*).

³⁷ Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam (Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkoneksi)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 53-54

BAB V

URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEAGAMAAN (DINIYAH)

Sebagaimana telah dipaparkan di bagian sebelumnya, bahwa kondisi pendidikan diniyah cenderung stagnan, kita tidak cukup hanya mengkritisi. Perlu ada usaha untuk melakukan perbaikan oleh segenap pihak. Tidak terkecuali kajian atas kurikulumnya. Sehingga sumbangan ide tersebut dapat disampaikan dengan baik kepada pihak-pihak pengelola lembaga pendidikan keagamaan Islam (diniyah). Untuk itulah, buku ini hadir.

Penulis merasa perlu untuk mengulas tema revisi kurikulum pendidikan diniyah karena kurikulum merupakan salah satu unsur penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran sehingga efektif dan berkesan bagi peserta didik (santri).

A. Minimnya Pemahaman akan Konsep Kurikulum dan Manajemen

Sebenarnya telah ada kajian terkait dengan pendidikan diniyah. Misalnya yang pernah dilakukan oleh Syaifuddin Sabda dan kawan-kawan. Penelitian deskriptif kualitatif mereka dimuat dalam *Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan*.¹ Hasil temuan yang disebutkan adalah: bahwa perkembangan awal pondok pesantren tidak mengenal istilah kurikulum. Pembelajaran sepenuhnya berbentuk pengajian umum. Perkembangan selanjutnya, kurikulum pondok pesantren berorientasi pada penguasaan disiplin ilmu (kurikulum subjek akademis), yaitu disiplin ilmu agama Islam. Isi kurikulumnya tidak hanya berupa mata pelajaran agama Islam tetapi memasukkan materi pelajaran umum. Beberapa faktor yang

¹ Syaifuddin Sabda, *Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: LP2M IAIN Antasari, 2004).

mempengaruhi dinamika kurikulum tersebut adalah; (1) faktor perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang bergeser. Awalnya masyarakat hanya menginginkan hasil pendidikan berupa penguasaan (ahli) ilmu agama Islam, berubah menjadi hasil pendidikan yang dapat melanjutkan ke lembaga pendidikan umum dan atau bekerja kantor. Oleh karena itu, pesantren harus menyesuaikan kurikulumnya, (2) faktor kebijakan pimpinan pondok pesantren.

Agus Maimun dan kawan-kawan melalui *Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah (Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan)*,² menyebutkan temuan, berikut:

1. Sebagian besar kurikulum madrasah diniyah mengacu pada kurikulum pondok pesantren afiliasi dan juga kurikulum Kementerian Agama dengan melakukan modifikasi seperlunya. Modifikasi kurikulum seringkali dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat dan perkembangan serta kebutuhan siswa;
2. Ada tiga masalah utama yang kini dihadapi oleh madrasah diniyah. Masalah tersebut adalah: kekurangan dana, tingkat ekonomi dan pendidikan orang tua peserta didik (santri) yang relatif rendah, dan adanya kecenderungan madrasah diniyah menjadi "anak tiri" di masyarakat. "Pusat kekuasaan" di madrasah diniyah berada pada kepala madrasah atau *khâdim al-madrasah*, bukan pada kyai. Meskipun hampir semua madrasah diniyah telah mempunyai struktur kepengurusan yang lengkap, bahkan dari struktur itu juga telah dijabarkan tugas masing-masing pengurus melalui *job description* secara jelas dan operasional, tetapi banyak dari pengurus yang kurang fungsional. Sehingga seringkali persoalan madrasah lebih bertumpu pada *khâdim al-madrasah*;
3. Pada sistem pengajaran secara klasikal, para guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan. Sedangkan untuk pengajaran individual menggunakan

² Agus Maimun, *Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah (Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006).

sistem *sorongan* dalam bentuk hafalan (setoran hafalan). Setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran, para guru dalam selalu mengajak siswa untuk berdoa bersama atau melafalkan ayat-ayat tertentu dan syair. Biasanya doa yang dikumandangkan ketika memulai pembelajaran adalah membaca surat *al-Fâtiḥah* dan doa mencari ilmu. Sedang bacaan yang dilafalkan ketika mengakhiri pembelajaran adalah membaca *surah al-Ashr* dan *Syi'iran*.

4. Semua madrasah diniyah telah melaksanakan evaluasi pembelajaran, meskipun tidak setertib di sekolah/madrasah formal pada umumnya. Ini menunjukkan bahwa para guru madrasah diniyah sadar akan pentingnya pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Hal tersebut untuk mengetahui ketercapaian tujuan atau kompetensi yang telah ditentukan. Walaupun nantinya akan diketahui raihan prestasi yang berbeda-beda antara masing-masing individu. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan di madrasah diniyah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: evaluasi mingguan, evaluasi semesteran, dan evaluasi tahunan (*imtiḥân*).

B. Potensi Sekaligus Kelemahan Pendidikan Diniyah

Ada juga penelitian yang dihasilkan oleh Husnul Yaqin dan kawan-kawan. Jika Agus Maimun menjadikan Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan sebagai sampel kajian, maka Husnul Yaqin menjadikan Banjarmasin sebagai objeknya.

Kajian yang dilakukan Husnul Yaqin dan tim termuat dalam *Profil Madrasah Diniyah di Kota Banjarmasin*. Melalui itu, ia dan tim menyebutkan bahwa Lembaga ini merupakan suplemen bagi pendidikan anak-anak sekolah dalam bidang pendidikan agama. Walaupun berfungsi sebagai suplemen, lembaga ini tetap mempunyai visi dan misi yang jelas dan sejalan dengan tujuan didirikannya madrasah diniyah itu sendiri, yakni memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar pendidikan umum. Kurikulum yang digunakan pada

madrasah diniyah di Kota Banjarmasin pada umumnya dibuat oleh pihak madrasah itu sendiri dengan didasarkan kepada muatan kurikulum pesantren yang menjadi pengalaman pendiri atau pimpinan lembaga.

Ada juga Inna Muthmainnah yang menjadikan kajian mendalam atas kurikulum kitab kuning untuk disertasinya yang berjudul *Designing the Curriculum of Kitab Kuning (Arabic Script) at Pondok Pesantren Salfiyah in South Kalimantan*.³ Inna Muthmainnah mendapati sejumlah temuan, yaitu:

1. Tidak ditemukan kurikulum tertulis yang berisi tujuan pembelajaran, isi materi pelajaran, metode pembelajaran, dan asesmen dan penilaian di lembaga pendidikan Pondok Pesantren. Di lembaga-lembaga pendidikan ini, mereka memiliki visi dan misi yang dimaksud sebagai tujuan pendidikan.
2. Isi materi yang diajarkan selalu sama selama bertahun-tahun dan ditulis dalam kitab kuning.
3. Secara umum metode pembelajaran yang diaplikasikan adalah ceramah (*lecture*), yaitu guru (*ustadz*) membacakan kitab kuning, menerjemahkan, dan menjelaskannya. Sementara siswa (*santri*) membuat catatan, menghafal dan mendemonstrasikan isi materi pelajaran (*content of subject*).
4. Terkait dengan metode penilaian. Siswa hanya diminta untuk membacakan kitab kuning, menerjemahkan dan terakhir menjelaskannya.
5. Permasalahan yang ditemukan di pondok pesantren, yang dianggap sebagai hal mendesak sekaligus sebagai tantangan dalam pembinaan kurikulum (*improving the curriculum*) adalah hanya menekankan penguasaan atas isi/materi pelajaran (*content/subject matters*). Memang di satu sisi, penguasaan peserta didik (*santri*) terhadap materi kitab kitab kuning sangat

³ Inna Muthmainnah, "Designing the Curriculum of Kitab Kuning (Arabic Script) at Pondok Pesantren Salafiyah in South Kalimantan" (Universiti Utara Malaysia, 2014).

baik. Namun, pada saat yang sama, mereka kurang mampu untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari.

6. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren dan kualifikasi pendidikan para pengajarnya yang sebagian besar belum sarjana. Di samping tidak adanya supervisi atau pengawas yang melakukan pembinaan untuk para pengajar.

Kajian-kajian dan penelitian yang disebutkan di atas sangat menarik, hanya saja pembahasan detail terkait dengan pengembangan kurikulumnya belumlah memadai.

BAB VI

KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI LEMBAGA PENDIDIKAN DINIYAH

Menjadi maklum bahwa lembaga pendidikan keagamaan (diniyah) memiliki kedekatan emosional dengan masyarakatnya. Sebab sejak awal kemunculannya, pendidikan diniyah diinisiasi oleh masyarakat, dihadirkan untuk merespons kebutuhan masyarakat dan kemudian dikelola oleh masyarakat secara swadaya.

A. Potensi Pendidikan Diniyah dan Pertimbangan Landasan Sosiologis dalam Pengembangan Kurikulumnya

Pendidikan tidak dapat terlaksana tanpa kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berlandaskan kepada asas-asas pengembangan kurikulum. Salah satu landasannya yang sangat penting adalah landasan sosiologis.

Setiap masyarakat mempercayai adanya norma atau nilai (*value*) dalam sebuah adat istiadat (budaya) yang harus dipatuhi dan ditaati. Norma atau nilai tersebut memiliki corak nilai yang berbeda-beda. Selain itu, masing-masing komunitas juga memiliki latar belakang kebudayaan yang beragam pula. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan sebuah kurikulum. Dalam kondisi ini, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan perubahan tatanan masyarakat akibat perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Berdasarkan ini, maka masyarakat dijadikan salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai landasan sosiologis.

Secara konseptual, pendidikan yang berlandaskan pada masyarakat adalah "model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip: dari masyarakat oleh masyarakat, dan untuk

masyarakat".¹ Pada konteks ini, masyarakat dibutuhkan untuk peran serta aktif dalam pengembangan desain kurikulum di lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan keagamaan Islam (kurikulum pendidikan diniyah).

Pendidikan adalah proses menyiapkan generasi agar menjadi warga negara yang diharapkan, juga merupakan proses sosialisasi. Berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah proses inkulturasi budaya. Diharapkan melalui pendidikan, tidak ada generasi yang merasa asing terhadap masyarakatnya. Sebaliknya adalah warga masyarakat yang bermutu, mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada asas sosiologis.

Dalam upaya untuk menjadikan peserta didik menjadi warga masyarakat yang diharapkan, pendidikan memiliki peranan penting. Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan harus mampu memfasilitasi peserta didik agar mampu bekerja sama, berinteraksi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat. Selain itu juga mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Dalam konteks pendidikan Islam, peserta didik diharapkan mampu mengemban tugas sebagai *khalīfatullah* dan sebagai *'abdullāh* di tengah-tengah masyarakat.

Sosiologi mempunyai empat (4) peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

1. Sosiologi mempunyai peranan dalam proses penyesuaian *value* yang ada dalam masyarakat;
2. Sosiologi memiliki peranan terhadap penyesuaian norma dan nilai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Sosiologi berperan dalam menyediakan proses sosial, dan
4. Sosiologi berupaya memahami dinamika dan keunikan santri, masyarakat dan daerah.²

¹ Zubaidi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 131.

² Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 124.

Berkaitan hal tersebut, Sukmadinata mengemukakan tiga sifat penting program pendidikan menggunakan landasan sosiologis, yaitu:

1. Pendidikan memuat norma atau nilai (*value*), dan juga memberikan pertimbangan nilai yang ada yang diharapkan masyarakat;
2. Pendidikan tidak sekadar pendidikan teoritis tapi yang lebih penting menyiapkan generasi untuk kehidupan bermasyarakat; dan
3. Lingkungan masyarakat tempat pendidikan berlangsung sangat mempengaruhi pelaksanaan pendidikan.³

Secara universal, tujuan pendidikan adalah dalam rangka menyiapkan generasi muda untuk menjadi orang dewasa sebagai anggota masyarakat, warga negara dan sekaligus warga dunia (*citizen of world*) yang mandiri, kompeten, kreatif, dan produktif. Dalam rangka mewujudkan itu semua, maka diperlukan gagasan (*ide*) agar setiap individu dapat memotivasi/ menuntut dirinya sendiri agar mampu mengaktualisasikan dirinya. Sehingga pada akhirnya, generasi muda dapat mengembangkan kepribadiannya sendiri, mengembangkan segala potensi (*fithrah* atau *gharîzah*) yang dimilikinya.

Di lain pihak, masyarakat menghendaki agar generasi muda (peserta didik) mampu berakhlak mulia, bekerja, dan hidup dengan baik dalam berbagai kondisi, dan diharapkan pula dapat bersosialisasi/berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip relevansi dengan lingkungan hidup peserta didik. Melalui prinsip relevansi ini, tujuan pendidikan yang berorientasi pada masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sudjana menambahkan bahwa pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup yang ada, sehingga mampu menyiapkan anak didik

³ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, 58-69.

untuk dapat hidup wajar sesuai dengan sosial budaya masyarakat.⁴ Dalam konteks ini, kurikulum sebagai program pendidikan yang terencana harus dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap tantangan dan tuntutan sosial budaya tersebut. Dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum lembaga pendidikan, penting sekali bagi guru dan para pengembangan kurikulum lainnya untuk lebih peka dan peduli dalam mengantisipasi perkembangan dan tuntutan masyarakat. Hal-hal yang menjadi isi (*content*) kurikulum sebagai program pendidikan yang diperoleh peserta didik harus sesuai (relevan) dan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik dalam hidup masyarakat yang juga selanjutnya dapat memberikan kontribusi pada perbaikan tatanan masyarakat.

B. Pengembangan Kurikulum Berbasis *Needs Assessment*

Analisis kebutuhan (*needs assessment*) adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan/seharusnya (*should be/ought to be*) atau diharapkan dengan kondisi yang ada (*what is*). Metode *needs assessment* dibuat untuk dapat mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah ada atau nyata.

Menurut Paul F. McCawley pengertian *needs assessment* adalah “... a systematic approach to studying the state of knowledge ability, interest, or attitude of defined audience or group involving a particular subject.”⁵

Ada 2 hal yang melekat pada pengertian *needs assessment*, yaitu:

- a. *Needs assessment* merupakan suatu proses. Artinya ada rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan *needs assessment*. *Needs assesment* bukanlah suatu hasil, tetapi suatu aktivitas tertentu dalam upaya mengambil keputusan.

⁴ Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, 13.

⁵ Paul F. McCawley, *Methods for Conducting an Educational Needs Assessment* (Moscow: University of Idaho Extension, 2010), 3.

- b. Kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. *Needs assessment* merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang kesenjangan antara yang seharusnya dimiliki setiap siswa dengan apa yang telah dimiliki.

Analisis kebutuhan merupakan alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok dan individu. Perubahan ini menunjukkan upaya formal yang sistematis menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara "seperti apa yang ada" dengan "bagaimana seharusnya".

Analisis kebutuhan merupakan aktivitas ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat (kesenjangan) proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran (*goals and objectives*) yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan.

Seel dan Dijkstra menyebutkan bahwa desain sistem pembelajaran (kurikulum) secara detail dengan argumentasi berikut:

*Instructional systems design, though systematic in process, is systemic in approach. A systemic analysis is specifically required in the needs assessment phase. A holistic understanding of entire system and how the parts interact and impact each other is needed to design a reasoned instructional solution.*⁶

Kurikulum sebagai program pendidikan adalah salah satu komponen dalam proses pendidikan. Keberadaannya menduduki posisi yang sangat urgen untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun, tujuan pendidikan yang diharapkan hendaknya sesuai (relevan) dengan tuntutan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Terkadang tidak jarang isi kurikulum tidak sesuai dengan berbagai harapan di atas, dan untuk mengetahui dan mengatasi masalah

⁶ Norbert M. Seel dan Sanne Dijkstra, *Curriculum, Plans, and Processes in Instructional Design* (London, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004), 171.

tersebut perlu adanya analisa kebutuhan (*needs assessment*) atau dengan istilah lain studi kelayakan.

Pada tahap ini, pengembangan kurikulum melakukan analisis kebutuhan suatu program dan merumuskan berbagai pertimbangan. Termasuk hal-hal apa yang harus dirancang dan dikembangkan dalam kurikulum.

Analisis kebutuhan (*needs assessment*) terhadap beberapa aspek seperti dikemukakan Zainal Arifin yang intinya antara lain:

1. Menganalisis apa yang menjadi kebutuhan peserta didik,
2. Mempelajari dan mengkaji kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja, dan
3. Menganalisis kebutuhan pembangunan nasional dan pemerintah daerah.⁷

Akhir-akhir ini permasalahan kurikulum dirasakan mempunyai peran dan fungsi yang kompleks. Hal ini disebabkan kurikulum merupakan alat yang sangat utama dalam mewujudkan tercapainya tujuan program pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal. Sehingga gambaran program pendidikan secara utuh dapat terlihat jelas dalam kurikulum tersebut. Sejalan dengan tuntutan zaman, perkembangan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arus informasi dan era globalisasi. Sudah saatnya dunia pendidikan harus peka terhadap dampak tersebut dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi agar pendidikan dapat berjalan mencapai sasaran yang diinginkan oleh semua pihak *stakeholders*. Oleh karena itu, analisis kebutuhan dalam sebuah kurikulum sangat urgen, demi tercapainya rencana dan sasaran tersebut.

Tujuan dilakukannya fase analisis atau analisis kebutuhan adalah untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi objektif di lapangan sehingga akan memberikan kejelasan dalam membuat keputusan yang responsif sekaligus informatif.

⁷ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2009), 43.

Hal tersebut senada dengan pendapat Seel dan Dijkstra yang mengemukakan tujuan analisis kebutuhan, yaitu: *"the purpose of the analysis phase is to gather enough information so that designers can make informed and responsive decisions"*.⁸

Fase analisis kebutuhan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang memadai, sehingga para perancang kurikulum dapat membuat keputusan yang informatif sekaligus responsif terhadap permasalahan di lapangan. Selanjutnya selama pengumpulan data dan informasi *needs assessment* untuk menggambarkan kebutuhan faktual apa yang dibutuhkan dan bagaimana menempatkan kebutuhan tersebut dalam keseluruhan sistem organisasi sambil mengkonfirmasi jurang kinerja dan mana yang dapat diakomodasi perancang dari intervensi yang disarankan.

Metode *needs assessment* dibuat untuk dapat mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran peserta didik, antara apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapat/diperoleh. Dalam pengukuran kesenjangan, seorang analisis harus mampu mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapi dan apa yang terjadi dalam kondisi nyata atau faktual.

Sebelum merancang atau mendesain sebuah kurikulum memang sebaiknya harus melakukan analisis kebutuhan (*needs assessment*). Adapun untuk melaksanakan *needs assessment* yang memiliki tujuan dan fungsi seperti dikemukakan di atas, maka langkah-langkah (*steps*) yang ditempuh adalah:⁹

a. *Identify the performance problem*

Mengidentifikasi problem yang dihadapi para guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

b. *Specify the goal of the needs assessment*

Pada langkah ini dilakukan penentuan tujuan atas *needs assessment*. Membuat semuanya menjadi spesifik, sehingga apa yang akan dicapai menjadi jelas. Langkah ini berupaya

⁸ Seel dan Dijkstra, *Curriculum, Plans, and Processes in Intructional Design*, 172.

⁹ *Ibid.*, 176-85.

menentukan tujuan akhir dari kegiatan analisis kebutuhan yang bakal (akan) dilaksanakan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada dampak perubahan perbaikan dalam mencapai tujuan pendidikan.

4. *Specify the ideal*

Maksud dari langkah ini adalah menentukan standar ideal. Para pengembang kurikulum menetapkan standar ideal yang mestinya dapat diimplementasikan para pendidik terhadap sumber-sumber belajar.

5. *Substantiating needs-understanding the use of web resources*

Pada langkah ini dilakukan upaya untuk memperkuat kebutuhan dan memahami baik terhadap lingkungan sekolah yang aktual maupun penggunaan sumber belajar berbasis *web* atau *internet*.

6. *Determining causes and prioritizing recommendations*

Langkah ini adalah menentukan berbagai penyebab yang perlunya dilakukan studi kelayakan sekaligus juga dapat membuat rekomendasi-rekomendasi yang diprioritaskan.

Berdasarkan paparan langkah-langkah di atas, diketahui bahwa Seel menggambarkan *needs assessment* dalam beberapa bentuk kegiatan. Kegiatan tersebut dimulai dari mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pendidik, hingga dapat menentukan penyebabnya dan memberikan rekomendasi berlandaskan skala prioritas.

Sementara itu, McCawley mengemukakan bahwa langkah-langkah (*steps*) untuk melaksanakan kegiatan *needs assessment* adalah langkah utama menyusun perencanaan. Konsep perencanaan harus dapat menjawab pertanyaan 5W+H (*what, when, who, where, why and how*) terhadap sebuah kegiatan. Deskripsi jawaban tersebut menjadi sebuah perencanaan dalam rangka mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan *needs assessment*.

McCawley mengemukakan tujuh langkah dalam *needs assessment*, yaitu:

1. *Write objectives: What is it that wants to learn from the needs assessment?*
2. *Select audience; who is the target audience? Whose needs.*
3. *Collect data; How will you collect data that will tell you what you need to know? Will you collect data directly from the target audience or indirectly?*
4. *Select audience sample: How will you select a sample of respondents who represent the target audience?*
5. *Pick an instrument: What instruments and techniques will you use to collect data?*
6. *Analyze data: How will you analyze the data you collect?*
7. *Follow up: What will you do with instrument that you gain?*¹⁰

Langkah-langkah di atas, merupakan pedoman bagi peneliti untuk mencari tahu kebutuhan yang ada dalam suatu komunitas. Namun, bukan berarti metode pengumpulan data yang dipentingkan dalam suatu *assessment*, melainkan prosesnya yang harus diselesaikan. Kemudian berdasarkan pada hasil *needs assessment* tersebut dijadikan sebuah dasar untuk membuat keputusan (*decision making*). Oleh karena itu, untuk membuat suatu keputusan perlu tidaknya mengembangkan suatu kurikulum, maka harus terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan.

Adapaun jika diimplementasikan dengan lembaga pendidikan keagamaan, pengembangan kurikulum merupakan langkah dalam mengimbangi berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, psikologi, sosial politik, ekonomi, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Pada akhirnya dapat memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan dari produk kurikulum yang ada dan selanjutnya akan diimplementasikan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Oliva bahwa kurikulum yang berpusat pada anak (*the child-centered*) "*as concept draws heavily on what is known about learning, growth, and development*

¹⁰ McCawley, *Methods for Conducting an Educational Needs Assessment*, 4.

(*psychology and biology*), *on philosophy (particularly from school of philosophy dan progressivism)*, and *on sociology*.”¹¹ Misalnya, jika analisis pengembangan kurikulum berpusat pada santri di lembaga pendidikan keagamaan khususnya tingkat wustha, maka pengembangan kurikulum harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik dalam mempersiapkan sebagai anggota masyarakat yang religius yang sehat rohani dan jasmani, dunia dan akhirat.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka pengembangan kurikulum mengandung makna bahwa kurikulum harus berubah sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam setiap bidang kehidupan. Dalam hal ini lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan untuk membaca arah perubahan tersebut.

Rancangan analisis kebutuhan melibatkan berbagai pilihan. Pemilihan yang mungkin untuk memberi suatu pandangan menyeluruh tentang kebutuhan peserta didik. Hal itu dapat menghadirkan minat yang berbeda jika pembuat keputusan dilibatkan. Keputusan pun harus dibuat berdasarkan pada prosedur yang praktis dengan cara mengumpulkan, mengorganisir, meneliti, dan melaporkan informasi yang telah diperoleh. Hal tersebut penting untuk menyakinkan bahwa analisis kebutuhan tidak menghasilkan suatu beban informasi yang terlalu berat.

Analisis kebutuhan diperlukan atas suatu alasan yang jelas, yaitu untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang berbeda. Setelah itu dapat dipastikan bahwa informasi yang akan digunakan benar-benar terkumpul berdasarkan langkah-langkah *needs assessment* yang baik. Dengan demikian, *needs assessment* yang benar akan memudahkan dalam merancang sebuah kurikulum. Tidak terkecuali jika diimplementasikan pada kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha yang diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Yaitu kebutuhan peserta didik, orang tua, masyarakat maupun *stakeholders* lainnya.

¹¹ William R. Gordon, Rosemarye T. Taylor, dan Peter F. Oliva, *Developing the Curriculum*, 9 ed. (Pearson, 2019), 12.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan Diniyah

Merujuk pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pendidikan di Indonesia terdiri atas dua (2) jalur pendidikan. Yaitu pendidikan jalur sekolah (formal) dan jalur pendidikan luar sekolah yang mencakup pendidikan dalam keluarga (informal), dan pendidikan di masyarakat (nonformal). Dengan demikian, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat.

Pendek kata, pendidikan menjadi tanggung jawab segenap pihak. Pemerintah dan orang tua secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan masyarakat terlibat secara tidak langsung, kecuali masyarakat yang dilibatkan secara khusus dalam komite sekolah/madrasah. Terlebih pada lembaga pendidikan keagamaan (diniyyah), di mana sejak awal kemunculannya memang dari masyarakat.

Sebagaimana diketahui, madrasah telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Kehadirannya merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang memadai. Maka madrasah diharapkan dapat memenuhi dua dimensi kebutuhan kekinian, yaitu: penguasaan IPTEK dan pendidikan agama (akhlak mulia).¹²

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan satu keniscayaan. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran, dana, berpartisipasi langsung dalam kegiatan pendidikan. Lebih-lebih pada lembaga pendidikan yang kelola swasta, dan umumnya lembaga pendidikan keagamaan dikelola oleh swasta (swadaya masyarakat). Selain itu, masyarakat juga mendapat manfaat dari madrasah dalam membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.

¹² Fuad Fakhruddin dan A. Mukti Bisri, *Standar Pelayanan Minimal Madrasah Tsanawiyah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 5.

Partisipasi masyarakat yang intens terhadap program madrasah dapat meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan proses pendidikan dapat berlangsung dengan produktif, efektif, dan efisien. Diharapkan lulusan (*output*)-nya pun produktif dan berkualitas.

Output yang berkualitas nampak dari penguasaan peserta didik terhadap berbagai kompetensi dasar (KD) yang dapat dijadikan bekal untuk terjun ke masyarakat atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, di samping memiliki kemampuan hidup di masyarakat secara layak. Dengan demikian, pendidikan di lembaga pendidikan keagamaan berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Bagi sekolah/madrasah swasta, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah suatu kenyataan objektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subjektif orang tua peserta didik. Oleh karena itu, partisipasi yang dimaksud di sini adalah menuntut adanya pemahaman yang sama dan objektif dari madrasah dan orang tua terkait dengan tujuan sekolah/madrasah. Artinya, tidak cukup dipahami oleh penyelenggara madrasah saja bahwa partisipasi masyarakat sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu.

Jika pemahaman dalam penyelenggaraan pendidikan intersubjektif (siswa, orang tua, dan guru), justru hal ini akan menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu itu sendiri.¹³ Tujuan partisipasi juga memberi peluang secara luas akan peran masyarakat dalam bidang pendidikan ini, sekaligus menunjukkan bahwa negara bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan.¹⁴ Sehingga upaya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dapat disalurkan terutama berkaitan dengan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap program lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan keagamaan. Pada buku ini, penulis

¹³ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 192-99.

¹⁴ Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 118.

memfokuskan pembahasan pada kurikulum lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat diharapkan oleh pihak pengelola pendidikan. Terlebih oleh lembaga pendidikan yang dikelola yayasan atau berstatus swasta. Karena pada kenyataannya, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tidaklah mudah untuk mengajak dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hambatan yang dialami oleh satuan pendidikan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam perbaikan mutu pendidikan, membuktikan belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama. Realitas tersebut menguatkan pendapat bahwa partisipasi dari masyarakat tidaklah mudah untuk diwujudkan. Disebutkan demikian karena ada hambatan yang bersumber dari pemerintah, pihak yayasan, dan juga masyarakat.

Siti Irene Astuti Dwiningrum mengemukakan bahwa kendala dari pihak pemerintah muncul berupa: (1) Lemahnya *political will* dari unsur legislatif para pembuat kebijakan (*decision maker*) di daerah untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan; (2) Rendahnya kualitas sumber daya insani yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik lainnya; (3) Rendahnya kompetensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengakomodir kepentingan masyarakat; dan (4) Sedikit/rendahnya dukungan finansial, dilihat dari kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sering kali hanya dianggap sebagai proyek, sehingga pemerintah tidak melakukan asistensi anggaran biaya secara berkelanjutan.¹⁵

Sedangkan jika ditinjau dari pihak masyarakat, kendala partisipasi muncul karena beberapa hal, antara lain:

¹⁵ Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, 124.

1. Adanya budaya paternalisme yang masih dianut sebagian masyarakat, sehingga menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka.
2. Adanya sikap apatis, karena selama ini masyarakat sudah terlanjur terbiasa dengan jarang dilibatkannya mereka dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah.
3. Tidak adanya kepercayaan (*trust*) dari masyarakat terhadap pemerintah.¹⁶

Bila hambatan-hambatan tersebut tidak segera dicarikan solusinya, maka sedikit-banyaknya akan berpengaruh tidak baik terhadap penyelenggaraan sekolah/madrasah maupun bagi masyarakat sendiri. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu duduk bersama untuk memahami masing-masing peran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang pada gilirannya menghasilkan *output* sekolah/madrasah yang berkualitas. Kesuksesan itu selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Ada beberapa solusi yang dapat mengurangi dan bahkan dapat mengatasi berbagai hambatan di atas dengan melakukan beberapa upaya. Sebagaimana ditawarkan oleh Ali Imron beberapa upaya yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Menawarkan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi. Sanksi demikian dapat berupa hukuman, denda, dan kerugian-kerugian yang harus diderita oleh si pelanggar.
2. Menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi. Hadiah tersebut dapat diberikan berdasarkan pada kuantitas dan tingkatan atau derajat partisipasinya.
3. Melakukan persuasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.

¹⁶ *Ibid.*, 197-98.

5. Mengaitkan partisipasi masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik.
6. Menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai banyak massa untuk ikut serta dalam membuat kebijakan, agar massa pengikutnya juga sekaligus berpartisipasi dalam kebijakan yang diimplementasikan.
7. Menyertakan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan yang juga mendukung kepentingan mereka. Perlu meyakinkan masyarakat, bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik jika mereka berpartisipasi untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan.¹⁷

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat adalah bagian yang tidak dapat dikesampingkan dalam pertimbangan kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan, bahkan kelangsungan penyelenggaraannya. Terlebih bagi lembaga pendidikan swasta. Oleh karena itu, sekali lagi ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat diharapkan dan dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan institusi pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Berikut adalah penjelasan berbagai partisipasi yang dimaksud:

1. Partisipasi dalam bentuk pembiayaan

Pendidikan memerlukan dukungan dana sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini termasuk juga orang tua secara kolektif. Mereka semua dapat mendukung pembiayaan yang diperlukan oleh lembaga pendidikan. Pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk kemajuan pendidikan.

Selain itu, pihak perusahaan dan industri juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menyisihkan keuntungan

¹⁷ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 82.

perusahaannya. Misalnya dengan pemberian beasiswa pendidikan untuk para peserta didik yang tidak mampu dan berprestasi di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) setempat.

2. Partisipasi dalam bentuk bahan material yang diperlukan
Selain secara finansial (material), partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan dengan pemberian sumbangan bahan-bahan berupa material bangunan. Material tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas sekolah atau menyempurnakan bangunan kelas dan kelengkapan fasilitas pendidikan lainnya. Sehingga kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian, masyarakat telah mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan pendidikan secara keseluruhan.
3. Partisipasi dalam bentuk jasa dalam kegiatan pembelajaran
Masyarakat juga dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pendidikan yang bersifat akademik yang lebih berkualitas. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak-anak di rumah. Selain itu, dukungan orang tua terhadap lembaga pendidikan juga dapat dilakukan dengan menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh lembaga pendidikan. Sementara itu, banyak lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta dapat memberikan kesempatan untuk berpraktik atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan dan pengalaman secara nyata kepada peserta didik.
4. Partisipasi dalam bidang kultural
Perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar lembaga pendidikan

keagamaan sudah dapat berjalan. Sehingga lembaga pendidikan keagamaan mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Sekaligus juga memelihara dan melestarikan budaya positif yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

5. Partisipasi dalam ikut mengawasi dan menilai (evaluasi) kemajuan lembaga pendidikan keagamaan

Keterlibatan masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan adalah suatu keharusan. Masyarakat dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dan penilaian terhadap kinerja (peran) lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan, baik terhadap program lembaga pendidikan keagamaan maupun dalam penyusunan kurikulum, agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan di masyarakat setempat.

Lembaga pendidikan keagamaan tidak dapat menafikan peran aktif dan kontribusi masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakatpun memerlukan lembaga pendidikan sebagai lembaga yang dapat mencerdaskan masyarakat, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan sosial di kehidupan ini.

Upaya membangkitkan masyarakat belajar profesional di suatu lembaga pendidikan memerlukan kemampuan, kesiapan, tekad (niat) yang kuat, dan sikap kebersamaan sebagai warga sekolah. Di samping semua itu, juga diperlukan kerja sama yang harmonis antara pimpinan lembaga pendidikan, pengurus yayasan, organisasi orang tua santri, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya untuk bersama berpartisipasi dalam pengembangan dan pembaharuan di lembaga pendidikan keagamaan. Harapan yang harus diwujudkan adalah bahwa lembaga pendidikan tersebut dapat menjadi lebih baik.

D. Kurikulum yang Berorientasi Pada Kebutuhan Masyarakat

Pada awal bab buku ini telah disebutkan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen penting terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran. Sebagai salah satu komponen dalam pendidikan, kurikulum menjiwai bahkan dapat dikatakan ruh dalam sistem pendidikan.

Pandangan al-Abrasyi tentang manusia sebagai homososial tercermin secara jelas pada ungkapan yang disampaikannya dalam *Rûh at-Tarbiyyah wa at-Ta'lim*, berikut ini.

ولما كان الانسان لا يستطيع ان يعيش منفردا بل لا بد له من الاتصال بغيره ووجب عليه ان يعمل لسعادة المجتمع الذى يتصل به من غير لمصلحته الخاصة.¹⁸

Pandangan al-Abrasyi tentang manusia adalah sebagai akhlak liberal individualis dan homososial, sehingga tidak sampai kepada sosio-antroposentris yang memusatkan ukuran nilai kepada masyarakat dan budaya. Sedangkan konsep dan pandangannya mengenai *fithrah*, al-Abrasyi memandang manusia dengan mengakui adanya sesuatu yang tetap dan tidak berubah dalam diri dan sifat manusia.¹⁹

Ini menegaskan kembali bahwa landasan sosiologis sangat berperan dalam pengembangan kurikulum terutama dalam merancang isi (*content*) kurikulum agar benar-benar dapat memenuhi tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Sebab pendidikan diniyah memang berasal dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting kajian mendalam terkait konsep dan cara untuk mengembangkan kurikulum yang berasal dari tuntutan masyarakat bawah (*grassroots*) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

¹⁸ Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi, *Rûh at-Tarbiyyah wa at-Ta'lim* (Mesir: 'Isâ al-Yâbî al-Halaby, 1960), 37.

¹⁹ Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam (Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 145.

Pendidikan harus berdasarkan aktivitas masyarakat dan kebudayaannya. Tujuan pendidikan yang utama ialah membantu peserta didik memperoleh kehidupan yang baik dalam lingkungan sosialnya. Karena isi (*content*) kurikulum mengandung nilai-nilai kehidupan sosial sehari-hari. Sehingga desain kurikulum hendaknya mengacu pada *social functions design* atau dengan kata lain rancangan kurikulum yang berdasarkan pada fungsi-fungsi masyarakat.

Pengembangan kurikulum yang menggunakan *social functions design* merupakan desain kurikulum yang menekankan pada fungsi-fungsi sosial atau hidup bermasyarakat di mana setiap orang memiliki peran individu sebagai warga masyarakat dalam sebuah komunitasnya. Selain itu, *social function design* lebih menekankan peranan anggota masyarakat (individu peserta didik) dalam menjalankan fungsi sosial dalam memecahkan masalah, sekaligus menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan tempat tinggalnya.

Peserta didik adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara kodrati manusia pasti memerlukan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga diperlukan hidup bersama, berinteraksi dan bekerjasama satu dengan lainnya. Melalui kerja sama tersebut, manusia dapat hidup, berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan berbagai problem yang sedang dihadapi secara bersama.

Pada lembaga pendidikan keagamaan, tugas lembaga pendidikan keagamaan adalah membantu agar santri mampu secara intelektual dan emosional bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakatnya di masa yang akan datang. Artinya, pada lembaga pendidikan ini digantungkan harapan yang besar bagi penyiapan generasi.

Pendapat Schubert yang dikutip oleh Sukmadinata mengemukakan: "Melalui pendidikan manusia memperoleh

peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban masa sekarang, dan membuat peradaban masa yang akan datang.”²⁰ Oleh karena itu, pendidikan (isi kurikulum) harus selalu dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan masyarakat.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini sangat cepat sebagai akibat dari perkembangan arus informasi, telekomunikasi dan globalisasi. Sehingga seringkali lembaga pendidikan keagamaan tidak cukup mampu mengikuti perubahan kemajuan masyarakat itu. Maka tidak jarang, semakin lama lembaga pendidikan keagamaan semakin bertambah jauh ketinggalan bahkan dicap tradisional atau konservatif. Lembaga pendidikan keagamaan dianggap tidak mampu bergerak secepat perubahan masyarakat, dan terkadang lembaga pendidikan keagamaan masih berpegang pada kurikulum lama yang tidak pernah ada pembaharuan (*redesign*) kurikulum yang dulu dianggap fungsional dan mampu memecahkan problem sosial. Sedangkan dalam era informasi dan globalisasi dewasa ini, kurikulum tersebut tidak lagi relevan dapat memenuhi tuntutan zaman. Dengan demikian timbul anggapan bahwa lembaga pendidikan keagamaan sudah ketinggalan zaman dan kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sekarang.

Merancang kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dilatar belakangi oleh adanya perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis dan senantiasa berubah. Oleh karena itu, kurikulum (isi kurikulum) pada lembaga pendidikan keagamaan Islam harus mempersiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat.

Apabila orientasi masyarakatnya berubah, maka perubahan dalam isi kurikulum merupakan satu keniscayaan. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang kembali (*redesign*) dan dikembangkan secara fleksibel yakni dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat. Untuk mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada masyarakat adalah dengan

²⁰ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, 65.

menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum rekonstruksi sosial. Secara definitif "rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum merupakan satu pendekatan yang bertolak dari problem atau masalah sosial yang dihadapi masyarakat".²¹

Salah satu tujuan pendidikan jangka panjang adalah untuk membuat satu generasi yang akan datang menjadi lebih baik dari generasi yang ada sekarang. Dengan kata lain, bagaimana upaya pendidikan membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang dengan konsep kurikulum rekonstruksi sosial.

Muhaimin mengemukakan, "... pendekatan rekonstruksi sosial dalam mendesain kurikulum bertitik tolak dari problem yang tengah dihadapi masyarakat, untuk selanjutnya dengan menerapkan ilmu dan teknologi, dan bekerja secara kooperatif dan kolaboratif dicarikan upaya solusinya dalam rangka pembentukan tatanan masyarakat yang jauh lebih baik."²²

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu fungsi dari pendidikan pada pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan dan menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam,²³ termasuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan adalah menuju ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang jauh lebih baik dari generasi sekarang, yang oleh para ahli pendidikan Islam disebutkan terwujudnya masyarakat *madâni* (*civil society*). Artinya adalah suatu masyarakat yang memiliki sikap toleransi, saling menghargai, menghormati, membantu satu sama lainnya dan berakhlak mulia, yaitu individu sebagai *'abdullah* dan *khalîfatullah*.

²¹ Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Teori dan Praktek*, 71.

²² Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 173.

²³ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam," t.t., 2.

BAB VII

RELEVANSI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DINIYAH PENDEKATAN GRASSROOTS

Secara teoritis, upaya penulis dalam meredesain kurikulum pendidikan diniyah dengan pendekatan *grassroots* ini merupakan sumbangan bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam, yang tentunya memperkaya khazanah ilmu pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Sedangkan secara praktisnya, ini menjadi masukan untuk Kementerian Agama RI agar melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Khususnya pada kurikulum pendidikan diniyah. Sehingga *output* dan *outcome*-nya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan akhlak atau karakter bangsa dan kemajuan negara.

Pendekatan *grassroots* dimaksud di sini ialah pengembangan kurikulum yang dimulai dari guru-guru sebagai inisiator dan konseptor. Pendekatan ini disebut juga pendekatan akar rumput yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum dengan melibatkan ustadz dan ustadzah yang berorientasi pada kebutuhan, karakteristik santri dan harapan masyarakat.

Jadi, yang dimaksud dengan judul bab ini adalah merancang kembali (*redesign*) kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha (tsanawiyah) berdasarkan harapan *stakeholders* di Kalimantan Selatan dengan pendekatan *grassroots* (akar rumput). Rancangan tersebut meliputi: perumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi/materi kurikulum, standar pengalaman/proses pembelajaran, dan penyusunan teknik & prosedur evaluasi kurikulum.

Rancangan ini telah diujicoba dengan penelitian R & D (*research and development*). Konsep pengembangan dalam konteks penelitian

yang pernah dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada *curriculum improvement*, yakni berusaha mendesain kembali (*redesign*) kurikulum pendidikan diniyah di beberapa lembaga pendidikan keagamaan di Kalimantan Selatan. Dengan demikian diharapkan akan terbentuk suatu desain kurikulum tertulis (desain hipotetik) kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha (*tsanawiyah*).

A. Proses Belajar Mengajar (PBM) Pada Kurikulum Pendekatan *Grassroots*

Jika tujuan dan materi pembelajaran telah disusun dan dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada kurikulum *grassroots*, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi pembelajaran yang sering dikenal dengan proses belajar mengajar (PBM).

Proses belajar mengajar (PBM) merupakan implementasi dari tujuan dan isi kurikulum yang masih berupa niat atau ide (rencana). Mewujudkan ide dan gagasan tersebut perlu adanya strategi untuk mentransformasi isi kurikulum dan mengupayakan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dimiyati dan Mudjiono, yang dimaksud proses pembelajaran adalah "suatu kegiatan interaksi antara guru dan murid yang akan di akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar."¹ Selain itu, terkait dengan proses pembelajaran, Hamalik mengemukakan, "Suatu proses terjadinya interaksi antara pelajar dan pengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Interaksi tersebut berlangsung di suatu lokasi tertentu dan dalam jangka satuan waktu tertentu pula."²

Pembelajaran adalah proses membelajarkan peserta didik yang terencana dan sistematis mulai dari kegiatan pendahuluan, penyampaian materi sampai ke pada evaluasi dan kesimpulan bahan ajar. Kegiatan ini menekankan proses belajar peserta didik,

¹ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), 3.

² Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 162.

yang di dalamnya juga terdapat usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi terus-menerus proses belajar dalam diri peserta didik.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa proses pembelajaran adalah sebagai suatu proses interaksi antara guru dan siswa yang akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Semua itu adalah dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang berlangsung dalam suatu lokasi dan jangka waktu tertentu.

Ada tiga tahapan dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM), yaitu:

1. Tahap perencanaan PBM. Tahap ini meliputi beberapa subkegiatan, antara lain:
 - a. Mempelajari penyebaran bahasan dalam struktur kurikulum;
 - b. Mempelajari sekaligus menganalisis silabus;
 - c. Membuat rancangan pembelajaran semacam RPP;
 - d. Mengorganisasi materi pelajaran berdasarkan silabus;
 - e. Menetapkan metode dan media pembelajaran sesuai dengan materi, tujuan, peserta didik dan lingkungan belajar;
 - f. Menetapkan standar evaluasi dan menyusun alat evaluasi; dan
 - g. Menetapkan tindak lanjut (*follow up*) dan program *remedial teaching*.
2. Pelaksanaan PBM. Tahap ini yang sering dikenal dengan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). KBM mempunyai 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap awal atau membuka pelajaran,
 - b. Tahap inti, berisi penyampaian pesan pembelajaran, dan
 - c. Tahap akhir atau penutup.
3. Penilaian (evaluasi) PBM
Pada kegiatan penilaian PBM ini dilakukan evaluasi pada dua (2) segi, yaitu:

- a. Evaluasi PBM dari segi produk (hasil)
Evaluasi ini mengukur dan menilai keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam satuan rancangan pembelajaran (RPP).
- b. Evaluasi PBM dari segi program (proses)³
Evaluasi ini adalah mengukur dan menilai efisiensi dan efektivitas metode, media dan prosedur pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Evaluasi aspek ini yang sering terabaikan dalam kegiatan pembelajaran.

Ketiga tahapan di atas, harus dilaksanakan oleh guru. Karena ketiga tahapan tersebut merupakan tugas utama (kewajiban) bagi seorang tenaga pendidik, sesuai dengan perannya sebagai tenaga profesional, yang ditetapkan sebagai peran guru dalam buku pedoman pelaksanaan KTSP tahun 2006.

Tugas guru dalam pembelajaran, sebagai berikut:

1. Guru sebagai perencana pembelajaran, yang tugasnya meliputi:
 - a. Membuat program tahunan (prota);
 - b. Membuat program semester (promes);
 - c. Membuat silabus;
 - d. Menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM);
 - e. Membuat RPP.
2. Guru sebagai pelaksana pembelajaran, yang tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan pembelajaran kontekstual (CTL), *life skills*, tematik, PAIKEM, dan kolaboratif;
 - b. Melaksanakan metode pembelajaran yang bervariasi; dan
 - c. Menggunakan media pembelajaran yang menarik minat.
3. Guru sebagai evaluator, tugasnya meliputi: mengukur, menilai, merekam dan melaporkan hasil pembelajaran.⁴

³ Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Teori dan Praktek*, 29-30.

⁴ *Ibid.*, 129.

Dimiyati dan Mudjiono mengatakan bahwa tugas seorang guru adalah mengajar. Kegiatan mengajar ini hendaknya dapat dilakukan dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, harus menggunakan teori-teori dan prinsip-prinsip belajar, yaitu:

1. Perhatian dan motivasi,
2. Keaktifan peserta didik,
3. Keterlibatan langsung atau berorientasi pada pengalaman langsung,
4. Pengulangan, untuk melatih daya-daya jiwa dan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang positif,
5. Tantangan belajar peserta didik.⁵

Pada komponen Proses Belajar Mengajar (PBM), ada banyak aspek yang terkait di dalamnya. Seperti pendekatan dan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan pengelolaan (*management*) kelas. Semuanya itu harus diupayakan oleh tenaga pendidik agar kondisi pembelajaran berlangsung kondusif. Dengan demikian, tujuan pembelajaran diharapkan dapat dicapai secara efektif dan pembelajaran dapat bermakna dalam diri setiap peserta didik.

B. Evaluasi Pendidikan Islam, Remedial, dan Standar Ketuntasan Minimal Pada Kurikulum Pendekatan *Grassroots*

Evaluasi merupakan salah satu komponen dalam kurikulum pendidikan maupun dalam pembelajaran di kelas. Cross yang dikutip oleh Sukardi, mengemukakan "*evaluation is a process which determines the extent to which objectives have been achieved*".⁶

Salah satu tujuan evaluasi adalah sebagai umpan balik (*feed back*) dalam rangka perbaikan program pendidikan dan program pembelajaran. Sebagai salah satu komponen, evaluasi tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Evaluasi hendaknya sudah menjadi perhatian terutama bagi

⁵ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, 53.

⁶ M. Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 1.

pendidik dan bagi penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, hasil evaluasi tersebut dapat diketahui ketercapaian target kurikulum dan tingkat efisiensi penyelenggaraan pendidikan diniyah secara umum, kemudian hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk kegiatan tindak lanjut.

Penjelasan detail terkait dengan evaluasi dan penyelenggaraannya di pendidikan diniyah dipaparkan di bawah ini:

1. Pengertian Evaluasi Pendidikan

Secara bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "evaluation" yang sering diartikan dengan penilaian. Menurut *Longman Dictionary of Contemporary English*, kata *evaluation* berasal dari akar kata "to evaluate means to calculate or judge the value or degree of something."⁷ Definisi tersebut bermakna menghitung atau menetapkan nilai atau tingkatan terhadap sesuatu.

Sedangkan dalam bahasa Arab, kata yang paling dekat maknanya dengan kata evaluasi ialah kata *muḥāsabah*, berasal dari kata "حسب" yang berarti menghitung atau memperkirakan. Al-Ghazali menggunakan kata tersebut dalam menjelaskan tentang evaluasi diri (النفس محاسبة) setelah melakukan aktivitas.⁸

Sementara itu, dalam konsep pendidikan Islam, kata evaluasi tidak ditemukan padanan katanya yang pasti, tetapi terdapat terma atau istilah-istilah tertentu yang mengarah kepada makna evaluasi, yaitu:

- a. *Al-ḥisâb*, mempunyai makna menghitung, menafsirkan atau mengira. Misalnya yang terdapat dalam firman Allah surah Al-Haqqah [69] : 25 - 26:

وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ (٢٥) وَلَمْ أَدْرِ
مَا حِسَابِيَهٗ (٢٦)

⁷ Quirk, "Longman Dictionary of Contemporary English (New Edition)," 237.

⁸ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 105.

"Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini) [25] Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku."

Umar bin Khattab pernah berkata yang serupa dengan kata *hisâb*, seperti berikut ini:

وَيُرَوَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا
وَتَرَبَّيْنَا لِلْعَرْصِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخْفُ الْجِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ
نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَيُرَوَّى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا
حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ. (رواه
الترمذی)

Menurut kamus *Mu'jam al Maqayis fi al Lughah*, kata *al-hisâb* berasal dari kata *hasiba* yang pada dasarnya mempunyai empat makna, sebagai berikut:

حسب, والحاء والسين و الباء اصول اربعة

- فالاول: العد. والاصل الثاني: الكفاية

- والاصل الثالث: الحسبان, وهي جميع حسابانه. وهي الوسادة الصغيرة

- والاصل الرابع: الاحساب الذي ابيضت جلده من داء ففسدت شعرته.⁹

- b. *Al-balâ*, memiliki makna cobaan, dan ujian. Istilah ini terdapat dalam firman Allah surah al-Mulk [67] ayat 2, yaitu:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ (٢)

"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

- c. *Al-imtihân*, berarti ujian. Istilah ini berasal dari kata *imtihân*. Terma ini digunakan oleh Muhammad Athiyah al-Abrasyi untuk menyebut penilaian atau evaluasi. Dia menyebut

⁹ Abu al Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam al Maqayis fi al Lughah* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994), 236.

penilaian atau evaluasi itu dengan istilah *al-Imtihânât al-Madrasiyyah*.¹⁰ Terdapat surah al-Qur'an yang menyatakan wanita-wanita yang diuji dengan menggunakan kata *imtihân*. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Mumtahinah [60] : 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُمْ مَا آَنَفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسَلُّوا مَا آَنَفَقْتُمْ
وَلَيْسَ لَكُمُ مَا آَنَفَقْتُمْ حُكْمٌ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

- d. *Al-ikhtibâr*, memiliki makna ujian atau cobaan (*al-balâ*). Orang Arab sering menggunakan *balâ* dengan sebutan *ikhtibâr*. Bahkan lembaga pendidikan bahasa Arab menggunakan istilah evaluasi dengan istilah *ikhtibâr*.

¹⁰ Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi, *Rûh at-Tarbiyah wa ...*, h. 362

- e. *Al-hukm*, memiliki makna putusan atau vonis. Firman Allah SWT QS. Yusuf [12] : 67 menyatakan sebagai berikut:

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧)

"Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri"

- f. *Al-qadhâ*, memiliki arti putusan, misalnya dalam firman Allah SWT QS. Thaha [20] : 72.

قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٧٢)

"Mereka berkata: Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja."

- g. *Al-nazhr*, memiliki arti melihat atau menilai, seperti dalam firman Allah SWT QS. an-Naml [27] : 27 berikut ini:

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٧)

Berkata Sulaiman: "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta."

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, menyatakan berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنْ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه ابن ماجه)

"Sesungguhnya Allah tidak memandang (menilai) bentuk rupamu atau hartamu, melainkan Dia menilai pada isi hati dan amal perbuatanmu." (HR. Ibnu Majah)

Demikian 7 terma yang berkenaan dengan istilah evaluasi. Beberapa terma tersebut boleh jadi menunjukkan arti evaluasi secara langsung, atau hanya sekadar alat atau proses dalam evaluasi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah tidak secara tegas menetapkan arti untuk kata evaluasi, sedangkan operasionalnya diserahkan kepada ijtihad umat Islam.¹¹

Istilah-istilah tersebut dapat dijadikan petunjuk arti evaluasi secara langsung atau hanya sekadar alat/proses dalam evaluasi. Terma penilaian pada taraf berikutnya lebih diorientasikan pada makna penafsiran atau memberi putusan terhadap kependidikan. Setiap tindakan pendidikan didasarkan atas rencana, tujuan, bahan, alat, dan lingkungan kependidikan tertentu. Penilaian dalam pendidikan dimaksudkan untuk menetapkan keputusan-keputusan pendidikan. Baik yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan, proses dan tindak lanjut pendidikan. Juga hal-hal yang menyangkut perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Dalam konteks ini, penilaian dalam pendidikan Islam bertujuan agar keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islami sehingga tujuan pendidikan Islam yang dicanangkan dapat tercapai secara maksimal.

Sedikit berbeda dari pendapat sebelumnya yang menyebutkan penilaian berasal dari kata *evaluation*, Zainal Arifin mengemukakan bahwa istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah *assessment*, bukan dari istilah *evaluation*.¹² Dalam proses pembelajaran, penilaian sering dilakukan guru untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai peserta didik. Hal senada dengan Zainal Arifin, Anthony J. Nitko menjelaskan yang maksudnya *assessment* didefinisikan dalam sebuah terma yang luas sebagai sebuah

¹¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 198-200.

¹² Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, 5.

proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang siswa, kurikulum, program, dan kebijakan pendidikan.

Anthony J. Nitko menggambarkan bahwa penilaian dalam definisi yang luas adalah satu proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan siswa, kurikulum program kegiatan dan kebijakan pendidikan. Di sini Anthony nampaknya sependapat dengan Zainal Arifin bahwa penilaian berasal dari kata *assessment* bukanlah *evaluation*. Pendapat tersebut diperkuat lagi dengan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa yang namanya evaluasi merupakan gabungan dari langkah mengukur dan menilai atau dengan kata lain bahwa evaluasi adalah hasil dari kegiatan pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*assessment*).¹³

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menguasai bahan-bahan yang telah disampaikan melalui proses pembelajaran dengan menetapkan skor atau nilai. Agar evaluasi dapat dipertanggungjawabkan, maka alat ukur (*instrument test*) yang diaplikasikan harus benar-benar valid dan reliabel.

Evaluasi pendidikan, bila dilihat dari tujuannya dapat dibedakan kepada empat jenis evaluasi, yaitu: evaluasi formatif, sumatif, penempatan (*placement test*) dan evaluasi diagnostik. Namun, bila dilihat dari pelaksanaannya dapat dibedakan pada tiga macam, yaitu: tes tulisan, lisan dan tes kinerja (*performance test*).

Dalam hal ini, evaluasi pendidikan Islam harus dilaksanakan secara integral antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Penyelenggaraannya melalui 3 (tiga) macam tes, yaitu: tes lisan (hapalan), tes tertulis, dan tes kinerja atau untuk kerja baik berupa akhlak maupun pengamalan ibadah.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 14.

2. Objek/Sasaran Evaluasi Pendidikan Islam

Sebelum membahas tentang objek atau sasaran evaluasi pendidikan Islam, akan lebih terarah bila membahas sasaran/objek evaluasi secara umum terlebih dahulu. "Objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut."¹⁴

Objek evaluasi harus berhubungan dengan kegiatan yang nyata dan telah terjadi. Alasannya adalah bahwa tidak mungkin orang melakukan evaluasi terhadap sesuatu yang masih dalam taraf pikiran (*ide*) atau masih dalam angan-angan, kecuali orang tersebut melakukan penelitian (*research*). Objek evaluasi harus bertitik tolak dari tujuan evaluasi itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dievaluasi menjadi relevan dengan apa yang diharapkan.

Menurut Arikunto, sasaran penilaian (*evaluasi*) untuk unsur-unsurnya, meliputi: *input*, transformasi, dan *output*.

a. *Input*

Proses ini adalah mengevaluasi calon peserta didik yang akan masuk ke suatu lembaga pendidikan keagamaan (*diniyah*). Calon peserta didik harus diseleksi sebelum ia menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Tes *input* meliputi:

- 1) Kemampuan, tes kemampuan (*aptitude test*) yang bersifat akademik.
- 2) Kepribadian, adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan nampak bentuknya melalui tingkah laku. Ini dapat diketahui dengan menggunakan tes kepribadian (*personality test*).
- 3) Sikap-sikap, merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan atau dalam berinteraksi sosial. Oleh karena itu, banyak orang

¹⁴ *Ibid.*, 20.

yang menginginkan informasi khusus tentang sikap seseorang. Tes sikap adalah *attitude test*.

- 4) Intelegensi, di mana tes ini dilakukan untuk mengetahui *Intelligence Quotient* (IQ). Sehingga akhirnya akan diketahui IQ yang rendah, sedang (rata-rata), di atas rata-rata, dan *brilliant*.

b. Transformasi

Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain:

- 1) Kurikulum/materi pelajaran,
- 2) Metode dan cara penilaian,
- 3) Sarana pendidikan/media,
- 4) Sistem administrasi, dan
- 5) Guru dan personal lainnya.

c. *Output*

Proses ini merupakan penilaian terhadap lulusan suatu lembaga tertentu yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian/prestasi belajar mereka selama mengikuti suatu program pendidikan. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau *achievement test*.¹⁵

Objek evaluasi di atas merupakan objek evaluasi pendidikan yang sasarannya lebih luas daripada objek evaluasi pembelajaran. Objek evaluasi pembelajaran memiliki sasaran yang lebih fokus pada aspek yang lebih kecil.

Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar (PBM). Evaluasi tersebut adalah bagian dari evaluasi pendidikan yang harus dilaksanakan oleh guru. Di mana tujuan dari

¹⁵ *Ibid.*, 20-22.

pelaksanaannya adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.

Zainal Arifin mengemukakan objek evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. Program pembelajaran yang meliputi:
 - 1) Tujuan pembelajaran umum (KD).
 - 2) Materi, berupa topik/pokok bahasan dan subpokok bahasan.
 - 3) Metode pembelajaran.
 - 4) Media pembelajaran.
 - 5) Sumber belajar.
 - 6) Lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga.
 - 7) Proses penilaian dan hasil belajar.
- b. Proses pelaksanaan pembelajaran, meliputi:
 - 1) Kegiatan pembelajaran.
 - 2) Guru, terutama dalam hal menyampaikan materi, problema guru, dan lain-lain.
 - 3) Peserta didik, terutama dalam hal peran sertanya dalam kegiatan belajar.
- c. Hasil pembelajaran, baik untuk jangka pendek ataupun jangka menengah dan jangka panjang.¹⁶

Berbeda dengan evaluasi pendidikan secara umum yang sudah dipaparkan di atas, objek evaluasi pendidikan Islam dalam arti yang umum adalah peserta didik atau dalam arti khusus adalah aspek-aspek tertentu yang terdapat pada peserta didik. Peserta didik tidak saja sebagai objek evaluasi, tetapi juga sebagai subjek evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi pendidikan Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu evaluasi diri sendiri (*self evaluation*) dan evaluasi terhadap orang lain (peserta didik).

¹⁶ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 271-73.

Sasaran/objek evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya melihat empat kemampuan (kompetensi) peserta didik, yaitu:

- a. Sikap dan pengalaman yang berhubungan dengan pribadinya dengan Tuhannya,
- b. Sikap dan pengalaman yang berhubungan dirinya dengan masyarakat.
- c. Sikap dan pengalaman yang berhubungan dirinya dengan alam sekitarnya.
- d. Sikap dan pendangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai *khalifah*-Nya di muka bumi.¹⁷

Sementara itu, aspek khusus yang menjadi sasaran (objek) evaluasi pendidikan Islam, yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dapat dilihat beberapa sudut pandang, yaitu:

- a. Dilihat dari tujuan umum pendidikan Islam.
Tujuan umum pendidikan Islam adalah adanya *taqarrub* dan penyerahan diri secara mutlak oleh peserta didik kepada Allah SWT.¹⁸
- b. Dilihat dari fungsi pendidikan Islam.
Fungsi pendidikan Islam adalah mengembangkan potensi peserta didik dan transinternalisasi nilai-nilai Islam serta mempersiapkan segala kebutuhan masa depan peserta didik.

Maka, evaluasi meliputi aspek-aspek:

- 1) Perkembangan pendayagunaan potensi-potensi peserta didik, misalnya potensi *ijtihâd*, *jihâd*, *tajdîd*, emosi (*qalb*/rasa), kognisi (*'aql*/cipta), dan konasi (*nafs*/karsa);

¹⁷ Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 212.

¹⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 201.

- 2) Perkembangan perolehan, pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Islam; dan
 - 3) Perkembangan perolehan kelayakan hidup, baik yang bersifat duniawi dan ukhrawi.
- c. Dilihat dari sudut dimensi-dimensi kebutuhan hidup dalam pendidikan Islam.

Dimensi-dimensi kebutuhan hidup manusia, yaitu ada kalanya berdasarkan kebutuhan asasi hidup manusia, seperti kebutuhan *dharûriyah* (primer), kebutuhan *hâjjah* (sekunder), dan kebutuhan *tahsîniyah* (pelengkap untuk memperindah). Ada juga berdasarkan segi-segi yang terdapat pada psikofisik manusia seperti segi jasmaniah, *aqliyah*, *akhlaqiyah*, *ijtimâ'iyah* (sosial), dan *jamâliyah* (artistik/seni).¹⁹

- d. Dilihat dari domain atau ranah yang terdapat pada diri peserta didik.

Benyamin S. Bloom dalam bukunya *Taxonomy of Educational Objectives the Classification of Educational Goals*, menguraikan bahwa ranah pendidikan itu dikelompokkan dalam tiga domain, yaitu; *cognitive, affective, and psychomotor domains*. Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pendidikan Islam, pendapat Bloom tersebut dicoba diselaraskan sehingga dapat dipraktikkan dengan baik berdasarkan pada tujuan dan norma pendidikan Islam. Sebagian pakar pendidikan Islam mengatakan *cognitive* disejajarkan dengan pengertian *ta'lim*, *affective* sama dengan *ta'dib* dan *tazkiyah*, dan *psychomotor* sama dengan *tarbiyah*.

- 1) Domain Kognitif

Ranah ini mempunyai enam tingkatan dari yang paling rendah berupa pengetahuan dasar (fakta, peristiwa, informasi, istilah) sampai pada yang paling tinggi

¹⁹ *Ibid.*, 202.

berupa evaluasi (pandangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pemikiran) sehingga merupakan suatu hierarki.²⁰

Seperti dikemukakan sebelumnya, ranah kognitif/ pengetahuan dasar dalam pandangan pendidikan Islam disamakan dengan konsep *ta'lim*, maksudnya pengetahuan dasar yang berisi informasi dan fakta. Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2] : 31 yang berbunyi:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١)

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian Adam memaparkannya kepada para Malaikat, lalu Dia berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

Kata '*allama* berarti mengajarkan pengetahuan yang bersifat kognitif. Pada ayat selanjutnya, Adam AS diperintahkan untuk menyampaikan pengetahuan yang sudah diajarkan Allah SWT kepada para malaikat-Nya.

2) Domain Afektif

Hasil belajar afektif tidak dapat dilihat bahkan diukur seperti halnya pengetahuan pada ranah konitif. Guru tidak dapat langsung mengetahui apa yang bergejolak dalam hati anak didik, apa yang dirasakannya, apa yang sedang dipikirkannya atau yang diyakini oleh peserta didik. Padahal dalam pendidikan Islam terutama pendidikan tauhid (aqidah) banyak sekali hal-hal yang menyangkut hati, yang sebenarnya termasuk dalam ranah afektif ini.

²⁰ Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, 65.

Domain afektif sering juga diartikan dengan nilai dasar. Oleh karena itu dalam pendidikan Islam, domain afektif ini lebih cenderung kepada istilah *ta'dīb* dan *tazkiyah*. Maksudnya adalah bahwa akhlak/adab dan *muhâsabah an-nafs (self evaluation)* merupakan cerminan dari aqidah yang murni yang tertanam di dalam hati seorang peserta didik.

Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan ranah afektif ini adalah:

وقال ابو بكر الصديق رضى الله عنه للرسول الكريم: لقد طفت العرب , وسمعت فصحاءهم , فما رأيت ولا سمعت مثلك أحدا ... فمن أدبك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي)).²¹

Domain afektif menyangkut penerimaan atau penghayatan dalam diri siswa yang mengkrystal dalam dirinya, sehingga akan melahirkan perilaku sesuai dengan penerima dan penghayatan terhadap satu konsep, prinsip dan bahkan keyakinan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari domain ini jauh lebih rumit dibandingkan mencapai dan mengevaluasi tujuan domain kognitif.

3) Domain Psikomotor

Menurut S. Nasution, ranah ini kurang mendapat perhatian para pendidik dibandingkan dengan kedua ranah lainnya. Akhir-akhir ini gerakan kesehatan dan kesegaran (fisik dan mental) kembali memusatkan perhatian kepada ranah psikomotor ini.²²

Dalam pendidikan Islam, malah sebaliknya ranah ini mendapat perhatian yang sangat serius bagi guru

²¹ Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *At Tarbiyah al Islāmīyah wa Falāsifatuha* (Mesir: 'Isā al-Yābī al-Halaby, t.t.), 110.

²² S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran, ...,* h. 72

agama Islam di mana pelaksanaan ibadah lebih banyak dipraktikkan atau pemberian keterampilan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, seperti pembelajaran wudhu, tayamum, shalat, dan haji.

Ranah psikomotor merupakan ranah gerak yang membentuk satu keterampilan fisik dalam Islam. Misalnya mengajarkan tentang tata cara shalat, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadits beliau:

حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال: فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة مرتبة وقال في حديث مالك بن الحويرث صلُّوا كما رأيتموني أصلي. (رواه البيهقي)

Garis besar ranah psikomotor adalah sebagai berikut:

- a) Gerak refleks
- b) Gerak dasar yang fundamental, meliputi: gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulasi.
- c) Keterampilan perseptual, meliputi: diskriminasi kinestetik, visual, auditoris, dan dikriminasi taktif, serta perseptual yang terkoordinir.
- d) Keterampilan fisik, meliputi: ketahanan, kekuatan, keluwesan dan kelincahan.
- e) Gerak terampil, meliputi: keterampilan adaptif yang sederhana, adaptif gabungan dan keterampilan adaptif yang kompleks.
- f) Komunikasi non-diskursif, meliputi: gerak ekspresif, dan gerak interpretatif.²³

Semua gerakan fisik yang memerlukan latihan dan bimbingan akan membentuk satu *skill* atau keterampilan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

²³ S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran, ...*, h. 72

pendidikan. Dalam pendidikan Islam, aspek psikomotor atau *skill* ini menjadi perhatian ustadz dan ustadzah dalam pendidikan diniyah.

3. Kebermaknaan Hasil Evaluasi dalam Pendidikan Islam

Evaluasi sebagai *feedback* terhadap kegiatan pendidikan dan pembelajaran harus dapat berfungsi dan bermakna bagi berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, hasil evaluasi dapat memberikan kebermaknaan dan dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan, baik terhadap program maupun produk pendidikan.

Kebermaknaan hasil evaluasi dapat dilihat dari fungsi evaluasi itu sendiri, yaitu berfungsi sebagai umpan balik (*feedback*) terhadap kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Umpan balik ini berguna sebagai:

- a. *Ishlah*, yaitu perbaikan terhadap semua komponen pembelajaran. Termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan-kebiasaan peserta didik.
- b. *Tazkiyah*, yakni penyucian. Maksudnya adalah melihat kembali program-program pendidikan yang dilakukan, apakah program tersebut penting atau tidak dalam kehidupan peserta didik, atautkah menyimpang dari program atau tujuan semula.
- c. *Tajdid*, yaitu memodernisasikan semua kegiatan pendidikan. Untuk kegiatan yang tidak relevan dengan kepentingan semua pihak, akan diubah dan dicarikan gantinya ke arah yang lebih maju.
- d. *Al-dakhil*, yaitu masukan sebagai laporan bagi orang tua murid berupa rapor, ijazah, piagam dan sebagainya.²⁴

Supaya evaluasi hasil belajar dapat memberikan makna terhadap perbaikan pada makna *tazkiyah*, *tajdid* maupun *ishlah*, maka evaluasi harus dilaksanakan dengan mengikut pada berbagai prinsip dan kriteria yang valid dan reliabel sehingga alat ukur yang digunakan tepat terhadap apa yang mau diukur.

²⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 204-5.

Selain itu, perlu adanya kriteria yang efektif yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pendidikan Islam yang berfokus pada hasil belajar (*outcomes*). Oleh karena itu, para pendidik dan pengajar perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Reaksi dari peserta didik terhadap proses dan isi kegiatan pembelajaran;
- b. Pengetahuan atau proses yang belajar yang diperoleh melalui pengalaman pendidikan (*learning experience*);
- c. Perubahan perilaku individu peserta didik yang disebabkan oleh adanya kegiatan pendidikan; dan
- d. Hasil atau perbaikan yang dapat diukur baik secara individu maupun organisasi (kelembagaan).²⁵

Pada konteks pendidikan diniyah, evaluasi pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik (ustadz dan ustadzah) harus berorientasi dan fokus pada *outcome* pendidikan. Sehingga apa yang dipelajari peserta didik dapat dirasakan hasilnya. Baik bagi individu peserta didik maupun masyarakat.

Selanjutnya makna evaluasi hasil belajar bila dilihat dari penggunaannya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Makna bagi siswa

Salah satu fungsi penilaian adalah untuk mengetahui sejauhmana siswa berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Apakah pelajaran yang diberikan oleh guru itu dirasa memuaskan atau tidak. Beranjak dari evaluasi tersebut, siswa akan dapat mengetahui efektivitas cara dan teknik belajarnya selama ini, sehingga diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan prestasi belajarnya.

- b. Makna bagi guru

- 1) Dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui siswa-siswa mana yang sudah berhak

²⁵ Veithzal Rivai, Zainal, dan Fauzi Bahar, *Islamic Education Management dari Teori ke Praktik (Mengelola Pendidikan secara Profesional dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 34.

melanjutkan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui siswa-siswa yang belum berhasil menguasai bahan;

- 2) Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa sehingga untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan;
- 3) Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum;

c. Makna bagi sekolah

- 1) Dengan kegiatan penilaian yang dilakukan guru dapat diketahui pula apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum;
- 2) Informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang;
- 3) Informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun, dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah, yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum.²⁶

d. Bagi orang tua, adalah:

- 1) Dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar anaknya;
- 2) Dapat meningkatkan pengawasan dan bimbingan belajar anak; dan
- 3) Untuk dapat mengarahkan pada pilihan jurusan atau keahlian pada pendidikan berikutnya yang lebih tinggi.

e. Bagi masyarakat, meliputi:

- 1) Untuk mengetahui kemajuan sekolah;
- 2) Untuk memberikan kritik yang membangun dan saran-saran bagi kemajuan sekolah;

²⁶ Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)*, 6.

- 3) Untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam membantu lembaga pendidikan.²⁷

Dengan demikian, evaluasi hasil belajar dalam pendidikan Islam diharapkan dapat bermakna sebagai *feedback* bagi semua pihak, yaitu bagi siswa, guru, sekolah, orang tua, dan bahkan bagi masyarakat sebagai pengguna (*the user*) lulusan (*output*) dari lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dan sepatutnya bagi penyelenggara evaluasi agar dapat memberikan data hasil evaluasi yang tepat, akurat dan akuntabel kepada berbagai pihak. Sehingga data hasil evaluasi dapat dipergunakan untuk menilai sebuah kurikulum pada lembaga pendidikan, baik sekolah maupun lembaga pendidikan keagamaan.

4. Program *Remedial* dan Standar Ketuntasan Minimal (SKM)

Program *remedial teaching* atau istilah lain adalah program perbaikan pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Program *remedial teaching* juga merupakan kegiatan lanjutan dari hasil evaluasi pembelajaran diperuntukan bagi peserta didik yang perolehan skor atau nilainya berada di bawah Standar Ketuntasan Minimal (SKM) belajar yang telah ditetapkan sekolah atau madrasah.

Berdasarkan pada kamus arti kata *remedial* atau *remedy* adalah "*a treatment, medicine, etc.*"²⁸ dengan kata lain berarti mengobati atau menyembuhkan atau membuat menjadi lebih baik. Sementara, istilah *remedial classes/lessons/groups (remedial teaching)* berarti "*consisting of pupils who are lower at learning or have fallen behind the others.*"²⁹

Jadi, *remedial teaching* merupakan suatu bentuk pembelajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan

²⁷ Murdan, *Evaluasi Pendidikan Agama Islam (Suatu Pengantar)* (Banjarmasin: Cyprus, 2007), 18.

²⁸ Hornby, *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, 989.

²⁹ *Ibid.*

pembelajaran bagi siswa yang memperoleh nilai yang rendah, agar hasil belajar yang dicapai dapat menjadi lebih baik daripada yang diberikan sebelumnya. Pembelajaran yang dimaksud adalah mengulang dari pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya, terutama terhadap materi yang dianggap belum dikuasai atau belum tuntas. Sehingga peserta didik tersebut memperoleh hasil belajar yang belum mencapai standar minimal ketuntasan.

Program *remedial teaching* yang baik pada prinsipnya perlu didasarkan pada diagnostik awal dan disertai dengan tindak lanjut yang berkelanjutan (*continue*). Oleh karena itu, Sukardi mengemukakan beberapa kegiatan yang mestinya dilakukan guru, yaitu:

- a. Perlu diadakan pencerahan kepada peserta didik bahwa tujuan program remedi adalah mengatasi kesulitan belajar;
- b. Perlu menilai keberhasilan program remedi yang dilakukan secara berkelanjutan;
- c. Evaluasi remedi memiliki arti penting bagi orang-orang terdekat peserta didik terutama orang tua/wali murid; dan
- d. Perlu membangun kembali rasa percaya diri peserta didik bahwa mereka pasti mampu menguasai pelajaran/materi tersebut.³⁰

Program *remedial teaching* sudah direncanakan oleh guru di dalam program semester. Biasanya dilaksanakan setelah ulangan bulanan, setelah Ulangan Tengah Semester (UTS), dan setelah Ulangan Akhir Semester (UAS). Sejatinya *remedial teaching* diselenggarakan sebelum pembagian buku rapor atau sebelum kenaikan kelas.

Menurut penulis, bentuk kegiatan *remedial teaching* dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, di antaranya:

- a. Dengan membelajarkan kembali materi sebelumnya kepada peserta didik yang belum tuntas SKM-nya;

³⁰ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*, 235-36.

- b. Meminta peserta didik untuk mempelajari kembali materi tersebut dan membuat resumennya;
- c. Meminta peserta didik untuk menjawab soal ulangan yang sudah direvisi; atau
- d. Peserta didik menjawab soal baru yang terkait dengan materi yang belum tuntas nilainya.

Program *remedial teaching* dilakukan apabila ada peserta didik yang belum tuntas SKM materi pokok (tema/subtema) maupun SKM kurikuler, setelah mengikuti ulangan formatif atau ulangan sumatif. *Remedial teaching* dilaksanakan maksimal dua kali (2x) kegiatan. Apabila sudah dua kali kegiatan *remedy* namun masih ada peserta didik yang belum tuntas, maka diambil nilai yang tertinggi dari hasil *remedial*. Adapun siswa yang tuntas SKM setelah mengikuti program *remedial*, maka nilainya tidak boleh melebihi SKM yang ada.³¹

Dalam melaksanakan evaluasi tidak hanya melihat ketuntasan peserta didik terhadap KD-KD yang harus dicapainya, melainkan ketuntasan soal juga akan diperhatikan atau dievaluasi. Apabila ada beberapa soal yang sebagian besar peserta didik belum berhasil menjawab soal-soal tersebut, berarti soal-soal tersebut perlu dipelajari, dan diperbaiki, atau direvisi oleh guru.

Beberapa pendekatan dalam program *remedial teaching* pada akhirnya dapat dikembangkan oleh guru ke dalam berbagai strategi pelayanan program *remedial*, yaitu:

- a. Pendekatan kuratif, pendekatan yang dilakukan setelah diketahui adanya siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran. Tiga strategi yang dapat dikembangkan oleh guru, yaitu: strategi pengulangan, pengayaan dan pengukuhan, serta strategi percepatan.

³¹ Departemen Diknas, *Pedoman Pelaksanaan Remedial Teaching Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 1995), 124.

- b. Pendekatan preventif, pendekatan yang ditujukan kepada siswa yang pada awal kegiatan belajar telah diduga akan mengalami kesulitan belajar. Strategi pengajaran yang dapat dilakukan, yaitu kelompok homogen, individual, kelas khusus.
- c. Pendekatan yang bersifat pengembangan, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa kesulitan peserta didik harus diketahui oleh guru sedini mungkin. Tujuannya adalah agar peserta didik tersebut dapat diberikan bantuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.³²

Dari semua pendekatan yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa pendekatan yang banyak digunakan oleh para guru adalah pendekatan kuratif. Yaitu pendekatan yang berusaha untuk memulihkan keadaan. Alasannya adalah untuk memenuhi tuntutan atau target kurikulum supaya peserta didik dapat mencapai Standar Ketuntasan Minimal (SKM) yang sudah ditetapkan sekolah/madrasah.

Sementara itu, SKM merupakan standar atau kriteria untuk menentukan penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Dalam menetapkan SKM masing-masing sekolah/madrasah terdapat kondisi dan pertimbangan yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa berbeda mata pelajaran maka akan berbeda pula standarnya. Semuanya tergantung pada ketetapan sekolah/madrasah, juga didasarkan pada mudah dan sukarnya isi materi pelajaran yang terkandung dalam mata pelajaran.

Pada permulaan berlakunya kurikulum Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Standar Ketuntasan belajar siswa ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan mata pelajaran, yang dikenal dengan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM). Namun, setelah penyempurnaan kurikulum KBK tahun 2004 menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, maka standar ketuntasan belajar peserta didik ditentukan berdasarkan mekanisme

³² Ahmad Husain, *Program Remedial Teaching dan Program Pengayaan* (Jakarta: Kencana Pramida, 2012), 156.

tersendiri, yang diistilahkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Berbeda dengan SKBM, KKM terancang lebih rinci. Memuat KKM Kompetensi Dasar (KD), KKM Standar Kompetensi (SK) sampai pada KKM Mata Pelajaran (MP). Untuk lebih memahami KKM, maka di bawah ini penulis paparkan hal-hal yang terkait dengan KKM.

1. Unsur-Unsur KKM

Unsur-unsur dalam menentukan KKM disesuaikan dengan Mata Pelajaran (MP). Dalam menentukan KKM suatu mata pelajaran, terlebih dahulu diketahui beberapa unsur atau komponen dalam menentukan KKM, mulai dari KKM Kompetensi Dasar sampai kepada KKM Mata Pelajaran, yaitu:

a. Kompleksitas Indikator (KI)

KI adalah tingkat kesulitan indikator belajar yang bakal dicapai oleh peserta didik;

- 1) KI yang mudah 81 - 100
- 2) KI yang sedang 65 - 80
- 3) KI yang sulit 50 - 64

b. Daya Dukung (DD)

DD adalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran terkait dengan mata pelajaran tertentu. Kriterianya adalah berikut:

- 1) DD yang ada dan lengkap 81 - 100
- 2) DD yang ada dan cukup lengkap 65 - 80
- 3) DD yang tidak atau kurang 50 - 64

c. Intake Siswa (IS)

IS adalah nilai yang diambil dari nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran yang sama atau sesuai dengan mata pelajaran yang ada.

Caranya: jumlah nilai mata pelajaran tertentu seluruh siswa dibagi dengan jumlah siswa. Hasil perhitungan yang diperoleh itulah nilai rerata kelas yang menjadi Intake Siswa.

Contoh: ada 10 siswa dalam satu kelas. Nilai mata pelajaran Fiqih mereka adalah: 75, 70, 69, 76, 82, 80, 70, 85, 72, dan 80. Maka jumlah nilai mata pelajaran tersebut untuk seluruh siswa adalah =

$$75 + 70 + 69 + 76 + 82 + 80 + 70 + 85 + 72 + 80 = \frac{759}{10}$$

= 75,9 Maka diketahui IS = 75,9 (dibulatkan 76)

d. Teknis menentukan KKM

Untuk menentukan KKM perlu ketelitian dan kecermatan. Tidak boleh hanya berdasarkan pada perkiraan. Penulis mencoba memaparkan simulasi dengan perhitungan di bawah ini sesuai dengan rumus:

- 1) Menentukan KKM Indikator adalah KI ditambah dengan DD ditambah dengan IS, kemudian hasil dari semua itu dibagi dengan 3 atau disederhanakan dengan persamaan berikut: $\frac{KI + DD + IS}{3}$

Contoh:

Diketahui:

$$KI = 73$$

$$DD = 62$$

$$IS = 76$$

$$73 + 62 + 76 = \frac{211}{3}$$
$$= 70,33$$

Berarti KKM Indikator = 70,33

Angka ini tidak dapat dibulatkan, maka KKM Indikator adalah 70.

- 2) Menentukan KKM KD = $\frac{\text{Total KKM Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$

Contoh: terdapat 4 KKM Indikator, yaitu: 70, 72, 73, dan 68

Perhitungannya:

$$\frac{70+72+73+68}{4} = \frac{283}{4} = 70,75$$

Maka, KKM KD adalah 70,75 (dibulatkan 71)

- 3) Menentukan KKM SK = $\frac{\text{jumlah total KKM KD}}{\text{jumlah KD}}$
- 4) Menentukan KKM Mapel = $\frac{\text{jumlah total KKM SK}}{\text{jumlah SK}}$

Cara mencari KKM SK adalah rata-rata KKM KD sampai ditemukan KKM Mata Pelajaran, seperti tabel berikut:

No	SK	KD	Indikator	KI	DD	IS	KKM Ind	KKM KD	KKM SK	KKM MP
1	SK1	KD1	Ind.1	78	70	76	75	72	73	
			Ind.2	75	70	76	74			
			Ind.3	70	65	76	70			
			Ind.4	68	65	76	70			
		KD2	Ind.1	81	70	76	76	73		
			Ind.2	73	70	76	73			
		Ind.3	65	68	76	70				
2	SK2	KD1	Ind.1							
			Ind.2							
			Dst....							

Setiap Kompetensi Dasar (KD) minimal memiliki tiga indikator yang mencakup indikator kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa dalam konteks pendidikan Islam (diniyah), ketiga aspek ini disejajarkan dengan konsep *ta'lim* (kognitif), *ta'dib* atau *tazkiyah* (afektif) dan *tarbiyah* (psikomotor). Dengan demikian setiap indikator jelas terukur dan diketahui ketercapaiannya, apakah sudah tuntas KD-nya atau belum. Jika belum tercapai SKM KD atau SKM SK, maka peserta didik harus mengikuti program *remedial teaching*.

C. Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan sebagai Sampel

Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan adalah suku Banjar yang sangat identik beragama Islam. Jarang sekali ditemukan orang Banjar yang beragama non-Islam. Orang Banjar juga dikenal religius. Maka tidak mengherankan jika di wilayah Kalimantan Selatan terdapat banyak sekali lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Lembaga-lembaga tersebut ada yang diselenggarakan secara formal maupun nonformal. Pendirian lembaga-lembaga tersebut sebagian besarnya merupakan inisiatif warga atau swadaya masyarakat. Keberadaan lembaga pendidikan agama di Kalimantan Selatan tetap tumbuh dan berkembang seperti halnya lembaga pendidikan Islam lainnya, baik yang berciri khas agama Islam (madrasah kurikulum negeri/kemenag), lembaga pendidikan kurikulum pendidikan diniyah, maupun pondok pesantren.

Berdasarkan data EMIS, lembaga pendidikan agama dan keagamaan Islam (PAKIS) yang ditangani Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016, seluruhnya berjumlah 582 buah yang tersebar pada 11 kabupaten dan 2 kota. Detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah PAKIS	Siswa	Guru
1	Banjarmasin	16	716	47
2	Banjarbaru	15	1.606	113
3	Banjar	137	12.047	889
4	Tapin	51	2.282	660
5	Hulu Sungai Selatan	21	2.382	159
6	Hulu Sungai Tengah	48	3.298	278
7	Hulu Sungai Utara	21	1.866	138
8	Balangan	16	723	42
9	Tabalong	12	764	86
10	Tanah Laut	63	4.115	377
11	Tanah Bumbu	13	682	89

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah PAKIS	Siswa	Guru
12	Pulau Laut (Kotabaru)	49	3.640	267
13	Barito Kuala	120	8.656	546
	Jumlah	582	42.777	3.691

Diketahui dari tabel di atas, bahwa pendidikan agama dan keagamaan tersebar ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang berjumlah 582 buah. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut belum banyak tergarap dalam penelitian ilmiah yang berkontribusi untuk kemajuan lembaga tersebut. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Azyumardi Azra, bahwa kajian-kajian Islam di Kalimantan Selatan hanya terpaku pada sejarah masuknya Islam di wilayah ini. Hampir-hampir tidak ditemukan pembahasan khusus secara mendalam terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga Islam dan tradisi ilmiah di kalangan masyarakat muslim di sana.³³ Dalam rangka menjawab itulah, maka buku ini hadir di tengah pembaca sekalian.

Memang disadari bahwa penelitian tentang keislaman di Kalimantan Selatan lebih banyak menilik aspek sejarah. Terkait dengan sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan dan ulasan tentang profil tokoh-tokoh ulama terkemuka dan kharismatik. Sementara kajian tentang lembaga pendidikan Islam dirasakan masih kurang. Jikapun ada, biasanya penelitian tersebut banyak dilakukan untuk mengulas sejarah lembaga pendidikan Islam. Misalnya pondok pesantren tertua. Sebagian besar penelitian tersebut cenderung deskriptif. Sehingga masih sangat kurang pada penelitian yang berorientasi pada pembuatan produk yang bertujuan untuk kemajuan lembaga pendidikan keagamaan Islam khususnya pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan.

Bagaimanapun, melihat banyaknya lembaga pendidikan Islam di provinsi ini sudah menunjukkan potensi besar yang dapat disumbangkannya bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

³³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII : Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Kencana, 2004).

D. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Diniyah di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam di Kalimantan Selatan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Zainal Ilmi selaku kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Istiqamah Banjarmasin, diketahui bahwa sebagian besar guru dan pengelola lembaga pendidikan tingkat wustha melaksanakan kurikulum yang sudah ada selama bertahun-tahun, tanpa melakukan revisi kurikulum. Kurikulum (khususnya penggunaan kitab-kitab klasik/kuning) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dewan guru dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia (guru). Pada umumnya, kurang diperhatikan dan dipertimbangkan kesesuaian atau relevansi kurikulum tersebut untuk peserta didik dan harapan masyarakat. Jika ada masukan dari masyarakat terkait dengan isi kurikulum, maka perubahan akan dilakukan secara insidental. Artinya perubahan tersebut tidak permanen tertulis dalam bentuk dokumen, sehingga untuk selanjutnya kembali lagi kepada kitab yang ada.³⁴

Atas pertimbangan kondisi tersebut, maka penulis merasa penting menyumbangkan pemikiran untuk merancang kembali (*redesign*) kurikulum pendidikan diniyah yang ada, khususnya pada tingkat wustha di Kalimantan Selatan. Tujuannya adalah agar lembaga pendidikan tersebut memiliki kurikulum yang terorganisir, berdasarkan komponen kurikulum sehingga kurikulum yang diberikan kepada santri sesuai dengan karakteristik santri dan harapan masyarakat.

³⁴ Zainal Ilmi, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Istiqamah Banjarmasin, Kurikulum Pondok Pesantren Al-Istiqamah Kalimantan Selatan, 9 Februari 2015.

BAB VIII

NEEDS ASSESSMENT DALAM MENDESAIN KURIKULUM DINIYAH DI KALIMANTAN SELATAN

Studi lapangan merupakan dasar dalam penelitian *R&D*, terutama dalam rangka mendesain kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha yang menggunakan pendekatan *grassroots*. Data yang berasal lapangan disebut juga dengan *needs assessment*. Hasil dari *needs assessment* yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan diniyah merupakan suatu keniscayaan atau keharusan.

Objek lapangan yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian untuk keperluan mendesain kurikulum ini adalah 5 buah Pondok Pesantren (PP). Pondok Pesantren- pondok pesantren tersebut adalah: Pondok Pesantren Rasyidah Khalidiyah Amuntai, Pondok Pesantren Al-Istiqamah Banjarmasin, Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, Pondok Pesantren Darul Istiqamah Barabai, dan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura. Hasil dari *needs assessment* atas 5 Pondok Pesantren tersebut dijabarkan di bab ini dengan detail.

A. Visi-Misi dan Tujuan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan

Data yang disajikan di bab ini adalah sesuai dengan permasalahan yang diteliti atau berdasarkan pada fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dimulai dari visi, misi, motto, tujuan lembaga, dan kurikulum yang dipakai oleh beberapa lembaga pendidikan keagamaan di Kalimantan Selatan. Selain itu, juga disajikan tentang pelaksanaan kurikulum diniyah di lembaga pendidikan tersebut, dan pandangan pihak-pihak yang terkait terhadap penyelenggaraan

kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan.

1. Visi dan Misi Lembaga Pendidikan Diniyah tingkat Wustha (MTs NIPA) Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai

a. Visi

Menjadi pusat pembinaan pribadi shaleh dan muslih serta menjadi *imâmul muttaqîn* yang memahami, akrab dan terbiasa dengan nilai-nilai Islam dan mampu menghadapi tantangan kehidupan global.

b. Misi

Misi merupakan sarana untuk mewujudkan visi, yaitu:

- 1) Mengantarkan santri memiliki kemantapan aqidah dan kedalaman spritual, keluhuran akhlak, keluasaan ilmu, dan kemandirian.
- 2) Memberikan pelayanan terhadap penggalan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu tentang Islam, teknologi, dan kesenian.
- 3) Memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam, dan budaya luhur bangsa Indonesia.

Melihat visi dan misi MTs NIPA di atas, nampak bahwa pihak lembaga pendidikan ini lebih menekankan pada pembentukan individu santri yang shaleh dan muttaqin. Semangat menanamkan aqidah dan keluhuran akhlak dijadikan sebagai modal dasar dalam menghadapi era globalisasi dan informasi saat ini.

c. Tujuan dan Motto

Tujuan MTs NIPA adalah menyiapkan para santri yang *tafaqquh fi ad-dîn*. Sementara mottonya adalah IN'AM yang merupakan singkatan dari *'ilmu, nizhâm, 'amal, dan muslim*. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Kepala MTs NIPA yang menyebutkan demikian.

IN'AM yang dimaksud untuk mempertegas atau mendorong supaya visi dan misi dapat lebih terealisasi secara optimal. Sehingga motto tersebut selalu ditanamkan kepada setiap warga pondok pesantren, khususnya santri dan *stakeholders* MTs NIPA Amuntai.

2. Visi dan Misi Lembaga Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha (MTs Darul Istiqamah Putra) Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai

a. Visi

Visinya adalah "BERIMAN, BERPRESTASI, dan TERAMPIL".

Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Patuh menjalankan agama.
- 2) Berprestasi dalam mencapai nilai mata pelajaran.
- 3) Berprestasi dalam kegiatan dan lomba yang bernuansa Islami, dan
- 4) Terampil berbahasa Arab dan Inggris.

Berdasarkan visi di atas, nampak bahwa lembaga pendidikan ini mengembangkan santri yang memiliki keimanan yang mantap, berprestasi dalam berbagai aspek, dan juga terampil dalam berbahasa secara lisan, baik Bahasa Arab maupun Bahasa Inggris.

b. Misi

Misi di lembaga pendidikan keagamaan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkembangkan disiplin santri dalam menjalankan ajaran agama Islam dengan membentuk lingkungan yang religius.
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran secara efektif, sehingga santri mampu menyerap materi yang disajikan.

- 3) Melaksanakan latihan dan bimbingan terhadap santri yang memiliki potensi seni yang bernuansa Islami.
- 4) Melaksanakan kegiatan yang mendorong dan membantu santri dalam mengembangkan keterampilan berbahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris).

Lembaga pendidikan keagamaan ini bertujuan memberikan kontribusi dalam upaya mencerdaskan bangsa demi terciptanya generasi Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selain itu, visi dan misi di atas dimaksudkan agar santri tidak hanya terampil dalam bidang keagamaan namun juga terampil dalam berbahasa Arab dan Inggris secara lisan.

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darul Ilmi Landasan Ulin Barat Banjarbaru

Pondok Pesantren Darul Ilmi memiliki tiga jenjang pendidikan dan enam jenis pendidikan, yaitu:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur`an (TPA)
- b. Madrasah Tsanawiyah Salafiyah (kurikulum pendidikan diniyah wustha)
- c. Madrasah Aliyah Salafiyah (kurikulum pendidikan diniyah tingkat *'ulya*)
- d. Madrasah Ibtidaiyah Plus
- e. Madrasah Tsanawiyah Afiliasi (kurikulum Kemenag)
- f. Madrasah Aliyah Afiliasi (kurikulum Kemenag)

Dari keenam jenis pendidikan tersebut, hanya Madrasah Tsanawiyah Salafiyah (kurikulum pendidikan diniyah tingkat *wustha*) yang menjadi objek penelitian penulis. Meskipun di pesantren ini memiliki tiga jenjang dan jenis pendidikan, namun

hanya memiliki satu visi dan misi yang sama semuanya, yakni visi-misi pondok pesantren.

a. Visi Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru

Mempersiapkan peserta didik yang ahli dalam bidang agama Islam serta memiliki wawasan yang cukup terhadap IPTEK dengan landasan IMTAQ yang mantap.

b. Misi Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, yaitu:

- 1) Mendidik santri terampil serta menguasai ilmu *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah* yang mengakar di masyarakat.
- 2) Mandidik santri ahli dalam bidang ilmu fiqih Islam.
- 3) Mendidik santri terampil pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Mendidik santri agar memiliki *skill* hidup dan berakhlak mulia.

Visi dan misi di pondok ini lebih menekankan pada kepada penguasaan ilmu agama dan berusaha memadukan dengan IPTEK. Selain itu juga berorientasi pada kemaslahatan umat (masyarakat).

4. Visi dan Misi Lembaga Pendidikan Diniyah Wustha) Pondok Pesantren Al-Istiqamah Banjarmasin

Pondok pesantren ini beralamat di Jalan Pekapuran Raya RT. 23 No. 01 Kelurahan Pemurus Baru Banjarmasin. Pondok Pesantren ini juga telah memiliki visi dan misi.

a. Visi

Terciptanya santri yang beriman, berilmu, dan berakhlak karimah yang menjadi pemimpin informal di masyarakat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan program pengamalan nilai-nilai keimanan, dan ketakwaan, dan *akhlâqul karîmah*.
- 2) Meningkatkan keterampilan santri untuk terjun di masyarakat.

- 3) Meningkatkan potensi akademik santri, sehingga mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Visi dan misi pada Pondok Pesantren Al-Istiqamah Banjarmasin selain membentuk santri yang berilmu, berakhlak mulia, juga lebih berorientasi melahirkan ulama yang sanggup memimpin masyarakat dalam keberagaman.

5. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Cindai Alus Martapura

Pondok Pesantren ini beralamat di Batung, Desa Cindai Alus RT.01 RW.02 Martapura. Pondok Pesantren ini menyelenggarakan dua jenjang pendidikan, yaitu: Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Tsanawiyah/Wustha, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Aliyah/'Ulya.

a. Visi

Terwujudnya insan yang beriman, beramal sholeh, bertakwa, istiqomah, berwawasan luas, unggul dan berprestasi.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan lembaga pendidikan Islam yang bermutu, profesional berkeeseimbangan, asri, sejahtera, dan berorientasi ke depan.
- 2) Mengembangkan pola pendidikan kader umat yang mandiri, terampil, berkarakter ilmiah, dan uswah mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Menyiapkan kader umat yang dapat melanjutkan studinya ke pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bakat dan profesi yang diminati.

Berdasarkan pada 5 buah lembaga pendidikan keagamaan di atas, nampak bahwa semuanya sudah memiliki visi dan misi. Di mana visi dan misi itu dapat dijadikan sebagai arah yang dituju dalam membawa kemajuan lembaga pendidikan tersebut ke masa depan yang lebih baik dari keadaan saat ini.

B. Pelaksanaan Kurikulum Diniyah di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam

1. Perencanaan/Persiapan Pendidikan Kurikulum Diniyah

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil penulis himpun di lapangan, terdapat beberapa perbedaan antara satu lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan lembaga pendidikan keagamaan Islam lainnya dalam hal mengadopsi kurikulum pendidikan diniyah maupun jumlah mata pelajaran diniyah dan cara penyajiannya. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Hal ini dikarenakan pihak pengelola pendidikan (yayasan) tidak mendapatkan asistensi dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) dalam memberikan arahan, bimbingan dan bantuan dalam menentukan kurikulum diniyah. Bahkan Kemenag sendiri tidak memiliki pedoman umum tentang kurikulum pendidikan diniyah. Demikian informasi yang diperoleh dari wawancara kepada kelima pengelola lembaga.

Di MTs NIPA, mereka berinisiatif di setiap tahunnya untuk memulai pembelajaran dengan mengadakan rapat seluruh unit (semua jenjang). Yayasan mempunyai gambaran bahwa di diniyah mereka harus menggunakan beberapa kitab tertentu. Dengan demikian, terjadi sinkronisasi dan berkelanjutan.

Sementara pondok pesantren yang lain ada yang mengadopsi kurikulum pendidikan diniyah dari pulau Jawa. Misalnya kurikulum di pondok Jawa Timur terutama kurikulum Gontor. Mereka mengambil standar *Qiraatul Kutub*. Meskipun adopsi yang dilakukan tidak mutlak sama. Misalnya jika di Gontor harus diajarkan sebanyak 4 jam, maka di lembaga ini paling (maksimal) hanya mengambil 2 jam saja. Hal ini dilakukan karena di lembaga mereka ada kurikulum negeri (kurikulum kemenag) yang harus mendapat perhatian.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan diniyah di beberapa pondok pesantren. Sebagian besar mereka tidak memiliki silabus yang terorganisir. Hanya ada sebagian kecil yang memiliki silabus dan RPP dalam persiapan pembelajaran mata pelajaran diniyah di pondok pesantren. Hal ini terungkap dari hasil dokumen

yang ada dan pengakuan ustadz dan ustadzah. Untuk kurikulum negeri ada memiliki RPP, namun untuk kurikulum diniyah mereka tidak memiliki RPP. Hanya ditetapkan batas materi pelajaran yang ada di buku (kitab) pegangan. Misalnya, *Ulumul Lughah* harus habis di kelas 1, yang diatur oleh guru masing-masing dan tidak ada aturan tertulis terkait dengan batas pelajaran ini.

Ada juga guru yang menetapkan batas pelajaran sesuai dengan bahasan dan waktu yang ada. Satu atau dua halaman dibatasi. Kemudian minggu berikutnya (pertemuan berikutnya), materi yang kurang jelas bisa diulang lagi atau disambung/melanjutkan pembahasan. Kendati demikian, ada juga terdapat lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memiliki silabus dan RPP yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Pembuatan silabus dan RPP dilaksanakan di awal tahun ajaran sebelum anak (santri) masuk sekolah. Selama 4 hari hingga sepekan guru ditatar atau dilatih untuk pembuatan RPP dan silabus, khusus untuk mata pelajaran pondok (diniyah). Karena untuk pelajaran yang umum sudah dilaksanakan di MGMP masing-masing kabupaten.

Kepala Madrasah Tsanawiyah NIPA menegaskan bahwa mereka juga memiliki silabus dan RPP yang digunakan oleh ustadz dan ustadzah yang memegang mata pelajaran diniyah. Terlebih untuk kepentingan akreditasi.

Pada Pondok Pesantren Rasyidah Khalidiyah, meskipun pihak yayasan mengadopsi kurikulum dari luar atau dari Pondok Pesantren Gontor, namun mereka tidak 100% persis sama menerapkan kurikulum tersebut. Melainkan mereka menyesuaikan dengan kondisi setempat baik dengan pertimbangan sumber daya manusia (ustadz dan santri) maupun kultur masyarakat Kalimantan Selatan. Pada kondisi tertentu, misalnya santri yang muallaf, kondisi siswa tersebut mengharuskan pihak Pondok Pesantren untuk memberikan program tambahan karena kemampuan dasar pendidikan agamanya masih minim.

Lain lagi dengan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Kepala sekolah mengemukakan bahwa pada dasarnya mereka memahami apa yang menjadi kehendak (kemauan) masyarakat, terutama tradisi ibadah tarawih. Dalam hal ini mereka menerapkan shalat tarawih yang 20 rakaat dan shalat subuh berdo'a qunut. Mereka lebih cenderung mengikuti kebiasaan mayoritas masyarakat. Adopsi kurikulum dari Gontor hanya Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan kedisiplinan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Contoh lain dari penyesuaian adopsi kurikulum Gontor dengan pertimbangan kemampuan santri adalah misalnya dulu pernah diajarkan *Târîkh Âdâb al-Lughah*. Sementara ternyata kompetensi untuk kitab ini bukan untuk taraf anak, melainkan untuk yang jurusan Tadris Bahasa Arab. Maka kemudian dalam menyikapi ini, dihilangkanlah pelajaran tersebut. Selain itu juga pernah diajarkan *Muqâranah al-Adyân*, yang kondisinya sama dengan *Târîkh Âdâb al-Lughah*.

Jadi, benar jika disebut pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan berkiblat ke Gontor, hanya saja semuanya disesuaikan dengan kemampuan. Kalau untuk mata pelajaran pondok itu ada 2, yaitu: *Dirâsah Lughawiyah* dan *Dirâsah Islâmiyah*. Kalau *Dirâsah Lughawiyah* itu ada *Tamrîn al-Lughah*, *Imla'*, *Mahfuzhât*, *Nahwu*, dan *Sharaf*. Sedangkan *Dirâsah Islâmiyah*, ada *Fiqih*, *Usul Fiqih*, *Faraidh*, dan *Târîkh Islâm*.

Berdasarkan paparan di atas yang diperoleh dari data wawancara, maka dapat dikatakan bahwa untuk isi (*content*) kurikulum diniyah di lembaga pendidikan keagamaan di Kalimantan Selatan sebagian mengadopsi kurikulum Pondok Pesantren Gontor dengan melakukan revisi dan modifikasi. Dalam artian bahwa kurikulum diniyah yang diadopsi tidak 100% dapat diterapkan di lembaga pendidikan diniyah. Akan tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi *input*, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana lainnya.

2. Tujuan Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan

Seyogyanya setiap kurikulum harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dapat memberikan arah dalam proses pembelajaran dan penilaian. Harapannya adalah bahwa tujuan pembelajaran pada kurikulum pendidikan diniyah dapat dicapai secara optimal. Namun, tidak semua lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan memiliki tujuan kurikulum yang tertulis.

Ada sebagian kecil lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memiliki silabus, tentu mereka sudah memiliki tujuan pembelajaran yang jelas untuk masing-masing mata pelajaran diniyah. Namun, tidak sedikit pondok pesantren dan pendidikan diniyah tidak memiliki silabus. Mereka hanya mencantumkan kitab-kitab yang diajarkan di lembaga pendidikannya sebagai kurikulum pendidikan diniyah. Hal ini menyebabkan tenaga pengajar (ustadz dan ustadzah) tidak memiliki persepsi yang sama mengenai tujuan pembelajaran dari kitab yang disampaikan kepada santri-santri mereka.

Terkait dengan standar (tujuan) kurikulum, salah satu pengajar mengemukakan bahwa misalnya mengenai materi Qur'an, maka santri harus hafal juz Amma. Hapalan Juz 'Amma itu menjadi wajib. Sedangkan hapalan surah-surah pilihan, ditawarkan ada 4 surah. Yaitu Surah Sajadah, al-Muluk, al-Waqi'ah dan Surah Yâsin.

Kemudian terkait dengan pelajaran Tauhid, salah satu guru mengemukakan bahwa tujuan dari pembelajaran tauhid adalah supaya santri bertambah yakin akan adanya Allah Swt. Masing-masing mata pelajaran ada tujuannya, tetapi tidak tertulis. Pada kasus seperti ini lalu penulis menawarkan diri untuk membuat form yang diisi oleh guru-guru tentang tujuan mata pelajaran yang mereka ampu. Responden bersedia mengisinya terutama untuk guru-guru junior.

Berdasarkan pengamatan penulis, sewaktu ustadz menyampaikan pembelajaran materi sejarah pada mata pelajaran Tarikh Islam ustadz tidak ada menyampaikan tujuan pembelajaran

terhadap materi yang dibahas. Guru membuka pembelajaran, hanya membawa kitab tidak terlihat membawa semacam RPP, lalu membacakan isi kitab atau sesekali guru meminta santri untuk membacakan kitab, sementara santri-santri yang lainnya mendengarkan dan men-*dabit* penjelasan ustadz terkait dengan apa yang dibaca tadi. Sewaktu santri membaca kitab, ustadz terkadang membetulkan bacaan santri terhadap kitab yang dibaca. Jadi, kebanyakan kurikulum pendidikan diniyah yang terdapat di lembaga pendidikan keagamaan Islam tidak mempunyai tujuan kurikulum yang tertulis.

3. Isi Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan

Kurikulum pendidikan diniyah pondok pesantren di Kalimantan Selatan sangat beragam. Ada yang berdiri sendiri sebagai kurikulum diniyah yang disajikan dengan waktu belajar khusus pagi atau sore hari. Ada pula yang kurikulumnya disajikan bersamaan dengan kurikulum umum atau kurikulum Kemenag. Untuk yang kedua ini, kurikulum pendidikan diniyah disediakan waktu di sela-sela waktu belajar kurikulum umum atau kurikulum Kemenag. Selain itu, ditemukan beberapa perbedaan tentang jumlah mata pelajaran kurikulum pendidikan diniyah yang ditawarkan. Termasuk kitab/literatur yang menjadi pegangan dan rujukan ustadz dan santri.

Dengan demikian semakin jelas bahwa isi kurikulum pendidikan diniyah di beberapa lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan tidak ada keseragaman. Ketidakeragaman tersebut diidentifikasi dari jumlah mata pelajaran, kitab-kitab yang diajarkan dan yang menjadi rujukan, beban belajar atau jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh santri maupun keluasaan ruang lingkup (*scope*), dan urutan penyajiannya (*sequence*). Bahkan keberlanjutan mata pelajaran (kitab) tersebut untuk kelas berikutnya tidak ada keseragaman.

Distribusi Mata Pelajaran Diniyah pada MTs NIPA Amuntai

No	Tingkat Kelas	Jumlah Mata Pelajaran	Jumlah Jam/Minggu
1	Kelas I	12 Mata Pelajaran	18 Jam/Minggu
2	Kelas II	14 Mata Pelajaran	19 Jam/Minggu
3	Kelas III	11 Mata Pelajaran	16 Jam/Minggu

Kurikulum pendidikan diniyah di lembaga ini disajikan pada pagi hari dan menyatu dengan kurikulum Kemenag. Namun, penekanannya lebih kepada kurikulum pendidikan diniyah. Hal ini terlihat dari tabel di atas yang mengindikasikan lebih dari separuh kurikulumnya adalah kurikulum pendidikan diniyah.

Distribusi Mata Pelajaran Diniyah Pada Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru

No	Tingkat Kelas	Jumlah Mata Pelajaran	Jumlah Jam/Minggu
1	Kelas I	9 Mata Pelajaran	22 Jam/Minggu
2	Kelas II	13 Mata Pelajaran	25 Jam/Minggu
3	Kelas III	15 Mata Pelajaran	25 Jam/Minggu

Pada madrasah ini, kurikulum diniyah (pondok) disajikan khusus pada pagi hari. Sementara kurikulum Kemenag disajikan pada sore hari. Kemudian malam hari dan hari libur dilanjutkan kegiatan ekstra kurikulum diniyah, seperti: membaca al-Qur'an, *Maulid al Habsyi*, dan Kaligrafi.

Distribusi Mata Pelajaran Diniyah pada Madrasah Diniyah Tingkat Wustha di Pondok Pesantren Al-Istiqamah Banjarmasin

No	Tingkat Kelas	Jumlah Mata Pelajaran	Jumlah Jam/Minggu
1	Kelas I	15 Mata Pelajaran	24 Jam/Minggu
2	Kelas II	14 Mata Pelajaran	25 Jam/Minggu
3	Kelas III	Belum ada santrinya	

Pada Pondok Pesantren Al-Istiqamah Banjarmasin, memang secara khusus menyelenggarakan pendidikan diniyah. Mulai tingkat Awaliyah (4 tahun) dan tingkat Wustha (3 tahun), kendati belum ada kelas 3 Wustha. Kurikulum negeri dari Kemenag disajikan pada pagi hari.

Distribusi Mata Pelajaran Diniyah Pada MTs Pondok Pesantren Darul Istiqamah Barabai

No	Tingkat Kelas	Jumlah Mata Pelajaran	Jumlah Jam/Minggu
1	Kelas I	7 Mata Pelajaran	14 Jam/Minggu
2	Kelas II	9 Mata Pelajaran	18 Jam/Minggu
3	Kelas III	6 Mata Pelajaran	12 Jam/Minggu

Kurikulum pendidikan diniyah pada Madrasah Tsanawiah Pondok Pesantren Darul Istiqamah Barabai mengadopsi kurikulum Gontor. Penyajian kurikulumnya menyatu dengan kurikulum lainnya dan dilaksanakan pada pagi hari. Sama seperti sistem persekolahan pada umumnya.

Distribusi Mata Pelajaran Diniyah Tingkat Wustha atau Sederajat Pada Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura

No	Tingkat Kelas	Jumlah Mata Pelajaran	Jumlah Jam/Minggu
1	Kelas I	11 Mata Pelajaran	26 Jam/Minggu
2	Kelas II	15 Mata Pelajaran	27 Jam/Minggu
3	Kelas III	13 Mata Pelajaran	19 Jam/Minggu

Pada Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri Martapura terdapat jenjang SMP dan SMA dengan kurikulum pendidikan diniyah. Untuk kurikulum diniyahnya sendiri mengacu kepada kurikulum Pondok Pesantren Gontor. Sementara kurikulum negerinya mengacu kepada Kemendikbud. Penyajian kurikulumnya menjadi satu dan dilaksanakan pada pagi hingga sore hari, bahkan hingga malam hari, terutama kegiatan amaliyah pondok (ekstrakurikuler pondok).

Terkait dengan struktur kurikulum pendidikan diniyah di pondok pesantren ini, apakah mengandung prinsip berkelanjutan atau tidak. Diketahui bahwa mereka menggunakan prinsip berkelanjutan. Misalnya di kelas SMP (tingkat wustha). Untuk Fiqih kelas 7 adalah Fiqih karangan Imam Zarkasyi, kelas II *Fiqh al-Wâdhih juz awwâl* (jilid I), kemudian kelas III *Fiqh al-Wâdhih juz tsani* (jilid 2), dan di kelas III baru masuk *Ushul Fiqh*. Artinya, kurikulum pendidikan diniyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri Martapura ini sudah memperhatikan prinsip kesinambungan dalam penyajian materi kurikulum diniyah.

4. Pelaksanaan Program Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Diniyah di Kalimantan Selatan

Program merupakan suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebuah program harus melalui perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau faktor agar suatu kegiatan dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun tentang program pembelajaran kurikulum diniyah pada beberapa lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan, program pembelajaran kurikulum mereka nampak sangat variatif. Intinya bertujuan untuk mencetak generasi Islam yang berilmu, beramal dan berakhlak mulia.

Pelaksanaan program pembelajaran materi diniyah adalah baik secara klasikal. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas (intra kurikuler), sebagian lembaga sudah membuat rencana pembelajaran (RPP). Walaupun masih ada lembaga pendidikan diniyah yang melaksanakan pembelajaran tidak menggunakan perencanaan pembelajaran secara tertulis, tetapi hanya menetapkan batas materi pelajaran di buku pegangan. Seperti Ulumul Lughah harus habis di kelas 1. Ketentuan itu diatur oleh guru masing-masing dan tidak tertulis. Contoh lain adalah pada mata pelajaran Fiqih. Untuk kelas I, sistemnya tidak diberikan penjelasan (tidak diberitahukan batasnya), santri harus hafal. Target kitab fiqih adalah mulai dari

wudhu, shalat, bacaannya dan kayfiyatnya (praktek tatacaranya). Dengan demikian selain hafalan, sekaligus juga dituntut untuk praktik. Jadi sistemnya untuk kelas satu seperti itu. Kalau kelas 2 baru diberikan pemahaman dan target ada masing-masing guru.

Selain kegiatan intra, di lembaga pendidikan keagamaan Islam juga terdapat kegiatan tambahan (ekstrakurikuler) yang dilaksanakan pada sore dan malam hari termasuk hari libur. Selain itu, ada program khusus yang bagi santri yang bukan berlatar belakang dari madrasah atau mereka yang memiliki keterbatasan dalam bahasa Arab atau kurang lancar membaca al-Qur'an, mereka diberikan pelajaran tambahan (program les).

Terkait dengan durasi pembelajaran untuk kurikulum pendidikan diniyah yang diberikan setiap harinya, salah seorang ustadz menginformasikan bahwa jika pagi berlangsung sekitar 35 menit. Jumlah fak disesuaikan dengan tingkat pendidikan/kelas. Misalnya kelas yang awal (kelas I) vak pondoknya mungkin agak lebih banyak. Kalau tingkat atau level yang agak tinggi, mungkin agak berkurang.

Kemudian pendapat kepala madrasah mengenai pelaksanaan kurikulum pendidikan diniyah di lembaganya, diketahui bahwa total keseluruhan vak selama 1 minggu itu 50 jam. Di dalam itu ada memuat kurikulum negeri (kurikulum kemendikbud) sebagian dan ada yang pondok (diniyah). Jadi senantiasa diatur agar *balance* (seimbang). Tetapi struktur mata pelajaran negeri cuma sekitar 10-12 mata pelajaran dan sisanya itu adalah mata pelajaran pondok (diniyah). Alokasi waktunya tetap 50 jam satu minggu, sedangkan jadwalnya campur aduk. Bisa dalam satu hari itu ada Matematika, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Semua terintegrasi.

Jadi, program pembelajaran sebanyak 50 jam pelajaran perminggu. Setiap harinya disajikan mata pelajaran sekitar 9 jam. Selama 9 jam pelajaran tersebut pelajaran disajikan bercampur, ada kurikulum umum dan kurikulum pendidikan diniyah.

Program ekstrakurikuler di lembaga keagamaan merupakan suatu keniscayaan. Sebab pada program intra, kesempatan santri

untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuannya terbatas waktu. Oleh karena itu, pihak yayasan atau pondok memfasilitasinya dengan berbagai program ekstra kurikuler, seperti yang telah dipaparkan pada paparan kurikulum diniyah di atas. Misalnya adalah kegiatan latihan berpidato (*muhadharah*).

Kegiatan *muhadharah* itu dimasukkan sebagai jam pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang berlangsung satu kali di setiap pekan. Misalnya setiap hari hari Sabtu. Terkait dengan penilaian, ada nilai tersendiri untuk kegiatan *muhadharah* yang diberikan oleh wali kelas. Setiap wali kelas akan masuk ke kelasnya di hari Sabtu.

Salah satu tenaga pengajar di pondok lain menyatakan bahwa di lembaga mereka ada pidato tiga bahasa (*muhadharah*), pencak silat, pramuka, dan main bola. Semuanya diwajibkan bagi santri.

Pada umumnya kegiatan ekstrakurikuler pendidikan diniyah dilaksanakan pada sore hari dan malam hari. Bahkan ada sebagian santri yang ingin memperdalam pengetahuan agamanya secara mandiri dengan mengunjungi *mu'allim* (ustadz) melalui pembelajaran privat. Keinginan para santri inipun masih dilayani oleh pihak pengelola lembaga. Ada juga guru, misalnya mata pelajaran fiqih yang menawarkan kepada santri jika ingin memperdalam lagi, dipersilakan datang ke rumah. Kemudian para santri yang berminat mempuat grup/tim untuk memperdalam tersebut. Misalnya terdiri atas 10 atau beberapa orang.

Ada pula program khusus kurikulum pendidikan diniyah untuk melayani perbedaan penguasaan santri terhadap pendidikan agama. Misalnya dari guru BATAQU (Baca Tulis al-Qur'an). Karena tidak semua santri dapat menghabiskan bacaan atau hapalan juz 'Amma. Oleh karena itu, guru tersebut harus melakukan monitoring atau pengawasan. Jika ada yang tidak mampu menghabiskan, misalnya karena santri tersebut adalah muallaf. Maka, perlu dipahami bahwa dia perlu beradaptasi secara perlahan sehingga perlu mendapat waktu tambahan. Penambahan waktu belajarpun memang atas

inisiatif orang tuanya yang menyarankan siap membayar atas belajar tambahan ini. Waktunya bisa sore atau setelah Maghrib.

Ada pula program khusus amaliyah pagi sebelum masuk kelas dan ini dikonsentarkan di satu tempat seperti masjid pondok. Kegiatan amaliyah pagi ini disosialisasikan dulu ketika pendaftaran santri. Bahwa sebelum pelajaran dimulai di jam 07.30, maka di jam 07.10 santri sudah bersiap untuk kegiatan amaliyah pagi. Amaliyah pagi diisi dengan *yasinan*, *shalawat kamilah* kemudian dilanjutkan dengan *tausiah*. Kegiatan amaliyah ini juga merupakan salah satu trik (usaha) pengelola lembaga untuk mengantisipasi keterlambatan guru. Jika ada hal tertentu yang menyebabkan mereka terlambat.

Selain paparan di atas, ada pula pondok yang memberikan program tambahan selama 3-6 bulan bahkan sampai 1 tahun sebelum dapat diterima di kelas I tingkat *wustha*. Hal ini dikarenakan calon santri tersebut memiliki dasar pengetahuan Bahasa Arab dan kemampuan membaca al-Qur'an masih minim. Program tersebut sering disebut dengan program percobaan atau *tajrîbiyah*. Jika santri tersebut berhasil, maka ia dapat diterima di kelas I tingkat *wustha*.

5. Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum Pendidikan Diniyah di Kalimantan Selatan

Ketercapai sebuah kurikulum tidak dapat diketahui kalau tidak dilaksanakan evaluasi (pengukuran dan penilaian). Begitu juga halnya dengan kurikulum pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi kurikulum pendidikan diniyah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan masing-masing adalah setiap lembaga pendidikan memiliki kebijakan sendiri dan memiliki kekhasan masing-masing.

Pelaksanaan kurikulum pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan memiliki dinamika tersendiri sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan keagamaan Islam tersebut. Namun secara umum evaluasi kurikulum pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan terbagi kepada tiga jenis evaluasi, yaitu tertulis, lisan dan praktik

(*performance*). Hal tersebut sesuai dengan sifat materi keagamaan Islam (pendidikan diniyah) yang mengandung iman, ilmu dan amal.

Bagaimana pelaksanaan evaluasi kurikulum tersebut? Berdasarkan informasi wawancara diketahui bahwa evaluasi yang diselenggarakan berupa *tahrîry* (tertulis), *syafâhi* (ujian lisan), dan praktik. Evaluasi ini dilangsungkan setiap enam bulan sekali.

Selanjutnya pendapat lain yang menyebutkan bahwa evaluasi mereka lakukan secara *syafâhi* (ujian lisan) dan *tahrîry* (tertulis). Khusus untuk kelas 3. Dikarenakan mereka akan menghadapi ujian nasional, maka ujian pondoknya didahulukan.

Ujian *syafâhi* (ujian lisan) ini biasanya berupa hapalan. Pelaksanaan ujian lisan ini adalah ada beberapa santri menunggu di luar kelas. Kemudian mereka dipanggil masuk ke dalam kelas oleh ustadznya satu persatu secara bergiliran. Santri yang masuk tersebut kemudian ditanya secara lisan atau secara *face to face*. Sementara pintu kelas ditutup rapat. Ujian lisan tersebut diperkirakan berlangsung sekira 15-20 menit per santri.

Sementara kegiatan ujian praktik dilakukan langsung kepada santri untuk keterampilan keagamaan. Untuk kurikulum negeri (Kemenag) sesuai dengan K.13 yang dilangsungkan secara modern. Sedangkan untuk kurikulum pondok masih menggunakan metode tradisional. Misalnya ketika santri sudah diberikan materi cara memandikan mayit, maka 1 atau 2 orang santri akan diminta praktik ke depan. Contoh lain adalah ilmu tajwid. Ketika sudah dicontohkan hukum bacaan atau cara bacanya, maka kemudian santri diminta untuk menyebutkan kembali.

Terkait dengan pelaksanaan evaluasi yang telah dipaparkan di atas, meskipun diselenggarakan dengan cara yang sama, namun masih ada perbedaan pada bentuk soal yang dibuat dalam evaluasi pembelajaran kurikulum pendidikan diniyah. Menurut salah satu ustadz yang mengajar kurikulum pendidikan diniyah mengemukakan bahwa di lembaganya, soal tertulis berjumlah 10 soal yang berupa abc (pilihan ganda), 10 menjodohkan, dan 5 soal

berupa essay. Dalam pembuatan soal tersebut, perlu koordinir yang baik atau berembug dengan bagian pendidikan dan pengajaran.

Dengan demikian diketahui bahwa ada lembaga pendidikan keagamaan Islam tertentu yang cukup baik dalam hal administrasi dan manajemen. Karena ada koordinasi dari bagian pendidikan dan pengajaran, sehingga ada keseragam bentuk soal dan konten (isi) dari soal tersebut. Selain itu, ada juga *team teaching*. Jadi meskipun berbeda pengajar, akan ada keseragaman pada soal.

Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi kurikulum pendidikan diniyah di lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan secara umum menggunakan 3 jenis evaluasi, yaitu: 1) *Tahrîry* (evaluasi tertulis), 2) *Syafâhi/syafâwi* (evaluasi lisan), dan 3) ulangan praktik (evaluasi kinerja).

C. Pandangan Pimpinan Pondok, Ustadz/Ustadzah, dan Stakeholders Lainnya Terhadap Kurikulum Pendidikan Diniyah yang Berlaku

Pelaksanaan kurikulum selalu terkait berbagai pihak baik secara langsung seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya, maupun secara tidak langsung terutama orang tua wali murid siswa, masyarakat, birokrat, pengusaha dan pihak yang mempunyai kepedulian kepada madrasah/sekolah. Pihak-pihak tersebut turut memberikan warna terhadap keberadaan sebuah kurikulum diniyah di lembaga pendidikan keagamaan.

Berkaitan dengan itu, sesuai dengan fokus penelitian penulis yang dituangkan dalam buku ini, penulis memaparkan data tentang pandangan pimpinan lembaga pendidikan keagamaan Islam, guru dan *stake holders* lainnya terhadap kurikulum pendidikan diniyah yang sedang berjalan di Kalimantan Selatan. Penulis menghimpun pendapat atau pandangan pimpinan pondok (yayasan), kepala lembaga pendidikan keagamaan Islam, ustadz/ustadzah, alumni atau masyarakat (wali santri). Hasil kuesioner dan wawancara yang telah penulis parafrase juga disajikan untuk menjadikan pembahasan komprehensif.

1. Pandangan tentang Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Aspek SKL

Pada bagian ini disajikan pandangan pihak yayasan/pimpinan pondok, kepala lembaga pendidikan keagamaan Islam, ustadz/ustdzah, dan *stakeholders* lainnya mengenai perlunya pengembangan kurikulum pendidikan diniyah dari aspek Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Pendapat pimpinan pondok (yayasan) tentang perlunya pengembangan kurikulum pendidikan diniyah (Standar Kompetensi Lulusan/SKL)

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
01	Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan yang berorientasi pada masa depan, kebutuhan santri dan masyarakat	4	4	3	3	4	18
02	Merumuskan tujuan lembaga pendidikan adalah untuk mencetak santri yang berilmu dan berakhlak mulia	4	4	4	3	4	19
03	Menyusun tujuan kurikulum diniyah yang berbasis pada karakter, dari tujuan mata pelajaran sampai tujuan pembelajaran tiap pokok bahasan	4	3	2	3	3	15
04	Merumuskan tujuan kurikulum sesuai dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)	2	4	2	2	3	17
05	Merumuskan aspek tujuan pembelajaran yang mengandung unsur <i>ta'lim</i> , <i>tarbiyah</i> , <i>ta'dib</i> , dan <i>tazkiyah</i> sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	3	3	3	2	4	15
06	Mempertimbangkan jumlah pelajaran yang mengacu kepada visi, misi lembaga pendidikan dan tujuan kurikulum, serta SKL	4	4	2	2	3	15
	Jumlah	21	22	16	15	21	99

Keterangan:

R1 = PP. Darul Ilmi Banjarbaru

R2 = PP. Darul Hijrah Puteri Martapura

R3 = PP. Rakha Amuntai

R4 = PP. Darul Istiqamah Barabai

R5 = PP. Al-Istiqamah Banjarmasin

Tabel di atas menunjukkan perhitungan jumlah skor adalah 99. Hasil ini masuk dalam kategori sangat mendesak dalam pengembangan kurikulum pendidikan diniyah pada aspek perumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Wawancara dengan pihak pimpinan yayasan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan juga menunjukkan mendesaknya pengembangan kurikulum pendidikan diniyah pada aspek perumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Terkait dengan standar kelulusan kurikulum memang telah dimiliki. Meskipun hanya tertulis, namun tidak dibukukan. Perumusannya dilakukan dalam rapat. Pembaharuan standar juga dilakukan dalam rapat. Standar di tahun mendatang, misalnya adalah: untuk awaliyah harus bisa membaca *kitab* (kitab yang tidak berbaris) di kelas I. Kemudian dari kelas I naik ke kelas II harus hafal *Jurumiyah*. Lalu dari kelas II naik ke kelas III harus hafal *Sharaf* atau *Kitab at-Tashrif* dari *tsulasi mujarrad* sampai *ruba'i mazid*. Sedangkan di kelas III, santri harus hafal *Jurumiyah* untuk satu kitab. Ini menjadi persyaratan naik kelas.

Pendapat Kepala Madrasah/Sekolah tentang perlunya pengembangan kurikulum diniyah (Standar Kompetensi Lulusan/SKL)

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
01	Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan yang berorientasi pada masa depan, kebutuhan santri dan masyarakat	4	4	3	3	4	18
02	Merumuskan tujuan lembaga pendidikan adalah untuk mencetak santri yang berilmu dan berakhlak mulia	4	4	4	3	4	19

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
03	Menyusun tujuan kurikulum diniyah yang berbasis pada karakter, dari tujuan mata pelajaran sampai tujuan pembelajaran tiap pokok bahasan	4	4	2	2	4	16
04	Merumuskan tujuan kurikulum sesuai dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)	3	4	2	2	4	15
05	Merumuskan aspek tujuan pembelajaran yang mengandung unsur <i>ta'lim</i> , <i>tarbiyah</i> , <i>ta'dib</i> , dan <i>tazkiyah</i> sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	3	4	3	2	3	15
06	Mempertimbangkan jumlah pelajaran yang mengacu kepada visi, misi lembaga pendidikan dan tujuan kurikulum, serta SKL	4	3	2	2	2	13
	Jumlah	22	23	16	14	21	96

Terlihat skor yang diperoleh adalah 96. Ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan diniyah aspek SKL sangat mendesak. Sebagian lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan belum memiliki standar kelulusan. Melalui wawancara pun diketahui bahwa terkadang lembaga pendidikan diniyah hanya mencontoh standar pondok yang ada di Pulau Jawa. Misalnya di level Awaliyah untuk qiraatul kutub, awalnya digunakan kitab Ibadī. Sedangkan di pondok Jawa sudah menggunakan kitab Bajuri. Maka kemudian beberapa lembaga pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan berusaha menyesuaikan untuk menggunakan Bajuri juga. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas.

Pendapat ustadz-ustadzah tentang perlunya pengembangan kurikulum diniyah (Standar Kompetensi Lulusan/SKL)

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
01	Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan yang berorientasi pada masa depan, kebutuhan santri dan masyarakat	4	4	3	3	4	18
02	Merumuskan tujuan lembaga pendidikan adalah untuk mencetak santri yang berilmu dan berakhlak mulia	4	4	4	3	4	19
03	Menyusun tujuan kurikulum diniyah yang berbasis pada karakter, dari tujuan mata pelajaran sampai tujuan pembelajaran tiap pokok bahasan	4	4	4	3	3	18
04	Merumuskan tujuan kurikulum sesuai dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)	4	4	3	2	3	16
05	Merumuskan aspek tujuan pembelajaran yang mengandung unsur <i>ta'lim</i> , <i>tarbiyah</i> , <i>ta'dib</i> , dan <i>tazkiyah</i> sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	4	4	3	2	3	16
06	Mempertimbangkan jumlah pelajaran yang mengacu kepada visi, misi lembaga pendidikan dan tujuan kurikulum, serta SKL	3	4	3	2	2	14
	Jumlah	23	24	20	15	19	101

Skor 101 menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan diniyah aspek SKL masuk kategori sangat mendesak.

Pendapat ustadz-ustadzah tentang perlunya pengembangan kurikulum pendidikan diniyah (Standar Kompetensi Lulusan/SKL)

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
01	Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan yang berorientasi pada masa depan, kebutuhan santri dan masyarakat	4	4	3	3	4	18

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
02	Merumuskan tujuan lembaga pendidikan adalah untuk mencetak santri yang berilmu dan berakhlak mulia	3	4	3	3	4	17
03	Menyusun tujuan kurikulum diniyah yang berbasis pada karakter, dari tujuan mata pelajaran sampai tujuan pembelajaran tiap pokok bahasan	4	4	4	3	3	18
04	Merumuskan tujuan kurikulum sesuai dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)	4	4	3	2	3	16
05	Merumuskan aspek tujuan pembelajaran yang mengandung unsur <i>ta'lim</i> , <i>tarbiyah</i> , <i>ta'dib</i> , dan <i>tazkiyah</i> sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	3	4	4	2	3	16
06	Mempertimbangkan jumlah pelajaran yang mengacu kepada visi, misi lembaga pendidikan dan tujuan kurikulum, serta SKL	3	3	3	2	2	13
	Jumlah	21	23	20	15	19	98

Jumlah skornya adalah 98. Ini masuk dalam kategori sangat mendesak dalam pengembangan kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha pada aspek perumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Pendapat alumni/masyarakat tentang perlunya pengembangan kurikulum pendidikan diniyah (Standar Kompetensi Lulusan/SKL)

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
01	Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan yang berorientasi pada masa depan, kebutuhan santri dan masyarakat	4	2	2	3	3	14
02	Merumuskan tujuan lembaga pendidikan adalah untuk mencetak santri yang berilmu dan berakhlak mulia	4	3	1	3	3	14

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
03	Menyusun tujuan kurikulum diniyah yang berbasis pada karakter, dari tujuan mata pelajaran sampai tujuan pembelajaran tiap pokok bahasan	4	3	3	3	3	16
04	Merumuskan tujuan kurikulum sesuai dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)	4	3	3	2	3	15
05	Merumuskan aspek tujuan pembelajaran yang mengandung unsur <i>ta'lim, tarbiyah, ta'dib, dan tazkiyah</i> sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	4	2	2	2	2	12
06	Mempertimbangkan jumlah pelajaran yang mengacu kepada visi, misi lembaga pendidikan dan tujuan kurikulum, serta SKL	3	4	2	3	2	14
	Jumlah	23	17	13	16	16	85

Tabel di atas menunjukkan perolehan skor 85. Di mana skor tersebut menunjukkan bahwa cukup mendesak dalam pengembangan kurikulum pendidikan diniyah pada aspek SKL di tingkat wustha. Hal ini berarti orang tua tidak terlalu perhatian kepada SKL yang ada di lembaga pendidikan keagamaan. Mereka lebih melihat kepada fakta bahwa anak-anak mereka terpelihara (aman) di pondok pesantren, bila dibandingkan dengan sekolah di luar.

Jika anak bersekolah yang bukan sekolah pondok, ada rasa kekhawatiran orang tua terkait dengan pergaulan, terlebih narkoba. Sedangkan jika di pondok, ada pengawasan. Sehingga orang tua percaya bahwa akhlak anak dapat terbentuk dengan baik.

2. Pandangan tentang Pengembangan isi Kurikulum Pendidikan Diniyah

Pada bagian ini disajikan pandangan pihak yayasan/pimpinan pondok, kepala lembaga pendidikan Islam, ustadz/ustadzah, dan *stakeholders* lainnya mengenai perlunya pengembangan kurikulum

pendidikan diniyah dari aspek standar isi kurikulum pendidikan diniyah.

Pendapat pimpinan pondok (yayasan) tentang perlunya pengembangan standar isi kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
07	Menata dan menetapkan struktur kurikulum diniyah secara proporsional (sesuai dengan beban belajar) yang mengacu kepada standar isi	3	3	2	2	3	13
08	Merumuskan isi (<i>content</i>) kurikulum yang mengacu kepada aspek tujuan pembelajaran	4	3	1	2	3	13
09	Mengorganisasi isi kurikulum sesuai dengan ruang lingkup (<i>scope</i>) dan urutan (<i>sequence</i>) penyajian bahan, serta jumlah jam pertemuan sesuai dengan standar isi	3	4	1	2	2	12
10	Menata kembali urutan penyajian bahan pelajaran berdasarkan urutan yang sistematis, logis, dan psikologis (tingkat perkembangan kejiwaan santri)	2	4	2	2	3	13
11	Meninjau kembali isi dan format silabus tiap mata pelajaran	3	3	4	2	2	14
	Jumlah	15	17	10	10	13	65

Keterangan:

R1 = PP. Darul Ilmi Banjarbaru

R2 = PP. Darul Hijrah Puteri Martapura

R3 = PP. Rakha Amuntai

R4 = PP. Darul Istiqamah Barabai

R5 = PP. Al - Istiqamah Banjarmasin

Hasil skor 65 ini menunjukkan bahwa cukup mendesak dalam pengembangan isi kurikulum pendidikan diniyah. Karena skor 65 termasuk dalam rentang skor 51-75, dan ini termasuk kategori cukup mendesak.

Pendapat Kepala Madrasah/Sekolah tentang perlunya pengembangan standar isi kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
07	Menata dan menetapkan struktur kurikulum diniyah secara proporsional (sesuai dengan beban belajar) yang mengacu kepada standar isi	3	4	2	3	3	15
08	Merumuskan isi (<i>content</i>) kurikulum yang mengacu kepada aspek tujuan pembelajaran	3	4	1	2	3	13
09	Menggorganisasi isi kurikulum sesuai dengan ruang lingkup (<i>scope</i>) dan urutan (<i>sequence</i>) penyajian bahan, serta jumlah jam pertemuan sesuai dengan standar isi	3	4	1	3	3	14
10	Menata kembali urutan penyajian bahan pelajaran berdasarkan urutan yang sistematis, logis, dan psikologis (tingkat perkembangan kejiwaan santri)	3	3	4	2	2	14
11	Meninjau kembali isi dan format silabus tiap mata pelajaran	3	3	3	2	2	13
	Jumlah	14	16	16	10	11	67

Dari tabel di atas, tampak terlihat skornya adalah 67. Ini menunjukkan bahwa cukup mendesak dalam pengembangan isi kurikulum pendidikan diniyah.

Pendapat ustadz-ustadzah tentang perlunya pengembangan standar isi kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
07	Menata dan menetapkan struktur kurikulum diniyah secara proporsional (sesuai dengan beban belajar) yang mengacu kepada standar isi	3	3	3	2	2	13

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
08	Merumuskan isi (<i>content</i>) kurikulum yang me-ngacu kepada aspek tujuan pembelajaran	3	3	4	2	3	15
09	Menggorganisasi isi kurikulum sesuai dengan ruang lingkup (<i>scope</i>) dan urutan (<i>sequence</i>) penyajian bahan, serta jumlah jam pertemuan sesuai dengan standar isi	3	4	3	2	2	14
10	Menata kembali urutan penyajian bahan pelajaran berdasarkan urutan yang sistematis, logis, dan psikologis (tingkat perkembangan kejiwaan santri)	2	3	3	2	2	12
11	Meninjau kembali isi dan format silabus tiap mata pelajaran	3	3	3	2	2	13
	Jumlah	14	16	16	10	11	67

Jumlah skor adalah 67. Jumlah skor 67 tersebut termasuk dalam kategori cukup mendesak dalam pengembangan isi kurikulum pendidikan diniyah di lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Pendapat ustadz-ustadzah tentang perlunya pengembangan standar isi kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
07	Menata dan menetapkan struktur kurikulum diniyah secara proporsional (sesuai dengan beban belajar) yang mengacu kepada standar isi.	4	4	3	2	2	15
08	Merumuskan isi (<i>content</i>) kurikulum yang mengacu kepada aspek tujuan pembelajaran	3	4	4	2	3	16
09	Menggorganisasi isi kurikulum sesuai dengan ruang lingkup (<i>scope</i>) dan urutan (<i>sequence</i>) penyajian bahan, serta jumlah jam pertemuan sesuai dengan standar isi	3	4	3	2	2	14

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
10	Menata kembali urutan penyajian bahan pelajaran berdasarkan urutan yang sistematis, logis, dan psikologis (tingkat perkembangan kejiwaan santri)	3	3	3	2	2	13
11	Meninjau kembali isi dan format silabus tiap mata pelajaran	3	3	3	2	2	13
	Jumlah	16	18	16	10	11	71

Diketahui bahwa jumlah skornya adalah 71. Skor ini dapat dikatakan masuk pada kategori cukup mendesak dalam penyusunan standar isi kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha.

Pendapat alumni/masyarakat tentang perlunya pengembangan standar isi kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
07	Menata dan menetapkan struktur kurikulum Madin secara proporsional (sesuai dengan beban belajar) yang mengacu kepada standar isi	3	3	3	1	2	12
08	Merumuskan isi (<i>content</i>) kurikulum yang mengacu kepada aspek tujuan pembelajaran	3	4	2	2	3	14
09	Menggorganisasi isi kurikulum sesuai dengan ruang lingkup (<i>scope</i>) dan urutan (<i>sequence</i>) penyajian bahan, serta jumlah jam pertemuan sesuai dengan standar isi	3	3	1	3	2	12
10	Menata kembali urutan penyajian bahan pelajaran berdasarkan urutan yang sistematis, logis, dan psikologis (tingkat perkembangan kejiwaan santri)	3	4	2	2	2	13
11	Meninjau kembali isi dan format silabus tiap mata pelajaran	3	3	4	3	2	15
	Jumlah	15	17	12	11	11	66

Terlihat, dapat diketahui jumlah skornya adalah 66. Ini masuk dalam kategori cukup mendesak dalam pengembangan isi kurikulum pendidikan diniyah.

3. Pandangan tentang Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah dari Aspek Proses Pembelajaran

Pada bagian ini disajikan pandangan pihak yayasan/pimpinan pondok, kepala lembaga pendidikan keagamaan Islam, ustadz/ustadzah, dan *stakeholders* lainnya mengenai perlunya pengembangan kurikulum pendidikan diniyah dari aspek standar proses pembelajaran.

Pendapat pimpinan pondok (yayasan) tentang pengembangan proses pembelajaran pada kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
12	Merumuskan pendekatan pembelajaran yang berbasis PAIKEM dan kontekstual/ kebermaknaan	2	4	1	2	4	13
13	Memilih dan menetapkan metode dan strategi pembelajaran pada interaksi belajar aktif berdasarkan standar proses	2	3	2	2	4	13
14	Mendorong kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pelajaran multi media (IT) bila perlu	3	3	4	3	2	15
	Jumlah	7	10	7	7	10	41

Keterangan:

R1 = PP. Darul Ilmi Banjarbaru

R2 = PP. Darul Hijrah Puteri Martapura

R3 = PP. Rakha Amuntai

R4 = PP. Darul Istiqamah Barabai

R5 = PP. Al - Istiqamah Banjarmasin

Dapat dilihat bahwa jumlah skornya adalah 41. Skor ini masuk dalam kategori cukup mendesak dalam pengembangan kurikulum pendidikan diniyah dari aspek proses pembelajaran.

Pendapat Kepala Madrasah/Sekolah tentang pengembangan proses pembelajaran pada kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
12	Merumuskan pendekatan pembelajaran yang berbasis PAIKEM dan kontekstual/ kebermaknaan	3	4	1	2	3	13
13	Memilih dan menetapkan metode dan strategi pembelajaran pada interaksi belajar aktif berdasarkan standar proses	3	4	2	2	4	15
14	Mendorong kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pelajaran multi media (IT) bila perlu	2	4	4	3	2	15
	Jumlah	8	12	7	7	9	43

Dapat diketahui bahwa jumlah skornya adalah 43. Ini juga masuk dalam kategori cukup mendesak dalam pengembangan kurikulum pendidikan diniyah dari aspek proses pembelajaran.

Pendapat ustadz-ustadzah tentang pengembangan proses pembelajaran pada kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
12	Merumuskan pendekatan pembelajaran yang berbasis PAIKEM dan kontekstual/ kebermaknaan	3	4	4	2	4	17
13	Memilih dan menetapkan metode dan strategi pembelajaran pada interaksi belajar aktif berdasarkan standar proses	4	3	3	2	4	16
14	Mendorong kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pelajaran multi media (IT) bila perlu	3	3	4	3	2	15
	Jumlah	10	10	11	7	10	48

Pada tabel di atas dapat diketahui skornya adalah 48, ini skor ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dari segi proses masuk pada kategori sangat mendesak.

Pendapat ustadz-ustadzah tentang pengembangan proses pembelajaran pada kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
12	Merumuskan pendekatan pembelajaran yang berbasis PAIKEM dan kontekstual/ kebermaknaan	3	4	4	2	4	17
13	Memilih dan menetapkan metode dan strategi pembelajaran pada interaksi belajar aktif berdasarkan standar proses	4	3	3	2	4	16
14	Mendorong kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pelajaran multi media (IT) bila perlu	3	4	4	3	2	16
	Jumlah	10	11	11	7	10	49

Dapat diketahui bahwa jumlah skornya 49. Skor ini juga masuk dalam kategori sangat mendesak dalam pengembangan kurikulum pendidikan diniyah dari segi proses pembelajaran pada lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Pendapat alumni/masyarakat tentang pengembangan proses pembelajaran pada kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
12	Merumuskan pendekatan pembelajaran yang berbasis PAIKEM dan kontekstual/ kebermaknaan	4	4	2	2	3	15
13	Memilih dan menetapkan metode dan strategi pembelajaran pada interaksi belajar aktif berdasarkan standar proses	4	4	1	2	3	14
14	Mendorong kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pelajaran multi media (IT) bila perlu	3	2	3	3	1	12
	Jumlah	11	10	6	7	7	41

Diketahui bahwa jumlah skornya adalah 41. Ini juga masuk dalam kategori cukup mendesak dalam pengembangan pendidikan kurikulum diniyah dari aspek proses pembelajaran.

4. Pandangan Tentang Pengembangan Standar Evaluasi Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha

Pada bagian ini disajikan pandangan pihak yayasan/ pimpinan pondok, kepala lembaga pendidikan keagamaan Islam, ustadz/ustadzah, dan *stakeholders* lainnya mengenai perlunya pengembangan kurikulum pendidikan diniyah dari aspek standar evaluasi kurikulum diniyah.

Pendapat pimpinan pondok (yayasan) tentang perlunya pengembangan evaluasi kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
15	Menetapkan SKM pada setiap mata pelajaran yang berbeda satu sama yang lain berdasarkan tingkat kesukaran materi pelajaran pada mata pelajaran, sesuai standar penilaian	3	3	2	3	3	14
16	Menetapkan frekuensi/tahapan evaluasi dalam satu semester	2	3	2	3	4	14
17	Merumuskan prosedur dan teknik evaluasi yang mengarah pada tujuan pembelajaran	4	4	1	3	4	16
18	Merumuskan sistem tindak lanjut (<i>follow up</i>) dan remedial	3	3	3	3	3	15
	Jumlah	12	13	8	12	14	59

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah skornya adalah 59. Jumlah skor ini masuk dalam rentang skor 41-60 yang berarti termasuk dalam kategori cukup mendesak dalam pengembangan evaluasi kurikulum pendidikan diniyah di tingkat wustha.

Pendapat Kepala Madrasah/Sekolah tentang perlunya pengembangan evaluasi kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
15	Menetapkan SKM pada setiap mata pelajaran yang berbeda satu sama yang lain berdasarkan tingkat kesukaran materi pelajaran pada mata pelajaran, sesuai standar penilaian.	2	4	2	3	2	13
16	Menetapkan frekuensi/tahapan evaluasi dalam satu semester	2	3	2	3	2	12
17	Merumuskan prosedur dan teknik evaluasi yang mengarah pada tujuan pembelajaran	3	3	1	2	2	11
18	Merumuskan sistem tindak lanjut (<i>follow up</i>) dan remedial	2	4	3	3	2	14
	Jumlah	9	14	8	11	8	50

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah skornya adalah 50. Skor ini masuk pada kategori cukup mendesak dalam pengembangan evaluasi kurikulum pendidikan diniyah tingkat *wustha*.

Pendapat ustadz-ustadzah tentang perlunya pengembangan evaluasi kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
15	Menetapkan SKM pada setiap mata pelajaran yang berbeda satu sama yang lain berdasarkan tingkat kesukaran materi pelajaran pada mata pelajaran, sesuai standar penilaian	2	3	4	3	1	13
16	Menetapkan frekuensi/tahapan evaluasi dalam satu semester	2	3	4	3	2	14
17	Merumuskan prosedur dan teknik evaluasi yang mengarah pada tujuan pembelajaran	3	4	3	3	2	15

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
18	Merumuskan sistem tindak lanjut (<i>follow up</i>) dan remedial	2	3	4	3	2	14
	Jumlah	9	13	15	12	7	56

Dari tabel di atas dapat terlihat total skornya adalah 56. Skor tersebut masuk pada kategori cukup mendesak dalam pengembangan evaluasi kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha.

Pendapat ustadz-ustadzah tentang perlunya pengembangan evaluasi kurikulum pendidikan diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
15	Menetapkan SKM pada setiap mata pelajaran yang berbeda satu sama yang lain berdasarkan tingkat kesukaran materi pelajaran pada mata pelajaran, sesuai standar penilaian	3	4	4	3	1	15
16	Menetapkan frekuensi/tahapan evaluasi dalam satu semester	3	4	4	3	2	16
17	Merumuskan prosedur dan teknik evaluasi yang mengarah pada tujuan pembelajaran	4	3	3	3	2	15
18	Merumuskan sistem tindak lanjut (<i>follow up</i>) dan remedial	3	4	4	3	1	15
	Jumlah	13	15	15	12	6	61

Dari tabel di atas dapat diketahui sekornya berjumlah 61. Skor tersebut menunjukkan bahwa pengembangan evaluasi kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha di lembaga pendidikan keagamaan Islam masuk kategori sangat mendesak.

Pendapat alumni/masyarakat tentang perlunya pengembangan evaluasi kurikulum diniyah

No	KRITERIA	R1	R2	R3	R4	R5	Jlh
15	Menetapkan SKM pada setiap mata pelajaran yang berbeda satu sama yang lain berdasarkan tingkat kesukaran materi pelajaran pada mata pelajaran, sesuai standar penilaian	3	3	1	3	2	12
16	Menetapkan frekuensi/tahapan evaluasi dalam satu semester	3	2	2	3	2	12
17	Merumuskan prosedur dan teknik evaluasi yang mengarah pada tujuan pembelajaran	3	2	2	3	3	13
18	Merumuskan sistem tindak lanjut (<i>follow up</i>) dan remedial	3	3	4	3	3	16
	Jumlah	12	10	9	12	10	53

Dari tabel di atas dapat diketahui skornya berjumlah 53. Skor ini dapat masuk pada kategori cukup mendesak untuk pengembangan standar evaluasi kurikulum pendidikan diniyah di tingkat wustha pada lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan.

Demikian hasil data dipaparkan. Dari data hasil lapangan yang telah dipaparkan di atas sangat jelas urgensi menyusun dan merancang desain pengembangan kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha yang mengacu kepada 4 (empat) standar pendidikan dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang ditetapkan pemerintah dalam PP No. 32 Tahun 2013 perubahan dari PP No. 19 Tahun 2005.

BAB IX

FORMULA DESAIN KURIKULUM PENDIDIKAN DINIYAH PENDEKATAN GRASSROOTS

A. Dasar Pembentukan Desain Pengembangan Kurikulum

1. Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam

Berdasarkan penyajian data atau data studi pendahuluan yang telah dipaparkan ada pembahasan sebelumnya, bahwa lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan sudah memiliki visi dan misi dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah. Tetapi setelah penulis pelajari beberapa visi dan misi tersebut, ternyata ada yang belum memenuhi beberapa ketentuan dalam perumusannya. Baik jika ditinjau dari persyaratan dalam perumusan sebuah visi lembaga, maupun dari segi administrasi dan manajemen pendidikan.

Secara teori, sebuah visi harus menjangkau jauh ke masa depan, selain itu ada masa atau periode tertentu untuk mencapai visi tersebut. Karena makna dari visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga, jauh di masa yang akan datang, dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Sebuah visi lembaga pendidikan masa waktu pencapaiannya antara 10-15 tahun. Sedangkan visi lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan ini, dalam pencapaiannya, belum terukur untuk suatu kurun atau periode waktu tertentu.

Visi lembaga pendidikan seyogyanya menjadi pedoman bagi segenap warga sekolah/madrasah dalam pembuatan kebijakan (regulasi), program kerja, dan pemenuhan infrastuktur pendidikan lainnya. Namun dalam konteks visi di lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ada, tidak jarang visi hanya sekadar sebagai slogan atau *prestise* dari sebuah lembaga tersebut. Selain itu hanya

dicantumkan di plang papan nama sebuah lembaga, dan terkadang tidak dijadikan sebagai arahan dalam aktivitas pendidikan.

Padahal visi seharusnya dapat memberikan arahan, dorongan kepada anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan pada data yang telah penulis temukan semasa observasi, sebagian misi lembaga belum sinkron dengan sebuah visi. Selain itu, kebanyakan visi belum didukung oleh program kerja pendidikan yang jelas dan terarah.

Sebuah visi pada lembaga pendidikan keagamaan Islam diharapkan dapat dijadikan padoman dalam menyusun kurikulum pendidikan diniyah yang secara umumnya berorientasi pada santri yang beriman, berpengetahuan, berakhlak mulia dan berketerampilan. Pada lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan di mana visi dan misi dijadikan sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Padahal secara teori, visi dan misi berfungsi mengembangkan arah kebijakan secara komprehensif dalam sebuah lembaga. Sementara SKL dijadikan sebagai acuan untuk mengatur *output* dan *outcome* dari lembaga pendidikan.

Kendati demikian, apa yang sudah terkandung dalam visi yang ada dapat saja dijadikan sebagai SKL dalam sebuah lembaga pendidikan keagamaan Islam, seperti pada tujuan di MTs NIPA Amuntai, yaitu: menyiapkan para santri yang *tafaqquh fi ad-dîn*. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS At-Taubah [9] : 122.

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١٢٢)

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Selain itu, terdapat pula hadits Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan menuntut ilmu agama atau difahamkan dengan

ilmu agama yang terdapat dalam kitab *Taysîr al-Wushûl ila Tsâlâsati Ushûl* yang berbunyi:

ولم يأمر الله نبيه الا بزيادة من شيء إلا من العلم، فقال عز وجل {وقل رب زدني
علماً}، ومن أراد الله به خيراً فقهه في الدين قال صلى الله عليه وسلم: «من
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» (متفق عليه)¹

Dalam konteks kekinian, tidak dibenarkan jika semua orang yang beriman kepada Allah Swt hanya disibukan dengan hal-hal duniawi dan menuntut ilmu umum, teknologi dan sains semata. Akan tetapi diperintahkan juga agar sebagian kecil (*thâifah* seperti yang tersebut di ayat) dari kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama (*tafaqquh fî ad-dîn*). Kepada mereka ini diharapkan untuk dapat membimbing dan memberikan peringatan kepada mukmin yang lainnya. Bagi orang yang *tafaqquh fî ad-dîn* tersebut dijanjikan mendapat kebaikan dari Allah Swt. Ditambahkan lagi akan mendapatkan kebaikan (rahmat dan keberkahan) yang banyak dari Allah Swt.

Berdasarkan hasil *quetioner* yang sudah diolah melalui analisis data yang dilakukan oleh penulis, terungkap bahwa perumusan SKL pada lembaga pendidikan diniyah sangat mendesak. Ini terlihat dari pandangan pimpinan lembaga pendidikan diniyah, pandangan kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam, pandangan ustadz/ustadzah, dan juga pandangan alumni dan masyarakat. Kesimpulan tersebut didukung dengan hasil wawancara. Dengan demikian, semua unsur *stakeholders* merekomendasikan untuk segera merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan.

Visi pada lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan dijadikan sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang secara umum berorientasi pada penanaman akhlak yang mulia, berwawasan ilmu agama, terampil dan mandiri. Sementara *tafaqquh fî ad-dîn* merupakan tujuan umum lulusan lembaga

¹ *Taysir al Wushul Ila Tsalasah al-Ushul Li 'Abd*, vol. 1, t.t., 9.

pendidikan diniyah tingkat wustha yang perlu dijabarkan dalam aspek khusus, seperti konsep *ta'lim*, *ta'dib* dan *tazkiyah*, dan *tarbiyah*.

Dalam rangka mewujudkan *tafaqquh fi ad-din*, diperlukan beberapa usaha sadar orang dewasa, yakni berupa upaya-upaya pendidikan yang menurut oleh ahli pendidikan disebut *the school efforts to influence learning*. Dalam konteks pendidikan Islam, upaya-upaya ini terangkum dalam konsep *ta'lim*, *ta'dib*, dan *tazkiyah wa at-tarbiyah*. Firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran [3] : 164 :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (١٦٤)

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata."

Ulama adalah orang *'alim* yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Dengan demikian *mu'allim* atau ustadz bertugas melanjutkan fungsi dan peran para nabi untuk dakwah yang lebih luas dalam pembentukan *insân kâmil*. Oleh karena itu, peran seorang pendidik (dalam konteks ini adalah *mu'allim/ustadz*) tidak jauh berbeda tugasnya dengan peran para nabi dan rasul.

Berdasarkan ayat di atas, maka dalam pendidikan Islam seorang ustadz perlu membaca dan menjelaskan ayat-ayat Allah baik yang tekstual maupun kontekstual, menyucikan jiwa-jiwa (mental) santri (*tazkiyah*) dengan menanamkan aqidah yang murni dan ketulusan hati (ikhlas). Setelah itu baru mengajarkan ilmu (*ta'lim*). Kemudian diringi dengan penanaman budi pekerti (*ta'dib*) dan pembekalan santri dengan berbagai keterampilan hidup (*tarbiyah*).

Benyamin S. Bloom dalam bukunya yang berjudul *Taxonomy of Educational Objectives the Classification of Educational Goals*,

mengemukakan bahwa ranah pendidikan itu dikelompokkan dalam tiga (3) domain, yaitu; *cognitive, affective, and psychomotor domains*.² Sementara itu, dalam prosesnya, pendidikan Islam mencoba menyelaraskan pendapat Bloom tersebut.

Sebagian pakar pendidikan Islam mengemukakan *cognitive* disamakan dengan pengertian *ta'lim*, *affective* sama dengan *ta'dib*, dan *psychomotor* sama dengan *tarbiyah*. Penjelasan yang lebih detail di bawah ini.

a. Domain Afektif

Hasil belajar afektif tidak dapat dilihat bahkan diukur. Berbeda halnya dengan pengetahuan pada ranah kognitif yang nampak dan dapat diukur. Pada domain afektif, guru tidak dapat langsung mengetahui apa yang bergejolak dalam hati anak, apa yang dirasakannya, apa yang sedang dipikirkannya atau yang diyakininya. Padahal dalam pendidikan Islam terutama pendidikan Aqidah banyak sekali hal-hal yang menyangkut hati yang merupakan ranah afektif ini. Domain afektif sering juga diartikan dengan nilai dasar. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam lebih cenderung kepada *ta'dib*, maksudnya adalah bahwa akhlak/adab merupakan cerminan dari Aqidah yang murni yang tertanam di dalam hati seseorang.

Hadits nabi Muhammad saw, yang berkaitan dengan ranah *ta'dib* ini adalah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، هُوَ ابْنُ سَلَامٍ- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمَّةٌ {يَطُؤُهَا} فَأَدَّيَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيَتَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ... (رواه البخارى)

² Benjamin S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives the Classification of Educational Goals* (New York: David McKay Company Inc, 1974).

Pada riwayat lain, seperti pada hadis di bawah ini:

وقال ابو بكر الصديق رضى الله عنه للرسول الكريم: لقد طفت العرب، وسمعت فصحاءهم، فما رأيت ولا سمعت مثلك أحدا ... فمن أدبك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ادبني ربي فأحسن تأدبي)).³

Domain afektif menyangkut penerimaan atau penghayatan dalam diri santri yang mengkristal dalam dirinya, sehingga akan melahirkan perilaku sesuai dengan penerimaan dan penghayatan terhadap satu konsep, prinsip dan bahkan keyakinan. Oleh karena itu, untuk mencapai dan mengevaluasi tujuan domain ini, dalam pendidikan Islam jauh lebih pelik/rumit dibandingkan mengevaluasi tujuan domain kognitif.

b. Domain Kognitif

Ranah ini mempunyai enam (6) tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah pengetahuan dasar (fakta, peristiwa, informasi, dan istilah) sampai yang paling tinggi berupa evaluasi (pandangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pemikiran), sehingga menjadi suatu hierarki. Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa ranah kognitif/pengetahuan dasar dalam pandangan pendidikan Islam disamakan dengan konsep *ta'lim*. Yaitu pengetahuan dasar yang berisi informasi dan fakta, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al Baqarah [2] : 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Para malaikat berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu dengan orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memuji dan menyucikan-Mu?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"."

³ al-Abrasyi, *At Tarbiyah al Islāmiyah wa Falāsifatuha*, 110.

Kata *'allama* berarti mengajarkan pengetahuan yang bersifat kognitif, dan pada ayat selanjutnya, Adam as diperintah untuk menyampaikan pengetahuan yang sudah diajarkan Allah Swt kepada para malaikat-Nya.

c. Domain Psikomotor

Ranah ini terkadang kurang diperhatikan oleh para pendidik, dibandingkan dengan kedua ranah lainnya yang telah dipaparkan di atas. Sehingga akhir-akhir ini gerakan kesehatan dan kesegaran (fisik dan mental) kembali memusatkan perhatian kepada ranah psikomotor ini. Dalam konteks pendidikan Islam, malah sebaliknya. Ranah ini mendapat perhatian yang sangat serius. Dalam pelaksanaan ibadah saja lebih banyak dipraktikkan atau pemberian keterampilan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, seperti; pembelajaran wudhu, tayamum, shalat, dan haji.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perspektif pendidikan Islam, ranah psikomotor merupakan ranah gerak yang membentuk satu keterampilan fisik. Misalnya saja mengajarkan tentang tatacara shalat seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah saw, sebagaimana hadits berikut.

حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال: فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة مرتبة وقال في حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. (رواه البيهقي)

Melalui hadits ini, Nabi Muhammad saw. mencontohkan atau mendemonstrasikan tentang bagaimana gerakan-gerakan shalat. Sehingga gerakan-gerakan yang dicontohkan tersebut dapat diamati oleh para sahabat (pengikut) untuk dapat dipraktikkan dalam melaksanakan shalat.

Garis besar ranah psikomotor adalah sebagai berikut:

- 1) Gerak refleks.
- 2) Gerak dasar yang fundamental, meliputi: gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulasi.

- 3) Keterampilan perseptual, meliputi: dekriminasi kinestetik, visual, auditoris, dan dekriminasi taktif, serta perseptual yang terkoordinir.
- 4) Keterampilan fisik, meliputi: ketahanan, kekuatan, keluwesan dan kelincahan.
- 5) Gerak terampil, meliputi: keterampilan adaptif yang sederhana, adaptif gabungan dan keterampilan adaptif yang kompleks.
- 6) Komunikasi non-diskursif, meliputi: gerak ekspresif dan gerak interpretatif.⁴

Dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di lembaga pendidikan diniyah tidak terlepas dari beberapa unsur di atas, yaitu unsur *tazkiyah*, unsur *ta'dîb*, unsur *ta'lîm*, dan unsur *tarbiyah wa mahârah*. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk *insân kâmil* yaitu sebagai *'abdullâh* dan *khalîfatullâh*. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Adz-Dzâriat [51] : 56, berikut ini.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."

Maksud Allah Swt menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali hanya mengabdikan kepada-Nya. Oleh karena itu, manusia mutlak menjadi *'abdun* atau hamba yang selalu mengabdikan hanya kepada-Nya semata. Selain *'abdullâh*, manusia juga harus dapat melaksanakan perannya sebagai *khalîfatullâh*, sebagai makhluk yang akan memakmurkan bumi Allah. Termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2] : 30, Allah Swt berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۗۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗۙ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٣٠)

⁴ Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, 79.

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui!"

Selanjutnya untuk mengemban tugas tersebut, maka peran Rasulullah saw adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi saw:

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. (رواه البخاري)⁵

Seorang *mu'allim/ustadz* sebagai perpanjangan peran dari tugas nabi dan rasul, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak meneruskan misi beliau untuk memperbaiki akhlak atau budi pekerti. Ini adalah tanggung jawab mutlak setiap ustadz dan ustadzah dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran di manapun dan kapanpun.

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan dan perumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) lembaga pendidikan keagamaan yang berorientasi pada *tafaqquh fī ad-dīn* merupakan satu keharusan, dengan tiga unsur yang harus dimuat dalam SKL tersebut, yaitu; *ta'dīb/tazkiyah*, *ta'lim* dan *tadrīs*, serta *tarbiyah* dan *mahārah*. Dengan memperhatikan keseimbangan ketiga elemen tersebut, maka akan bermuara kepada terbentuknya *insān kāmīl* yang berakhlak mulia sebagai *'abdullaāh* sekaligus sebagai *khalīfatullāh*.

Selain itu, keberadaan SKL kurikulum diniyah tidak lepas dari Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

⁵ *Musnad Abi Hurairah*, vol. 2, t.t., 381.

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebab bagaimanapun lembaga pendidikan keagamaan tingkat wustha sederajat dan berada pada jenjang pendidikan dasar. Sehingga dalam perumusan SKL lembaga pendidikan tersebut tetap memperhatikan standar KKNI, meskipun lembaga keagamaan Islam juga memiliki kekhasan tersendiri.

2. Pengembangan Isi (*Content*) Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan

Isi atau *content* kurikulum merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah kurikulum. Jika isi kurikulum merupakan salah satu komponen dalam suatu kurikulum, maka eksistensinya mutlak diperlukan dalam sebuah kurikulum. Isi kurikulum yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya harus mengacu kepada visi dan misi, tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya, memiliki *scope* yang seimbang, *sequence* yang sistematis, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umum.

Secara umumnya, isi kurikulum pada kebanyakan lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan merujuk pada kitab-kitab klasik atau yang dalam istilah sehari-hari disebut dengan kitab kuning. Kitab-kitab tersebut berbahasa Arab dan ada juga yang ditulis oleh pengarangnya dengan menggunakan aksara Arab Melayu (Arab Jawi).

Muatan isi (*content*) kurikulum pendidikan diniyah yang diterapkan saat ini merupakan hasil dari ketetapan pihak pimpinan dari pondok pesantren, namun ada juga yang merupakan adopsi kurikulum diniyah dari pesantren-pesantren di pulau Jawa yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan memungkinkan untuk diterapkan. Beberapa lembaga pendidikan keagamaan Islam mengambil kurikulum pendidikan diniyah dari lembaga pendidikan keagamaan Islam tertentu, seperti Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur.

Meskipun beberapa lembaga pendidikan diniyah mengadopsi kurikulum pendidikan diniyah dari salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam tertentu, namun sebenarnya kurikulum tersebut tidak dapat diaplikasikan 100% persis sama di lembaga pendidikan

diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan. Pihak pengelola (pihak yayasan) perlu menyesuaikan dengan kondisi setempat baik sumber daya manusia (ustadz dan santri) maupun kultur dan budaya masyarakat di Kalimantan Selatan.

Keluasan atau ruang lingkup (*scope*) isi materi kurikulum diniyah dan urutan penyajiannya kurang mendapat perhatian dalam penyelenggaraan kurikulum pendidikan diniyah, khususnya tingkat wustha di Kalimantan Selatan. Sementara prinsip kesinambungan (*continuity*) juga belum mendapat perhatian dalam mengorganisasi isi kurikulum pendidikan diniyah.

Diketahui bahwa isi kurikulum pendidikan diniyah yang sedang diterapkan saat ini, di mana jumlah mata pelajaran diniyah dan beban belajar yang tidak ada keseragaman. Ini dikarenakan tidak ada pedoman atau standar yang dapat digunakan sebagai rujukan. Sehingga antara satu lembaga dengan lembaga pendidikan Islam yang lainnya, nampak berjalan masing-masing.

Kondisi ini disebabkan oleh tidak ada standar yang dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan isi kurikulum pendidikan diniyah, khususnya tingkat wustha di Kalimantan Selatan. Sementara itu, berdasarkan hasil kuesioner terungkap bahwa pengembangan dan perumusan standar isi kurikulum pendidikan diniyah sudah cukup mendesak. Berdasarkan pada pandangan pimpinan pondok, pandangan kepala sekolah, pandangan ustadz dan ustadzah, serta pandangan alumni dan masyarakat. Fakta ini cukup menjadi pijakan pengembangan standar isi kurikulum. Sudah saatnya kurikulum dikembangkan atau dengan bahasa lain dirancang kembali (*redesign*).

Materi kurikulum adalah berbagai pengetahuan dan pengalaman belajar yang harus diperoleh peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berbagai pengetahuan yang dimaksud tersebut dikemas dalam bentuk mata pelajaran-mata pelajaran. Sedangkan pengalaman belajar diberikan dalam bentuk program sekolah baik yang terjadwal maupun insidental. Baik pengetahuan maupun pengalaman belajar harus disesuaikan dengan tingkat dan jenis

pendidikan, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, harus berorientasi pada potensi dan wawasan pemikiran yang global.⁶

Pihak pengembang kurikulum berupaya untuk mengorganisasikan isi atau materi kurikulum. Baik yang disajikan dalam bentuk mata pelajaran atau berupa program pengalaman belajar yang dibuat sedemikian rupa, dengan harapan untuk mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Kemudian dalam upaya mengembangkan standar isi kurikulum pendidikan diniyah, seorang perancang kurikulum (*curriculum designer*) harus atau mutlak menjabarkan apa yang terdapat dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) lembaga pendidikan diniyah ke dalam standar isi kurikulum. Intinya, SKL yang direkomendasikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha adalah membentuk *insân kâmil* yang *tafaqquh fi ad-dîn*, sebagai *'abdullâh* dan *khalîfatullah*. Untuk menghantarkan santri yang *tafaqquh fi ad-dîn*, santri harus dibekali dengan Bahasa Arab. Karena sumber utama ajaran Islam adalah al-Qur'an dan Hadits, yang keduanya berbahasa Arab.

Al-Qur'an diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana ditegaskan dengan firman Allah Swt QS. Yusuf [12] : 2:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢)

"*Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.*"

Ayat di atas secara jelas menegaskan bahwa al-Qur'an diturunkan dalam Bahasa Arab. Tentu ada banyak hikmah dalam hal ini. Salah satunya adalah Bahasa Arab merupakan gaya bahasa yang terbaik dan yang paling konsisten struktur tata bahasanya. Oleh karena itu, untuk dapat memahami ajaran Islam yang asli (*original*), maka para santri harus memahami seluk beluk tata Bahasa

⁶ Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Teori dan Praktek*, 30.

Arab sebagai ilmu alat. Dimaksudkan untuk menggali isi ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits Nabi saw.

Isi atau materi kurikulum diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan masih cenderung menggunakan model kurikulum subjek akademik, sehingga kurikulum ini sangat mengutamakan isi atau materi pelajaran. "Model kurikulum ini memberikan pengetahuan yang sangat besar pada ilmu pengetahuan yang akan diberikan. Oleh karena itu, nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama dan cakupan disiplin ilmu pengetahuan yang berkembang pada zamannya."⁷

Meskipun kurikulum pendidikan diniyah tersebut cenderung menggunakan model kurikulum subjek akademis, namun dalam implementasinya kurikulum diniyah berupaya untuk menekankan model kurikulum humanis dalam kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), yakni mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masing-masing santri secara keseluruhan untuk membentuk *insân kâmil* yang berakhlak mulia. Selain itu, kurikulum juga tetap melaksanakan perbaikan-perbaikan individu yang berimplikasi pada pembentukan sebuah masyarakat secara keseluruhan, model ini dikenal dengan model rekonstruksi sosial.

Mengembangkan standar isi kurikulum pendidikan diniyah tidak berbeda jauh dengan mengembangkan isi kurikulum pada umumnya, yang mana isi kurikulum memuat pengetahuan logika, etika (moral), dan estetika. Pengetahuan tersebut dapat berupa konseptual, faktual, prinsip, maupun prosedural. Isi kurikulum diniyah mengandung pengetahuan yang berupa konsep (pengertian), fakta (realita), prinsip (ketentuan hak dan bathil, halal dan haram) dan berupa prosedur (*kaiḥiyah 'ibâdah*). Selain itu, isi kurikulum pendidikan diniyah tidak hanya memuat pengetahuan logika (*aqliyah*), etika (*akhlâq*) dan estetika (*ihsân*), tetapi yang terpenting adalah pengetahuan tentang keimanan (*'aqîdah*).

⁷ Sabda, *Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan*, 47-48.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka perlu pengembangan isi kurikulum pendidikan diniyah yang mengacu kepada SKL dan sumber utama dari ilmu-ilmu keislaman, sehingga perlu untuk membagi isi kurikulum pendidikan diniyah kepada 3 kelompok, yaitu:

- a. Kelompok *Dirâsah Lughawiyah*, meliputi:
 - 1) *Al-Lughah al'arabiyah/mufradât*
 - 2) Sharaf
 - 3) Nahwu
 - 4) Qira'ah
 - 5) Khat/Kaligrafi
 - 6) Balaghah
- b. Kelompok *Dirâsah Diniyah Islâmiyah* Pokok, yang meliputi:
 - 1) Ilmu Tauhid
 - 2) Al-Qur'an
 - 3) Hadits
 - 4) Tajwid
 - 5) Fiqih
 - 6) Akhlak
 - 7) Tarikh
- c. Kelompok *Dirâsah Diniyah Islâmiyah* Penunjang, yaitu:
 - 1) Ushul Tafsir/Ulumul qur'an
 - 2) Tafsir al-Qur'an
 - 3) Ulumul Hadits
 - 4) Ushul Fiqh
 - 5) Faraidh
- d. Mata Pelajaran Ciri Khas Lembaga Pendidikan Diniyah (Muatan Lokal)

Dari ketiga kelompok pertama isi kurikulum di atas, perlu dibuat distribusi untuk masing-masing tingkat kelas dengan memperhatikan prinsip dalam pengorganisasi materi kurikulum.

Yakni dari materi yang sederhana kepada yang rumit (*complex*), dari dekat kepada yang jauh, dan dari konkret kepada yang abstrak. Sementara itu, mata pelajaran muatan lokal ini disesuaikan dengan ciri khas lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bersangkutan untuk menambah mata pelajaran yang dianggap cukup penting untuk menunjang tercapai SKL secara optimal.

Pada kelas I tingkat wustha, isi kurikulumnya lebih banyak difokuskan kepada penguasaan ilmu bahasa (*'ilm al-lughah*). Oleh karena itu, di awal tahun pembelajaran, lebih banyak diberikan materi pelajaran ilmu alat atau Bahasa Arab dibandingkan dengan materi pelajaran ilmu *dirâsah islâmiyah*. Ini dilakukan dengan harapan bahwa jika santri sudah menguasai ilmu alat atau ilmu bahasa yang memadai, maka akan memudahkannya dalam mempelajari kajian-kajian keislaman lainnya (*dirâsah Islâmiyah*) seperti; Tafsir, Hadits, Mustalah al-Hadits, Ushul Fiqh, dan lain sebagainya. Dengan demikian, beban belajar untuk materi ilmu bahasa, seperti Nahwu dan Sharaf memiliki durasi jam pelajaran (JPL) yang besar. Berkisar antara 4-6 JPL/minggu.

Selanjutnya pihak pengembang berupaya untuk mengorganisasi materi berdasarkan ruang lingkup (*scope*), urutan penyajian materi, dan menjaga kesinambungan penyajian materi kurikulum pendidikan diniyah di lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat wustha. Juga yang perlu diperhatikan adalah prinsip relevansi isi materi dengan konteks pendidikan sekarang dan yang akan datang. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam mengorganisasi isi kurikulum adalah tentang beban belajar santri dalam menyelesaikan pendidikan di tingkat wustha. Jumlah beban belajar tersebut didistribusikan ke setiap tingkatan kelas yang direncanakan beban belajar setiap kelas berkisar antara 25-32 JPL/minggu.

Sesuai dengan tuntutan SKL lembaga pendidikan diniyah, maka isi (*content*) kurikulum harus menyesuaikan, dalam rangka mencapai SKL tersebut. Selain itu, harus memperhatikan pendistribusian mata pelajaran dan beban belajar pada jenjang kelas dan jam perminggunya, termasuk juga beban belajar (penawaran jam) untuk masing-masing mata pelajaran dan pada kelas berapa sebaiknya diberikan.

Berikut ini adalah distribusi mata pelajaran diniyah dengan beban belajar untuk masing kelas selama satu minggu. Ini merupakan sebuah tawaran/rekomendasi penulis.

Tabel Pra Desain Distribusi Standar Isi Kurikulum Pendidikan Diniyah Wustha (Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Wastha)

No.	Mata Pelajaran	Kelas			Ket
		I	II	III	
I	<i>Dirāsah al-Lughawiyah</i>				
1	Al-Lughah Al-'Arabiyah	2	2		
2	Sharaf	4-6	2	2	
3	Nahwu	4-6	2	2	
4	Qira'ah	2	2		
5	Khat/Kalighrafi	2	2	1	
6	Balaghah			1	
II	<i>Dirāsah al-Islāmiyah al-Ashaly</i>				
7	Ilmu Tauhid	2	2	2	
8	Al-Qur'an	2	2	1	
9	Hadits	2	2	1	
10	Tajwid	2			
11	Fiqih	1	2	1	
12	Akhlak	1	2	1	
13	Tarikh	1	2	2	
III	<i>Dirāsah al-Islāmiyah al-Furû'i</i>				
14	Faraidh			2	
15	Ushul Tafsir			1	
16	Tafsir		Γ	2	
17	Ulumul Hadits			2	
18	Ushul Fiqh			2	
IV	Mata Pelajaran Ciri khas Lembaga				
19	Muatan Lokal	2-4	2	2	
	Jumlah Jam Perminggu	27/32	26	25	

Pada tabel di atas terlihat bahwa untuk kelas I lebih banyak diberikan pelajaran ilmu alat, seperti *al-Lughah al-Arabiyah*, *Nahwu* dan *Sharaf*. Ini berlanjut hingga di kelas II. Sementara untuk *Dirâsah Islâmiyah* di kelas I diberikan hanya sedikit, namun kemudian di kelas II mulai diberikan kajian keislaman yang lebih dalam sampai pada kelas III. Di kelas ini, ilmu alat tetap diberikan, namun porsi bebannya sudah berkurang dan lebih banyak untuk menambah ilmu-ilmu keislaman lainnya. Seperti: Tafsir, Ulumul Hadist, Faraidh, dan Ushul Fiqih.

Selanjutnya masing-masing mata pelajaran diniyah tersebut akan dikembangkan dalam sebuah matriks yang berisi Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan uraian materi, serta jumlah jam pertemuan yang disesuaikan dengan *scope* dan *sequence*-nya dengan menggunakan format tabel sebagai berikut.

Format Desain KI, KD, Uraian Materi Mata Pelajaran Kurikulum Pendidikan Diniyah

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar (KD)	Pokok Bahasan (Maudhu') dan uraian Materi	Jlh Pert
1	2	3	4
Berisi: Sikap spritual (KI-1) Sikap sosial (KI-2) Pengetahuan (KI-3) Keterampilan (KI-4)			

Dari format di atas, kolom 1 Kompetensi Inti (KI) akan diisi dengan deskripsi KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4. Kolom 2 diisi dengan dekripsi KD yang mengacu kepada KI. Kolom 3 diisi dengan uraian materi pelajaran sesuai dengan *scope* dan *sequence* selama 1 (satu) tahun pelajaran, dan kolom 4 akan diisi jumlah pertemuan sesuai

dengan beban belajar mata pelajaran masing-masing. Dengan demikian, semua mata pelajaran diniyah tersusun tujuan terstruktur dari SKL turun kepada KI dan sampai KD.

3. Pengembangan Standar Proses Pada Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan

Sebuah kurikulum yang baru berupa ide atau gagasan tidak dapat memberikan manfaat jika tidak disampaikan kepada santri. Untuk menyampaikan isi kurikulum, maka diperlukan proses pembelajaran yang di dalamnya terjadi interaksi antara ustadz dan santri dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga diperlukan proses pembelajaran atau Proses Belajar-Mengajar (PBM) agar isi kurikulum dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL) yang sudah ditetapkan pada lembaga pendidikan.

Proses belajar mengajar (PBM) merupakan implementasi dari tujuan dan isi kurikulum yang masih berupa niat atau ide (rencana), maka untuk mewujudkan ide dan gagasan tersebut perlu adanya strategi untuk mentransformasi isi kurikulum dan mengupayakan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ini dimaksudkan agar santri dapat memiliki dan menguasai kompetensi yang terdapat dalam isi kurikulum.

Secara umum, pembelajaran sering diartikan sebagai interaksi antara pembelajar (santri) dengan pendidik (ustadz/ustdzah), dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sementara itu, menurut beberapa ahli, yang dimaksud proses pembelajaran adalah "Suatu kegiatan interaksi antara guru dan murid di mana akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar."⁸ Hamalik mengemukakan bahwa proses pembelajaran juga diartikan sebagai "suatu proses terjadinya interaksi antara pelajar, pengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula."⁹

⁸ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, 3.

⁹ Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 162.

Melalui interaksi tersebut akan terjadi perubahan pada diri santri, baik pada aspek *ta'lim* (kognitif), *ta'dib/tazkiyah* (afektif), maupun aspek *tarbiyah* (psikomotorik). Dengan demikian pedoman proses pembelajaran ini menjadi pedoman yang selanjutnya menjadi standar kegiatan pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, memang ada sebagian lembaga pendidikan diniyah yang sudah memiliki persiapan atau perencanaan seperti silabus dan RPP. Namun sebagian besar lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha yang belum memiliki dokumen silabus dan perencanaan pembelajaran tertulis (RPP) untuk kurikulum diniyah, ini terungkap dalam dokumen yang penulis dapatkan dari hasil wawancara.

Selanjutnya berdasarkan hasil kuesioner tentang pandangan pengelolaan pendidikan keagamaan dan *stakeholders* lainnya, terungkap bahwa pengembangan standar proses pembelajaran sudah saatnya dikembangkan secara terencana, terarah, dan sistematis. Hal ini diketahui dari pandangan pimpinan pondok, pandangan kepala lembaga pendidikan keagamaan Islam, pandangan ustadz/ustadzah, dan pandangan alumni/masyarakat yang menyatakan bahwa pengembangan standar pembelajaran sudah dalam level mendesak.

Secara keseluruhan, pandangan di atas menunjukkan bahwa minimal cukup mendesak untuk mengembangkan standar proses pembelajaran pada lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan. Bahkan yang menarik adalah pandangan para ustadz dan ustadzah yang menyatakan bahwa pengembangannya sangat mendesak. Oleh karena itu, dalam pengembangan standar proses pembelajaran pada kurikulum pendidikan diniyah di lembaga pendidikan keagamaan Islam perlu disusun dan dirumuskan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran yang harus diindahkan oleh para ustadz/ustadzah di lapangan.

Terdapat tiga tahapan dalam proses pembelajaran atau implementasi kurikulum, yaitu:

a. Tahap Perencanaan Proses Pembelajaran

Pada tahap ini, seorang guru harus membuat persiapan. Yakni berupa perencanaan yang meliputi: (a) mempelajari struktur dan sebaran pembahasan dalam silabus; (b) menyusun tujuan pembelajaran khusus (indikator); (c) mengorganisasi bahan; (d) menyusun rencana pembelajaran (RPP); (e) menetapkan metode, dan media; dan (f) menyiapkan prosedur dan alat evaluasi.

b. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran

Pada tahap ini merupakan penyampaian isi kurikulum kepada para santri dengan menggunakan pendekatan, metode dan media agar isi pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dituangkan dalam persiapan (RPP).

Secara umum pada tahap ini dibagi dalam tiga kegiatan, yaitu: (a) kegiatan awal (pendahuluan); (b) kegiatan inti; dan (c) kegiatan akhir (penutup). Ini semua akan dirumuskan dalam desain pengembangan kurikulum pendidikan diniyah pada standar proses.

c. Tahap Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi merupakan umpan balik (*feed back*) dari keseluruhan program pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi itu sendiri. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil belajar santri dalam rangka remedial atau akselerasi. Jadi pada tahap ini, evaluasi dilaksanakan dalam dua dimensi, yaitu: (a) evaluasi hasil belajar (produk) dan (b) evaluasi program pembelajaran (proses).

Dalam konteks proses pembelajaran pada kurikulum pendidikan diniyah diharapkan lebih menekankan pada nilai-nilai agama. Sebagai contoh pada tahap awal (pembukaan) pembelajaran hendaknya selalu dengan membaca doa dan agar santri selalu diingatkan kepada Allah Swt bahwa menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha-Nya.

Kemudian pada saat berlangsungnya interaksi pembelajaran, ustadz tidak selalu menyampaikan kurikulum yang aktual (tertulis). Tetapi juga berupaya selalu menyisipkan nasehat-nasehat yang merupakan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Sebab ajaran agama itu penuh dengan nasehat (*ad-dîn an-nashîhah*).

Jadi dalam menyampaikan isi kurikulum pendidikan diniyah tidak sekadar teoritis semata, melainkan berisi dengan nilai *ta'dib* dan *tazkiyah*. Selain itu, keterampilan keagamaan yang harus dimiliki santri juga tidak sekadar terampil, namun benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan upaya untuk menegakan nilai-nilai yang terkandung dalam isi kurikulum pendidikan diniyah, pihak penyelenggara pendidikan sudah menyediakan satu program kurikulum yaitu kegiatan ekstra kurikuler yang waktu pelaksanaannya pada sore dan malam hari bahkan pada hari-hari libur diisi dengan kegiatan yang mengarahkan santrinya untuk selalu mengamalkan ilmu yang diperoleh pada kegiatan intra kurikuler.

Kegiatan ekstra kurikuler di lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat wustha di Kalimantan Selatan sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Terutama untuk menamkan nilai-nilai keagamaan, memperdalam wawasan juga untuk memberikan bimbingan bagi santri yang ingin meningkatkan pengetahuan dalam bidang ilmu agama tertentu. Hal ini diketahui dari wawancara dengan responden.

Untuk mengembangkan pelaksanaan kurikulum pendidikan diniyah dalam mendesain standar proses harus menekankan pada tahapan PBM, nilai-nilai keagamaan dalam *hidden curriculum*, meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler. Dalam rangka ini, diharapkan ustadz dan ustadzah mempunyai pedoman dalam melaksanakan kurikulum. Diketahui bahwa selama ini mereka berjalan sendiri sesuai pengalaman dan tidak ada pedoman tertulis. Sehingga tidak dapat diketahui apakah yang mereka lakukan selama ini sudah pada rel (jalan) yang benar

dalam menyajikan isi atau materi diniyah kepada para santri-santrinya atau belum. Dengan demikian, pengembangan standar proses pelaksanaan kurikulum pendidikan diniyah diharapkan dapat membantu para penyelenggara pendidikan keagamaan khususnya ustad/ustadzah di lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat wustha.

4. Pengembangan Standar Evaluasi Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan

Evaluasi adalah salah satu komponen utama dalam sebuah kurikulum yang eksistensinya sangat penting dalam sistem pelaksanaan kurikulum. Hal ini karena evaluasi selalu terkait dengan komponen-komponen lainnya dalam sebuah kurikulum.

Salah satu tujuan evaluasi adalah sebagai umpan balik (*feed back*) dalam rangka perbaikan program pembelajaran (penilaian proses) dan evaluasi juga untuk mengukur hasil belajar santri (penilaian produk). Oleh karena itu, evaluasi kurikulum harus menjadi perhatian bagi ustadz/ustdzah dan bagi penyelenggara pendidikan. Sebab berdasarkan atau dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui ketercapaian target kurikulum (SKL) dan tingkat efisiensi penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan keagamaan Islam secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh di lapangan, evaluasi memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran kurikulum pendidikan diniyah di semua lembaga pendidikan keagamaan Islam. Pelaksanaan evaluasi kurikulum lebih banyak berorientasi pada aspek kognitif dan psikomotorik. Walaupun sebenarnya evaluasi sudah dilaksanakan dengan tiga jenis evaluasi, yaitu: ujian tertulis, ujian lisan dan ujian praktik keagamaan. Demikian yang penulis ketahui melalui observasi.

Hasil temuan lainnya bahwa instrumen tes tertulis yang dilaksanakan dalam evaluasi kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha, ada yang menggunakan tes pilihan ganda (*multiple choices*), dan kebanyakan ustadz/ustadzah menggunakan tes uraian (*essay*).

Selain itu, ditemukan data ketidak-seragaman soal-soal Ujian Tengah Semester (UTS) yang dilakukan dalam evaluasi kurikulum pendidikan diniyah sekalipun dalam mata pelajaran sama, disebabkan berbeda tenaga pengajarnya (ustadz). Hal ini terungkap dari hasil wawancara.

Selain itu juga terungkap bahwa sebagian lembaga pendidikan keagamaan Islam belum memiliki standar ketuntasan minimal untuk kurikulum pendidikan diniyah. Berbeda halnya dengan kurikulum Kemenag yang memiliki standar dalam evaluasi pembelajaran.

Berdasarkan hasil kuesioner tentang pandangan pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam dan *stakeholders* lainnya, terungkap pengembangan standar evaluasi kurikulum pendidikan diniyah memang sudah saatnya untuk dikembangkan secara prosedural, sistematis, dan akuntabel. Hal ini diketahui melalui pandangan pimpinan pondok, pandangan kepala lembaga pendidikan keagamaan Islam, pandangan sebagian ustadz/ustadzah, dan pandangan alumni/masyarakat.

Intinya adalah menyatakan mendesaknya untuk dikembangkan standar evaluasi kurikulum diniyah tingkat wustha. Dengan demikian, maka sudah saatnya untuk mengembangkan standar evaluasi kurikulum pendidikan diniyah pada lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat wustha di Kalimantan Selatan.

Pengembangan standar evaluasi kurikulum pendidikan diniyah harus memperhatikan SKL dan karakteristik kurikulum pendidikan diniyah yang berbeda dengan kurikulum lainnya. Pada kurikulum pendidikan diniyah mengandung aspek pengetahuan (*ta'lim*), aspek penanaman nilai-nilai agama (*ta'dib* dan *tazkiyah*), aspek keterampilan keagamaan, dan aspek pengamalan ibadah (*tarbiyah*). Oleh karena itu, standar evaluasi kurikulum yang dikembangkan hendaknya memenuhi aspek-aspek tersebut secara komprehensif dan seimbang (*balance*) di antara aspek-aspek tersebut. Evaluasi pendidikan Islam (kurikulum pendidikan diniyah) harus integral antara ranah kognitif, afektif dan psikomotor dengan melaksanakan 3 (tiga) macam tes, yaitu: tes lisan (hafalan), tes tertulis, dan tes

kinerja atau unjuk kerja baik berupa akhlak maupun pengamalan ibadah.¹⁰

Secara khusus, sasaran atau yang menjadi objek evaluasi pendidikan Islam pada kurikulum pendidikan diniyah adalah santri sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pendidikan. Agar terwujud santri yang *tafaqquh fi ad-dîn* yang mengemban tugas sebagai *'abdullâh* dan *khalîfatullâh* di muka bumi Allah Swt.

Sasaran/objek evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya melihat empat kemampuan (kompetensi) peserta didik, yaitu:

- a. Sikap dan pengalaman yang berhubungan antara pribadi dengan tuhan,nya,
- b. Sikap dan pengalaman terhadap arti yang berhubungan antara dirinya dengan masyarakat.
- c. Sikap dan pengalaman terhadap arti yang berhubungan antara dirinya dengan alam sekitarnya.
- d. Sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, dan selaku *khalifah*-Nya di muka bumi.¹¹

Evaluasi pembelajaran (kurikulum) yang dilaksanakan tidak hanya sekadar menilai hasil belajar santri dari segi kognitif semata atau sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran untuk memperoleh nilai santri. Namun diharapkan hasil evaluasi dapat memberikan makna yang jauh lebih besar sebagai bahan umpan balik (*feed back*) dalam rangka perbaikan pembelajaran dan *remedial teaching*.

Kebermaknaan hasil evaluasi dapat dilihat dari fungsi evaluasi itu sendiri, yaitu berfungsi sebagai umpan balik (*feed back*) terhadap kegiatan pembelajaran dan pendidikan Islam. Umpan balik (*feed back*) ini berguna untuk:

- a. *Ishlâh*, yaitu perbaikan terhadap semua komponen pembelajaran, termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan

¹⁰ Hamid, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*, 127.

¹¹ Mujib dan Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, 212.

kebiasaan-kebiasaan peserta didik.

- b. *Tazkiyah*, yakni penyucian. Maksudnya melihat kembali program-program pendidikan yang dilakukan, apakah program tersebut penting atau tidak dalam kehidupan peserta didik, atautkah menyimpang dari program atau tujuan semula.
- c. *Tajdīd*, yaitu memodernisasikan semua kegiatan pendidikan. Kegiatan yang tidak relevan dengan kepentingan semua pihak akan diubah dan dicarikan gantinya ke arah yang lebih maju.
- d. *Ad-dâkhl*, yaitu masukan sebagai laporan bagi orang tua murid berupa rapor, ijazah, piagam dan sebagainya.¹²

Supaya evaluasi hasil belajar dapat memberikan makna terhadap perbaikan baik dalam makna *tazkiyah*, *tajdīd* maupun *ishlâh*, maka evaluasi harus dilaksanakan dengan berbagai prinsip dan kriteria yang valid dan reliabel. Sehingga alat ukur yang digunakan tepat terhadap apa yang hendak diukur.

Oleh karena itu, pengembang perlu merumuskan standar pengukuran dalam setiap instrumen penilaian, minimal tiap butir (*item*) soal mengacu kepada tujuan khusus (indikator) yang hendak diukur. Dengan demikian desain kurikulum pendidikan diniyah tidak saja subjek akademik tapi sudah menuju kepada model teknologis yang dapat terukur kompetensinya. Sebagai sebuah rekomendasi sebaiknya untuk penilaian kurikulum pendidikan diniyah lebih banyak menggunakan soal uraian (*essay*) daripada soal dalam bentuk pilihan ganda (*multiple choice*), sehingga memungkinkan santri lebih kritis dalam berpendapat dan mengemukakan alasan daripada sekadar ingatan dan pemahaman.

Penyusunan soal, baik dalam bentuk uraian (*essay*) ataupun dalam bentuk test objektif seperti pilihan ganda harus memenuhi beberapa kriteria. Soal essay yang dibuat dan disusun harus berdasarkan keseimbangan antara soal mudah, sedang, dan sukar dengan prosentasi 35-45% soal mudah, 30-40% soal sedang, dan 20-25% soal sukar atau sulit. Selain itu, soal *essay* juga dengan

¹² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 204-5.

menempatkan nomor-nomor soal yang mudah, sedang, dan sulit secara proporsional.

Sementara itu, untuk soal yang berupa Pilihan Ganda (PG), sebaiknya dibuatkan kisi-kisinya, dan alternatif jawaban benar harus ada keseimbangan jawaban antara a, b, c, dan d. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 pada soal PG sebaiknya pada alternatif pilihan b atau c. Sangat tidak dianjurkan menempatkan jawaban yang benar pada pilihan jawaban a atau d.

Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah baik soal essay ataupun objektif harus mengacu kepada tujuan pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan sangat membantu santri untuk memperoleh hasil belajar lebih optimal karena santri merasa nyaman dengan bentuk dan penyajian soal-soal dalam setiap ujian. Sebaliknya, tidak jarang santri yang sebenarnya sudah belajar dengan baik namun pada saat berhadapan dengan soal essay yang pada soal pertama seorang guru meletakkan soal yang sukar/sulit, begitu santri membaca dan mencoba memahaminya mungkin saja dia *shock* dan *blank* pada soal-soal berikutnya. Padahal ada kemungkinan soal berikutnya cukup mudah bahkan sangat mudah baginya. Sebab begitu melihat soal yang sukar santri sudah hilang rasa percaya dirinya. Kejadian seperti ini diharapkan menjadi catatan bagi ustadz/ustadzah dalam mengorganisasi butir-butir soal *essay*.

Salah satu fungsi evaluasi kurikulum adalah sebagai umpan balik (*feed back*). Fungsi ini harus dilaksanakan bagi ustadz dan ustadzah dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan diniyah, yaitu; berupaya untuk memperbaiki program pembelajaran, seperti meninjau kembali persiapan, perencanaan pembelajaran, materi, metode, media dan instrumen evaluasi itu sendiri, dan berupaya melaksanakan remedial bagi santri yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKBM).

B. Rancangan Desain Pengembangan Kurikulum

Rancangan desain kurikulum yang dikembangkan ini mengacu pada 4 standar pendidikan, yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi kurikulum, standar proses, dan standar penilaian. Berdasarkan itu, maka rancangan desain kurikulum yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

1. Rancangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada lembaga pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan adalah *insân kâmil* sebagai *'abdullâh* dan *khalîfatullâh* yang *tafaqquh fî ad-dîn*, yang untuk mencapai tersebut harus memuat 3 unsur pendidikan Islam, yaitu:

- a. *Ta'dîb wa at-tazkiyah (attitude)*,
- b. *Ta'lîm wa at-tadrîs (knowledge)*, dan
- c. *Tarbiyah wa al-mahârât (skills)*.

2. Rancangan Standar Isi/Materi Kurikulum Pendidikan Diniyah

Standar isi kurikulum pendidikan diniyah mengacu pada SKL di atas adalah *ta'dîb wa at-tazkiyah* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: *al-mauqif ar-rûhiyah* (KI-1), dan *al-mauqif al-lijtimâ'i* (KI-2). Pembagian tersebut sesuai dengan dimensi *habl min Allâh* dan *habl min an-nâs*, *ta'lîm wa at-tadrîs* (KI-3) dan *tarbiyah wa al-mahârât* (KI-4). Kemudian diklasifikasikan menjadi tiga (3) kelompok *dirâsah*, yaitu:

- a. *Dirâsah lughawiyah*, berisi ilmu alat/bahasa.
- b. *Dirâsah islâmiyah al-'ashâl*, berisi ilmu-ilmu keislaman yang pokok.
- c. *Dirâsah islâmiyah furû'î*, berisi ilmu-ilmu wawasan keislaman/pendalaman/pelengkap.

Isi/materi kurikulum pendidikan diniyah mengandung pengetahuan konseptual, faktual, prinsip dan prosedural ilmu-ilmu keislaman. Maksudnya adalah bahwa isi kurikulum pendidikan diniyah mengandung pengetahuan yang berupa koseptual (berupa pengertian-pengertian atau konsep-konsep), faktual

(realita), prinsip (ketentuan hak dan bathil, halal dan haram) dan berupa prosedur (*kaifiyah 'ibâdah*). Selain itu, isi kurikulum diniyah tidak hanya memuat pengetahuan logika (*'aqliyah*), etika (akhlak) dan estetika (*ihsân*) tetapi yang terpenting adalah pengetahuan tentang keimanan (aqidah). Selain itu, mengandung aspek *attitude* yang melahirkan *akhlaq al-karîmah* dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya setiap mata pelajaran dijabarkan menjadi KI, KD, dan uraian materi masing-masing mata pelajaran diniyah ke dalam format tertentu.

3. Rancangan Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran kurikulum pendidikan diniyah mengacu pada tiga (3) kegiatan yang dilaksanakan, yang meliputi:

- a. Kegiatan perencanaan pembelajaran, berupa; menyusun silabus, membuat perencanaan pembelajaran (RPP), mengorganisasikan materi pembelajaran, menetapkan metode pembelajaran, media, prosedur dan sistem evaluasi pembelajaran.
- b. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang merupakan penyajian materi dengan pendekatan *ta'lim wa at-tadrîs, ta'dîb wa at-tazkiyah, dan tarbiyah wa al-mahârât*
- c. Kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa.
- d. Kegiatan pengawasan pembelajaran, yaitu monitoring terhadap kegiatan proses belajar-mengajar yang berlangsung selama periode waktu tertentu.

Pada perumusan standar proses, ustadz/ustadzah sebaiknya menyusun beberapa kriteria atau ketentuan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

4. Rancangan Standar Penilaian

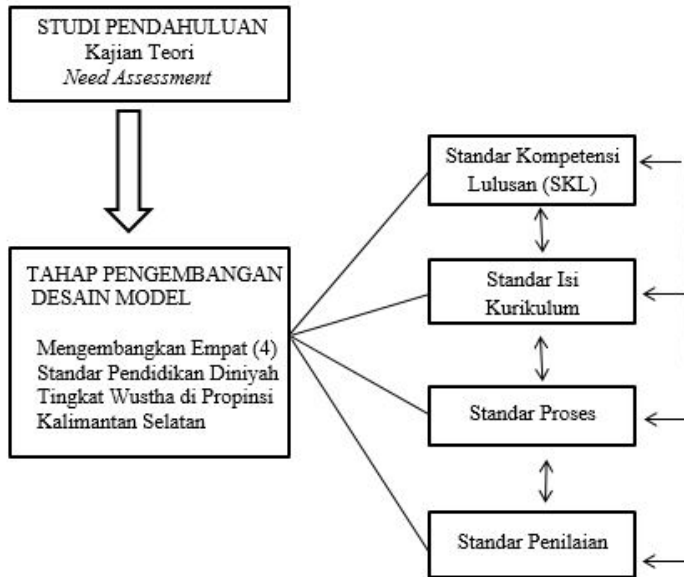
Pada kurikulum pendidikan diniyah mengandung aspek pengetahuan (*ta'lim*), aspek penanaman nilai-nilai agama (*ta'dîb wa at-tazkiyah*), aspek keterampilan keagamaan, dan aspek pengamalan ibadah (*tarbiyah wa al-mahârât*). Oleh karena itu, standar evaluasi

pendidikan kurikulum yang dikembangkan hendaknya memenuhi aspek-aspek tersebut secara komprehensif dan seimbang (*balance*) di antara aspek-aspek tersebut.

Telah disinggung sebelumnya bahwa karakteristik isi materi/ kurikulum pendidikan diniyah mengandung aspek konseptual, faktual, prinsip, dan prosedural. Sesuai dengan itu, maka jenis evaluasi yang dilakukan harus menggunakan tes tertulis, tes lisan dan tes praktik (kinerja). Evaluasi kurikulum pendidikan diniyah ini dilaksanakan pada Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS), dan Ulangan Akhir Semester (UAS).

Selain itu, evaluasi kurikulum pendidikan diniyah memiliki beberapa prinsip penilaian dan acuan kriteria penilaian yaitu: Penilaian Acuan Kriteria (PAK) yang merupakan penilaian kompetensi, dan Penilaian Acuan Etik (PAE) yaitu penilaian yang mengacu pada standar etika yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan keagamaan Islam. Dengan demikian, nantinya akan terwujud desain kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha yang dapat dijadikan sebagai rujukan/pedoman dalam mengembangkan kurikulum di tingkat lembaga dan tingkat mata pelajaran.

Berikut dicantumkan gambar *grand design* pengembangan kurikulum diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan.

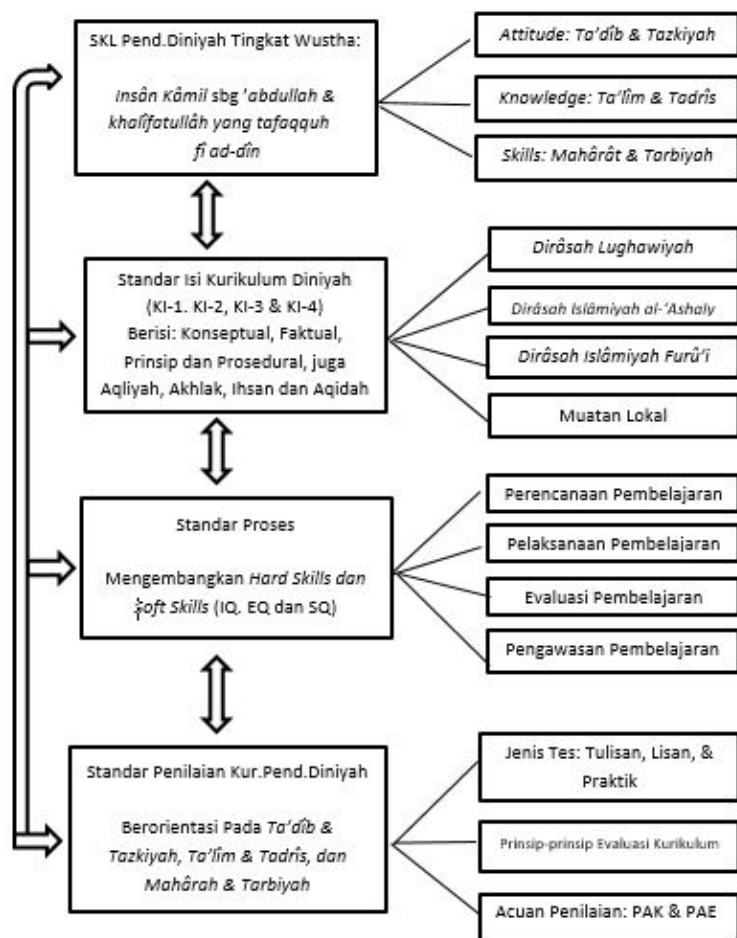


Keterangan:

- ↓ = Hubungan keberlanjutan
- ↕ = Hubungan timbal balik

Gambar 3. *Grand design* pengembangan kurikulum diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan

Sedangkan skema 4 standar pendidikan diniyah mengandung beberapa dimensi dan unsur di dalamnya yang saling keterkaitan. Dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 4. Standar pendidikan diniyah

C. Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah di Kalimantan Selatan dengan 4 Standar

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Lembaga Pendidikan Diniyah

Pada upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan nasional, diperlukan profil kualifikasi dan kriteria kemampuan lulusan pendidikan keagamaan Islam (pendidikan diniyah) yang dituangkan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Terkait dengan ini, dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa

SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, sangat penting untuk memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang membagi ke dalam 9 jenjang kualifikasi, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan program doktor (S3).

Berkaitan dengan KKNI tersebut, maka lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat wustha berada pada level jenjang pendidikan dasar dan termasuk pada KKNI jenjang kualifikasi satu (1), seperti tampak pada deskripsi berikut ini:

DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI KKNI

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
Deskripsi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya, 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, 4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya, 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain, 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 7. Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.
1 Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan faktual. 2. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

Berdasarkan tujuan Pendidikan Nasional dan tuntutan KKNI di atas, dalam konteks pendidikan keagamaan Islam, SKL pada lembaga pendidikan diniyah mencakup tiga dimensi, yaitu: *ta'dīb wa tazkiyah (attitude)*, *ta'lîm wa tadrîs (knowledge)*, dan *tarbiyah wa al-mahârah (skills)*. Selain itu, lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan mempunyai salah satu ciri khas atau karakteristik tersendiri, yaitu senantiasa memenuhi dan mengakomodir tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga dalam mengembangkan program pendidikan diniyah selalu beorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain menyesuaikan dengan akar rumput (*grassroots*).

a. Rumusan SKL Lembaga Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan

Lulusan lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha adalah *insân kâmil* sebagai hamba Allah (*'abdullah*) dan *khalîfatullah* yang *tafaqquh fî ad-dîn*, yang memiliki tiga dimensi, yaitu: *attitude*, *knowledge* dan kemampuan *skills*, sebagaimana dijelaskan secara detail pada tabel berikut:

No	Dimensi	Kriteria Kualifikasi Kemampuan
01	<i>Ta'dīb wa Tazkiyah (Attitude)</i>	Memiliki perilaku yang merupakan cerminan iman dan takwa berdasarkan tauhid <i>ahlu sunnah wa al-jamaah</i> , berakhlak mulia, adil, jujur, amanah, ikhlas, tawakal dan bertanggung jawab serta mengabdikan pada kepentingan umat dan kelestarian lingkungan alam.
02	<i>Ta'lîm dan Tadrîs (Knowledge)</i>	Memiliki pengetahuan konseptual dan faktual, prinsipal, dan prosedural terkait kitab-kitab klasik yang relevan dengan konteks kekinian dalam faham <i>ahlu sunnah wa al-jamaah</i> , yang diklasifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu: <i>dirâsah lughawiyah</i> , <i>dirâsah Islâmîyah al-'ashaly</i> , dan <i>dirâsah Islâmîyah Furû'iyah</i> .
03	<i>Tarbiyah dan Mahârât (Skills)</i>	Memiliki keterampilan berupa kemampuan berfikir dan bertindak yang efektif dan kreatif, juga mengamalkan keterampilan keagamaan dan ibadah lainnya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, madrasah dan lingkungan masyarakat yang dilandasi <i>akhlâq al-karîmah</i> .

b. Ruang Lingkup Ketercapaian SKL

SKL yang terdiri tiga dimensi sesuai dengan kriteria kualifikasi kemampuan santri sebagaimana tercantum pada tabel di atas, diharapkan dapat dicapai setelah para santri menyelesaikan studinya pada lembaga pendidikan diniyah jenjang wustha. Untuk mengetahui ketercapaian SKL tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap fase pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari pengawasan dan evaluasi yang komprehensif dapat digunakan nantinya sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan bagi penyempurnaan SKL di masa yang akan datang.

2. Standar Isi (Content) Kurikulum Pendidikan Diniyah

Menetapkan standar isi kurikulum pendidikan diniyah juga menjadi bagian yang urgen. Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah terakomodir pada SKL lembaga pendidikan keagamaan Islam di atas, yang mencakup tiga dimensi, yaitu: *ta'dīb wa at-tazkiyah (attitude)*, *ta'līm wa at-tadrīs (knowledge)*, dan *tarbiyah wa al-mahârât (skills)* tersebut, maka perlu menyusun dan menetapkan standar isi kurikulum diniyah yang memuat ruang lingkup (*scope*) bahasan, dan urutan penyajian (*sequence*) materi pelajaran berdasarkan tingkat perkembangan santri dan jenjang pendidikan tingkat wustha/tsanawiyah.

Di masa depan tentunya semakin terjadi kompetisi yang sangat ketat dan terbuka. Era informasi dan globalisasi dewasa ini tentu menjadi suatu keniscayaan pihak yang terkait dalam dunia pendidikan untuk dapat mengantisipasi dan menyiapkan generasi masa depan yang lebih handal dan mandiri. Selain itu, dalam rangka memenuhi dan menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045, dan sekaligus menyambut pertumbuhan penduduk usia produktif atau yang sering disebut sebagai bonus demografi bangsa Indonesia. Oleh karenanya diperlukan peninjauan kembali kurikulum yang sedang berjalan dengan menata kembali (*redesign*) kurikulum pada lembaga pendidikan diniyah khususnya pada jenjang wustha/tsanaswiyah.

Standar isi yang dirumuskan pada kurikulum pendidikan diniyah ini mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di atas. Penyusunan standar isi disesuaikan dengan ruang lingkup dan urutan menyajikan materi berdasarkan situasi dan kondisi riil di lembaga pendidikan diniyah setempat dan dirumuskan oleh ustadz/ustadzah pengajar mata pelajaran masing-masing (pendekatan *grassroots*).

Meskipun demikian, rambu-rambu penetapan standar isi tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan regulasi pemerintah Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menetapkan *scope* dan *sequence* yang sesuai dengan SKL, yang meliputi: dimensi: *ta'dîb wa at-tazkiyah (attitude)*, *ta'lîm wa at-tadrîs (knowledge)*, dan *tarbiyah wa al-mahârât (skills)*.

Ketiga dimensi tersebut diperoleh dengan cara yang berbeda-beda. *Ta'dîb (attitude)* dibentuk melalui kegiatan: menerima, menghargai, menghayati, meyakini dan muhasabah. Sedangkan *Ta'lîm wa at-tadrîs (knowledge)* diperoleh melalui kegiatan: mengetahui, memahami, menerapkan/mengamalkan, menganalisis dan mencipta. Kemudian *Tarbiyah wa al-mahârât (Skills)* diperoleh melalui kegiatan: mengamati, mencoba, menalar, mencipta, dan membiasakan hal yang positif (*'amal shaleh* dan *akhlaq al-karîmah*).

a. Rumusan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Diniyah tingkat Wustha/Tsanawiyah

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa berdasarkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha/tsanawiyah berada pada jenjang pendidikan dasar yang menempati posisi level kualifikasi tingkat I. Sementara berdasarkan tingkat kompetensi (Penmendikbud No. 64 Tahun 2013) kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha berada pada tingkat kompetensi level 4 dan 4A yang merupakan kemampuan peralihan jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah atau dengan kata lain pada tingkat wustha berada di antara tingkat *ula* dan tingkat *'ulya*.

Standar isi yang dirumuskan mengacu kepada tiga dimensi yang telah disebutkan di atas. Yaitu: dimensi *ta'dîb wa at-tazkiyah*, yang dibagi ke dalam dua sasaran, yaitu: *al-mauqif ar-rûhiyah* dan *al-mauqif al-ijtimâ'i*. Pembagian tersebut sesuai dengan dimensi *hablu min Allah* dan *hablu min an-nâs*. Sedangkan *ta'lim wa at-tadrîs* dan *tarbiyah wa al-mahârât*, diuraikan berikut ini:

1) Tingkat kompetensi level 4 dan 4A

Lulusan lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan (*skills*) sebagai berikut:

No.	Kompetensi (al-Kafâ'ât)	Dekripsi Kompetensi
01	Sikap Spritual (<i>al-Mauqif ar-Rûhiyah</i>) (KI-1)	Menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits (<i>faham ahlu sunnah wa al-jamaah</i>).
02	Sikap Sosial (<i>al-Mauqif al-Ijtimâ'i</i>) (KI-2)	Menghayati, meyakini dan mengamalkan akhlak karimah yang meliputi: jujur, adil, amanah, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara aktif dan efektif dengan lingkungan masyarakat (umat) dan lingkungan alam dalam pergaulan di rumah, di madrasah dan di masyarakat.
03	Pengetahuan (<i>al-Kafâ'ah al-ma'rifah</i>) (KI-3)	Memiliki pengetahuan konseptual dan faktual, prinsip, dan prosedural terkait kitab-kitab klasik yang relevan dengan konteks kekinian dalam faham <i>ahlu sunnah wa al-jama'ah</i> , yang meliputi; ilmu alat, ilmu Tauhid, ilmu Fiqh, Qur'an, Ulum al-Hadits, ilmu Akhlak dan Ushul Fiqh, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kematangan belajar santri.

No.	Kompetensi (al-Kafâ'ât)	Dekripsi Kompetensi
04	Keterampilan (at-Tarbiyah wal Mahârât) (KI-4)	Mengolah, menyajikan, menalar dan mencipta dalam ranah konkret, seperti: mengamalkan, menguraikan, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, seperti: menulis membaca, menerjemah-kan, menghitung, menggambarkan dan mengarang sesuai dengan yang disajikan dan dipelajari di lembaga pendidikan keagamaan dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang (kitab tertentu).

- 2) Struktur kurikulum standar isi kurikulum pendidikan diniyah Berdasarkan standar kompetensi lulusan di atas, dan sesuai dengan kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, kompetensi pengetahuan dan keterampilan, maka disusunlah struktur kurikulum yang menjadi standar isi kurikulum diniyah untuk mewujudkan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Madrasah Diniyah (Madin) yang telah dirumuskan. Adapun struktur kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha sebagai berikut:

Struktur Kurikulum Diniyah Tingkat Wustha

No.	Mata Pelajaran	Kelas			Ket.
		I	II	III	
I	<i>Dirâsah al Lughawiyah</i>				
	1 Lughah al-'Arabiyah	2	2		
	2 Sharaf	4	2	2	
	3 Nahwu	4	2	2	
	4 Qira'ah	2	2		
	5 Khat/Kaligrafi	2	2	1	
	6 Balaghah			1	
II	<i>Dirâsah al-Islâmiah al-Ashaly</i>				

No.	Mata Pelajaran	Kelas			Ket.
		I	II	III	
7	Ilmu Tauhid	2	2	2	
8	Al-Qur'an	2	2	1	
9	Hadits	Γ	2	1	
10	Tajwid	2			
11	Fiqih	1	2	1	
12	Akhlak	1	2	1	
13	Tarikh	1	2	2	
III Dirâsah al-Islâmiyah al-Furû'i					
14	Faraidh			2	
15	Ushul Tafsir			1	
16	Tafsir		Γ	2	
17	Ulumul Hadits			2	
18	Ushul Fiqh			2	
IV Mata Pelajaran Ciri Khas Lembaga					
19	Muatan local	2-4	2	2	
	Jumlah Jam Perminggu	27/29	26	25	

- 3) Kompetensi Inti (KI), Standar Kompetensi (SK), Ruang Lingkup (*Scope*) dan Urutan Penyajian (*Sequence*), dan Bobot (Beban) Belajar Isi Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha

Dalam rangka memudahkan penyajian Standar Isi kurikulum diniyah, dengan ini disajikan dalam bentuk matriks per mata pelajaran, peringkat kelas, beban belajar, KI, KD, dan uraian materi pelajaran sesuai dengan *scope* dan *sequencenya*, serta jumlah pertemuan dalam 2 (dua) semester. Penjabaran KI, KD dan uraian materi pokok, serta bobot belajar perminggunya, seperti contoh matriks berikut ini:

Mata Pelajaran: *al-Lughah al 'Arabiyah* (2 JPL/Minggu)

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar (KD)	Pokok Bahasan (Maudhu') dan Uraian Materi	Jumlah Pertemuan
<p>Kelas I (2 Jpl)</p> <p>Menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits faham <i>ahlu sunnah wa al-jamaah</i></p> <p>Meyakini dan mengamalkan <i>akhlaq al-karimah</i> yang meliputi: jujur, adil, amanah, disiplin, bertanggung-jawab, peduli, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara aktif dan efektif dalam bermasyarakat</p> <p>Memiliki pengetahuan tentang kaidah-kaidah struktur Bahasa Arab</p>	<p>Memahami dasar penggunaan kata mudzakkar dan muannats.</p> <p>Memahami dasar penggunaan huruf jar, dhamir dan isim isyarah</p> <p>Memahami 'adad (bilangan) 1-001 mudzakkar dan muannats</p> <p>Memahami fi'il dasar (madhi, mudhari dan 'amar)</p> <p>Memahami dan dapat menunjukkan kalimat arah mata angin dan kalimat yang menggunakan waktu (<i>as-sâ'ah</i>)</p>	<p>١. المقدمة</p> <p>٢. الكلمة المذكر والكلمة المؤنث</p> <p>٣. الحروف الجر</p> <p>٤. الضمائر و الإسم الإشارة</p> <p>٥. مفرد و الجمع</p> <p>٦. العداد (١-٢٠)</p> <p>٧. كان وأخواتها</p> <p>٨. إسم تفضيل</p> <p>٩. الأفعال (فعل الماضي , فعل المضارع , فعل الأمر)</p> <p>١٠. المفردات: الأعضاء البدنية</p> <p>١١. الجهات: الشمال , الجنوب و غيرها</p> <p>١٢. العداد (١٠٠١-٠٠٠١)</p> <p>١٣. الساعة</p>	

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar (KD)	Pokok Bahasan (Maudhu') dan Uraian Materi	Jumlah Pertemuan
Memiliki keterampilan berbahasa Arab lisan dalam percakapan sehari-hari	Terampil menghafal mufradat dan dapat membuat kalimat sederhana	١٤. التدريبات القراءة والترجمة	32
		Jumlah Pertemuan	
<p>Kelas II (2 Jpl)</p> <p>Menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits faham <i>ahlu sunnah wa al-jamaah</i></p> <p>Meyakini dan mengamalkan <i>akhlaq al-karimah</i> yang meliputi: jujur, adil, amanah, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara aktif dan efektif dalam bermasyarakat</p>	<p>Memahami isi teks tentang hari dan dapat memperbincangkannya</p> <p>Memahami bacaan tentang hari libur dalam Bahasa Arab</p> <p>Memahami isi kandungan teks <i>al-Ab wal Um</i> dan dapat membuat kalimat dengan <i>fi'il amar</i></p> <p>Memahami dan dapat menggunakan kata ganti (dhamir) dalam kalimat</p>	<p>١. الدرس الأول: اليوم والأمس</p> <p>٢. الدرس الثاني: الحوار</p> <p>٣. الدرس الثالث: فعل الأمر</p> <p>٤. الدرس الرابع: يوم العطلة</p> <p>٥. الدرس الخامس: إذا جاءت العطلة</p> <p>٦. الدرس السادس: الأب والأم</p> <p>٧. الدرس السابع: تحويل الكلمة إلى الأمر</p> <p>٨. الدرس الثامن: الضمائر</p> <p>٩. الدرس التاسع: للمخاطبة</p> <p>١٠. الدرس العاشر: في النهي</p>	

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar (KD)	Pokok Bahasan (Maudhu') dan Uraian Materi	Jumlah Pertemuan
<p>Memiliki pengetahuan tentang kaidah-kaidah dalam struktur bahasa Arab</p> <p>Memiliki keterampilan berbahasa Arab lisan dalam percakapan sehari-hari</p>	<p>Memahami penggunaan fiil nahi dalam kalimat</p> <p>Memahami dan dapat menggunakan isim mashdar dalam kalimat</p> <p>Memahami fiil tsulasi mujarrad dan majid</p> <p>Memahami fi'il mu'tal dan shighah al mashdar</p>	<p>١١. الدرس الحادي عشر: المصدر (أ)</p> <p>١٢. الدرس الثاني عشر: المصدر (ب)</p> <p>١٣. الدرس الثالث عشر: المصدر (ج)</p> <p>١٤. الدرس الرابع عشر: في الأعداد والحساب</p> <p>١٥. الملحق الأول: ثلاثي مجرد</p> <p>١٦. الملحق الثاني: ثلاثي مزيد</p> <p>١٧. الملحق الثالث: الفعل المعتل</p> <p>١٨. الملحق الرابع: صيغ المصدر</p>	
	Jumlah Pertemuan	30	

3. Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Diniyah

a. Dasar Pemikiran

Tujuan pendidikan dapat diwujudkan apabila isi (*content*) pendidikan sudah ditentukan dan selanjutnya isi pendidikan disampaikan melalui proses pelaksanaan pembelajaran. Proses pendidikan yang efisien dan efektif akan dapat mencapai tujuan pendidikan (SKL) dengan optimal. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus memiliki standar yang akuntabel.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai tujuan

pendidikan (Kompetensi Lulusan). Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis santri.

Proses belajar pada lembaga pendidikan keagamaan Islam seyogyanya memperhatikan karakteristik kurikulum pendidikan diniyah yang berorientasi pada pembentukan santri yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan proses belajar selalu mengedepankan nasihat-nasihat baik dengan lisan maupun dengan perbuatan (keteladanan) sesuai dengan prinsip *ad-dîn an-nashîhah*. Untuk itu lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagai satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses dan penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Berdasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi kurikulum pendidikan diniyah, maka proses pembelajaran diharapkan dapat memenuhi prinsip berikut ini:

- 1) Pembelajaran selalu dimulai dengan berdoa kepada Allah Swt dan diakhiri dengan berdoa juga.
- 2) Pembelajaran berorientasi pada rasa ingin tahu santri (mencari tahu) bukan diberi tahu.
- 3) Ustadz sebagai salah satu sumber informasi dalam pembelajaran, tetapi santri dapat pula memanfaatkan sumber informasi lain dalam pembelajaran.
- 4) Dari materi tekstual menuju kontekstual atau kehidupan nyata.
- 5) Ustadz berupaya untuk menjembatani materi pembelajaran yang terpisah jika ada keterkaitannya dengan materi yang sedang dipelajari dalam pembelajaran.
- 6) Pembelajaran lebih berorientasi pada pengetahuan terapan atau aplikatif.

- 7) Menyeimbangkan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*) atau antara dimensi *badaniyah* dan *rûhiyah*.
- 8) Ustadz dan ustadzah harus dapat menyelaraskan antara IQ, EQ, dan SQ dalam setiap proses pembelajaran.
- 9) Pendidikan berorientasi pada pendidikan sepanjang hayat (*thûlul hayâh*) atau *long life education*.
- 10) Pembelajaran menerapkan nilai-nilai islami dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran.
- 11) Pembelajaran berlangsung di mana saja dan dapat terjadi kapan saja.
- 12) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.
- 13) Adanya pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang sosial budaya santri.

Sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, kemudian dirumuskan standar proses yang mencakup: perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil dan pengawasan proses pembelajaran.

b. Desain Proses Pembelajaran

1) Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal untuk membuat persiapan dalam pembelajaran umumnya kegiatan ini dilaksanakan di awal tahun pelajaran atau di awal semester. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah untuk membuat beberapa keputusan dan langkah-langkah yang akan diambil selama periode tertentu dalam pelaksanaan pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk semacam acuan kerangka pembelajaran (berupa silabus)

untuk setiap mata pelajaran, dan berdasarkan acuan tersebut para ustadz dituntut untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau semacamnya. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan berdasarkan acuan/kerangka pembelajaran (silabus).

Acuan/kerangka pembelajaran (silabus), memuat:

- a) Nama pelajaran,
- b) Nama lembaga pendidikan dan kelas,
- c) Pokok dan sub pokok bahasan,
- d) Tujuan pembelajaran mata pelajaran,
- e) Metode dan teknik pembelajaran,
- f) Prosedur penilaian,
- g) Alokasi waktu, dan
- h) Sumber belajar.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), memuat:

- a) Nama lembaga pendidikan,
- b) Nama mata pelajaran,
- c) Pokok bahasan dan subpokok bahasan,
- d) Banyaknya pertemuan dan alokasi waktu,
- e) Tujuan pembelajaran,
- f) Ringkasan materi pelajaran,
- g) Metode pelajaran,
- h) Media pembelajaran (alat bantu pembelajaran),
- i) Langkah-langkah pembelajaran (tahap pendahuluan, inti, dan penutup),
- j) Sumber belajar (buku-buku dan media cetak/elektronik dan alam sekitar), dan
- k) Penilaian hasil pembelajaran.

2) Pelaksanaan Pembelajaran

Lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha merupakan satuan pendidikan yang setara dengan SMP dan Tsanawiyah yang alokasi waktu jam tatap muka adalah 40 menit untuk 1 (satu) jam pelajaran. Sementara itu, untuk buku-buku teks pelajaran yang digunakan di lembaga pendidikan diniyah adalah kitab-kitab klasik yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan lembaganya dan peserta didik.

Adapun pengelolaan kelas diharapkan memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a) Ustadz menyesuaikan pengaturan tempat duduk santri sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran.
- b) Volume dan intonasi suara ustadz harus dapat didengar dengan baik oleh semua santri.
- c) Ustadz wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh santri.
- d) Ustadz harus dapat menelaraskan materi pelajaran dengan kemampuan daya serap santri.
- e) Ustadz dapat menciptakan kedisiplinan, ketertiban, suasana kondusif, dan keselamatan dalam proses pembelajaran.
- f) Ustadz mendorong dan menghargai santri untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.
- g) Ustadz-ustadzah senantiasa menggunakan pendekatan *akhlaq al-karîmah* dan metode pembelajaran islami, seperti metode *targhîb wa at-tarhîb*, *amtsâl*, *ibrah*, demonstrasi, dan lain-lain.
- h) Ustadz dan ustadzah harus berpakaian islami, sopan, bersih dan rapi.
- i) Ustadz memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Pelaksanaan proses pembelajaran meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: pendahuluan, inti dan penutup.

a) Kegiatan Pendahuluan Pembelajaran

Pada kegiatan pendahuluan, ustadz-ustadzah perlu melakukan: menyiapkan santri secara fisik dan mental untuk mengikuti proses pembelajaran, memberikan motivasi belajar secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan tujuan dan manfaat materi pelajaran, melakukan pertanyaan awal (*pretest*), berupaya mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari atau dengan kondisi *riil* santri.

b) Kegiatan Inti

Kegiatan inti merupakan tahap penyajian materi pelajaran dan proses interaksi antara ustadz-ustadzah dan santri dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Pada tahap ini ustadz atau ustadzah selain diharuskan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembelajaran di atas, juga harus menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, teknik dan media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik santri, mata pelajaran dan kompetensi yang terkandung dalam materi pembahasan.

Pada kegiatan inti ini terjadi aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan proses *ta'dîb wa at-tazkiyah*, *ta'lîm wa at-tadrîs*, dan *tarbiyah wa al-mahârah*, sebagaimana tertuang pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi kurikulum pendidikan diniyah.

c) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, ustadz atau ustadzah bersama santri baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi (*muḥâsabah*), yang meliputi:

- (1) Secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran;
 - (2) Melakukan penilaian perolehan hasil belajar santri dengan *post-test*;
 - (3) Melakukan umpan balik (*feed back*) terhadap hasil dan proses pembelajaran;
 - (4) Melakukan tindak lanjut (*follow up*) dalam bentuk pemberian tugas;
 - (5) Memberikan nasehat dan pesan *akhlaq al-karîmah* sebelum mengakhiri setiap pembelajaran;
 - (6) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya;
 - (7) Menutup pelajaran dengan membaca surah pendek atau doa.
- d) Penilaian Hasil dan Proses Pembelajaran

Penilaian hasil pada konteks pendidikan keagamaan Islam (pendidikan diniyah) mengacu pada prinsip penilaian *holistic-integrative (kâffah)* yang mencakup dimensi *ta'dîb wa at-tazkiyah*, *ta'lim wa at-tadrîs*, dan *tarbiyah wa al-mahârah*. Sementara penilaian proses ustadz/ustadzah melakukan umpan balik (*feed back*) dari apa yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran sejak dari persiapan pembelajaran, proses pelaksanaan sampai dengan penilaian pembelajaran.

Hasil penilaian tersebut dapat digunakan oleh ustadz/ustadzah untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan (*counseling*). Selain itu, hasil dari evaluasi pembelajaran dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi.

3) Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan (*monitoring*), supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan (*continuity*). Pelaksana pengawasan pembelajaran ini dalam konteks pendidikan keagamaan dilakukan oleh pihak yayasan, kepala lembaga pendidikan keagamaan Islam, dan wakil kepala bidang kurikulum, atau petugas khusus yang ditunjuk oleh pihak yayasan.

4. Standar Penilaian Pendidikan Diniyah

a. Dasar Pemikiran

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan delapan (8) pendidikan, salah satunya adalah standar penilaian. Adapun tujuan standar pendidikan adalah untuk menjamin:

- 1) Perencanaan penilaian santri sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan pada prinsip-prinsip penilaian,
- 2) Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya,
- 3) Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif,

Ketiga tujuan di atas sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan dilaksanakan pada lembaga pendidikan keagamaan, karena *core* (inti) dari karakteristik madrasah keagamaan sudah terakomodir pada tujuan nomor dua (2), yaitu sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Artinya orientasi lembaga pendidikan keagamaan yang memenuhi tuntutan masyarakat (sosial) dan menghargai budaya Islam yang berkembang atau eksis di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Selatan.

b. Desain Standar Penilaian Kurikulum Pendidikan Diniyah

1) Komponen Penilaian Kurikulum Pendidikan Diniyah

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen hasil belajar santri.

Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar santri mencakup:

- a) Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*) pembelajaran.
- b) Penilaian diri (*muhâsabah an-nafs*), merupakan penilaian yang dilaksanakan sendiri oleh santri secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan.
- c) Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi santri secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau dan perbaikan hasil belajar santri.
- d) Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik/berkala untuk menilai penguasaan kompetensi santri setelah menyelesaikan satu pokok bahasan atau lebih.
- e) Ulangan Tengah Semester (UTS), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh ustadz atau ustadzah untuk mengetahui pencapaian kompetensi santri setelah melaksanakan 7-8 minggu kegiatan pembelajaran.
- f) Ulangan Akhir Semester (UAS), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh ustadz atau ustadzah untuk pencapaian kompetensi santri di akhir semester.
- g) Ujian tingkat madrasah/sekolah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) lembaga pendidikan keagamaan.

2) Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar santri pada jenjang pendidikan dasar tingkat wustha didasarkan pada prinsip:

- a) *Adil*, berarti penilaian berbasis pada standar baku dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai.
- b) *Mutakâmilah* (terpadu), berarti penilaian dilakukan oleh ustadz atau ustadzah secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.
- c) *Iqtishâdi*, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- d) *Syafâfi* (transparan), berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.
- e) *Shâdiq* (akuntabel), berarti dapat dipertanggungjawabkan aspek teknik, prosedur dan hasilnya kepada pihak internal sekolah maupun eksternal.
- f) Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi santri dan ustadz atau ustadzah.

3) Pendekatan Penilaian

Pendekatan yang digunakan adalah Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dan Penilaian Acuan Etik (PAE). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh pihak madrasah. Sedangkan PAE adalah penilaian yang mengacu kepada standar etika yang ditetapkan oleh pihak lembaga pendidikan.

4) Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian

a) Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian hasil belajar santri mencakup dimensi *ta'dîb wa at-tazkiyah*, *ta'lîm wa at-tadrîs*, dan *tarbiyah wa al-mahârah*. Ketiga dimensi tersebut terakomodir dalam komponen isi kurikulum pendidikan

diniyah. Sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi yang minimal atau relatif bagi setiap santri dengan kata lain dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Semetara cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup (*scope*) materi dan kompetensi mata pelajaran, program dan proses.

b) Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian dimensi *ta'dīb wa at-tazkiyah (attitude)*, *ta'lim wa at-tadrīs (knowledge)*, dan *tarbiyah wa al-mahârah (skills)*, yaitu sebagai berikut:

(1) Penilaian aspek *ta'dīb* dan *tazkiyah (attitude)*

Ustadz/ustadzah dapat melakukan penilaian terhadap aspek tersebut melalui pengamatan sehari-hari langsung dan tidak langsung, penilaian diri sendiri (*muhâsabah an-nafs*), penilaian teman sebaya, dan catatan harian santri.

(2) Penilaian aspek *ta'lim* dan *tadrīs (knowledge)*

Ustadz atau ustdzah dapat menilai aspek ini melalui tes tulis dan tes lisan. Adapun instrumen tes tulis adalah berupa soal pilihan ganda, menjodohkan, jawaban singkat dan uraian (*essay*). Sedangkan instrumen tes lisan adalah daftar pertanyaan dan hapalan. Sedangkan penugasan berupa PR dan proyek yang dikerjakan individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

(3) Penilaian dimensi *tarbiyah* dan *mahârât (skills)*

Ustadz atau ustdzah dapat memasukan aspek keterampilan ibadah kepada penilaian kinerja. Yaitu penilaian yang menuntut santri untuk mendemonstrasikan suatu keterampilan fisik tertentu. Dalam hal ini dapat berupa keterampilan ibadah atau dengan tes praktik.

Draf desain kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha ini merupakan suatu pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai satu rujukan atau pedoman bagi penyelenggara pendidikan diniyah, khususnya pada tingkat wustha di Kalimantan Selatan. Draf desain kurikulum ini masih sangat terbuka untuk dikritik dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan dalam validasi para pakar, sehingga draf ini dapat dijadikan sebagai satu desain kurikulum pendidikan diniyah pada lembaga pendidikan Keagamaan Islam di Propinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal'an. "Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Diniyah." Jakarta: Puslitbang Penda dan Keagamaan Balitbang Depag, 2003.
- Abrasyi, Muhammad Athiyah al-. *At Tarbiyah al Islāmiyah wa Falāsifatuha*. Mesir: 'Isā al-Yābī al-Halaby, t.t.
- Abrasyi, Muhammad 'Athiyah al-. *Rūh at-Tarbiyah wa at-Ta'lim*. Mesir: 'Isā al-Yābī al-Halaby, 1960.
- Ali, Muhammad. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. 2 ed. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Arifin, Zainal. *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Filsafat Pendidikan Islam (Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Kencana, 2004.
- Bloom, Benjamin S. *Taxonomy of Educational Objectives the Classification of Educational Goals*. New York: David McKay Company Inc, 1974.
- Chan, Sam M., dan Tuti T. Sam. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama. *Pola Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Departemen Diknas. *Pedoman Pelaksanaan Remedial Teaching Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 1995.
- Dimiyati dan Mudjiono. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Reneka Cipta, 2006.

- Drs. H. Barkatullah Amin, M.Ag. Bantuan Dana Rehab, 18 Januari 2014.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Emroni. "Perberdayaan Pondok Pesantren Sullamul 'Ulum Syekh Arsyad al-Banjari Dalam Pagar Martapura Kabupaten Banjar (Penelitian Partisipatif)." *Tashwir* 1 (2013).
- Fadjar, A. Malik. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. 1 ed. Bandung: Mizan, 1998.
- Fakhrudin, Fuad, dan A. Mukti Bisri. *Standar Pelayanan Minimal Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Gordon, William R., Rosemarye T. Taylor, dan Peter F. Oliva. *Developing the Curriculum*. 9 ed. Pearson, 2019.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. 4 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- _____. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. 4 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Hamdan. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Teori dan Praktek*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Hamid, Hamdani. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Hornby, A. S. *Oxford Advanced Dictionary of Current English*. Great Britain: Oxford University Press, 1995.
- Husain, Ahmad. *Program Remedial Teaching dan Program Pengayaan*. Jakarta: Kencana Pramida, 2012.
- Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Juhri, Muhran. "Meningkatkan Citra Madrasah Swasta." *Fikrah* 1 (2002).
- Kementerian Dikbud. "Pedoman Penerapan dan Implementasi Kurikulum 2013." Jakarta: Kementerian Dikbud, 2014.
- Ladjud, Hafni. *Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Quantum Teaching, 2005.

- Maimun, Agus. "Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah." Malang: UIN Malang, 2006.
- . *Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah (Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006.
- Mastuki. *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren suatu Konsep Pengembangan Mutu Madrasah*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Depag. RI, 2004.
- McCawley, Paul F. *Methods for Conducting an Educational Needs Assessment*. Moscow: University of Idaho Extension, 2010.
- Menteri Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam," t.t.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mujib, Abdul, dan Yusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Mulyasa, E. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Depag. RI, 2005.
- Murdan. *Evaluasi Pendidikan Agama Islam (Suatu Pengantar)*. Banjarmasin: Cyprus, 2007.
- Musnad Abi Hurairah*. Vol. 2, t.t.
- Muthamainnah, Inna. "Designing the Curriculum of Kitab Kuning (Arabic Script) at Pondok Pesantren Salafiyah in South Kalimantan." Universiti Utara Malaysia, 2014.
- N, Sudirman. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- . *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bina Aksara, 2010.
- Oliver, Albert I. *Curriculum Improvement: A Guide Problem, Principles, and Process*. 2 ed. New York: Harper & Row, 1977.
- Pardi, M. Habib Husnial. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam, ed. Suwito dan Fauzan*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Pemerintah Republik Indonesia. "UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2005.
- Pusat Bahasa Depdiknas. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

- Quirk, Randolph. "Longman Dictionary of Contemporary English (New Edition)." London: Richard Clay Ltd. Bungay, Suffolk, 1987.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Rivai, Veithzal, Zainal, dan Fauzi Bahar. *Islamic Education Management dari Teori ke Praktik (Mengelola Pendidikan secara Profesional dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Rusn, Abidin Ibnu. *Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sabda, Syaifuddin. *Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: LP2M IAIN Antasari, 2004.
- _____. *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis*. Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2016.
- Seel, Norbert M., dan Sanne Dijkstra. *Curriculum, Plans, and Processes in Instructional Design*. London, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004.
- Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Soetopo, Hendyat, dan Wasty Soemanto. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Subandijah. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Sudjana, Nana. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, 1988.
- Sukardi, M. *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- _____. *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1988.
- Taba, Hilda. *Curriculum Development: Theory and Practice*. San Francisco: Brace & World Inc, 1962.
- Tanner, Daniel, dan Laurel Tanner. *Curriculum Development: Theory into Practice*. 4 ed. Upper Saddle River, N.J: Merrill/Prentice Hall, 2007.
- Taysir al Wushul Ila Tsalasah al-Ushul Li 'Abd*. Vol. 1, t.t.

- Tim Pengembangan MKDP. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wiles, Jon, dan Joseph Bondi. *Curriculum Development: A Guide to Practice*. New Jersey: Pearson Education. Inc, 2007.
- Zainal Arifin. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Zainal Ilmi, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Itiqamah Banjarmasin. Kurikulum Pondok Pesantren Al-Istiqamah Kalimantan Selatan, 9 Februari 2015.
- Zaini, Muhammad. *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Zakaria, Abu al Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam al Maqayyis fi al Luhgah*. Beirut: Dar Al-Fikri, 1994.
- Zubaidi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

"Kurikulum adalah menu utama yang disajikan kepada siswa di lembaga pendidikan. Kurikulum sangat menentukan apa, bagaimana, dan ke mana proses pembelajaran di satu lembaga pendidikan. Buku ini berusaha menyajikan desain kurikulum madrasah diniyah berdasarkan pendekatan akar rumput. Ide dasar buku ini sangat penting, bukan saja karena pendekatan yang ditawarkannya, melainkan juga karena kurikulum madrasah diniyah selama ini kurang dinamis dibanding lembaga pendidikan lainnya. Inilah suatu terobosan yang bermakna."

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S.Ag., M.A.
Rektor UIN Antasari Banjarmasin

ZAHIR
publishing

✉ zahirpublishing@gmail.com
🌐 www.zahirpublishing.com

ISBN 978-623-466-059-3



9 786234 660593

